#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BADAN POM

LAPORAN KINERJA

2025

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

















#BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan bentuk aktualisasi dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai POM di Ambon ini merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik mengenai kinerja untuk mendorong menyelenggarakan tugas umum dan fungsi selaku instansi pemerintah yang baik.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025, diharapkan akan memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan / tindak lanjut berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan kinerja Balai POM di Ambon untuk meningkatkan kinerja pada Tahun berikutnya.

Ambon, 27 Februari 2026
Kepala Balai POM di Ambon,

Tamran Ismail, S.Si.,S.Farm, MP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Ambon disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja mengacu pada Renstra Balai POM di Ambon Tahun 2025-2029, yang terdiri dari 27 Indikator Kinerja Kegiatan. Pencapaian sasaran kegiatan Tahun 2025 diukur dari 7 (Tujuh) Sasaran Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 6 (Enam) Direktif penugasan. Pada Tahun 2025, diperoleh nilai **NKO** sebesar 93,01% dengan kriteria **"Baik"**. Nilai NKO tersebut diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu capaian perjanjian kinerja, dan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai POM di Ambon dengan predikat "**BB**". Dengan demikian disimpulkan bahwa Balai POM di Ambon dalam pelaksanaan capaian kinerja sudah maksimal dengan mencapai target 5 sasaran kegiatan dengan kriteria **"Sangat Baik"** dan 2 sasaran kegiatan dengan kriteria **"Baik"**.

1. Pada Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran kegiatan **"Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT"** mencapai Sasaran Kegiatan sebesar 104,22% dengan kriteria **"Sangat Baik"**. Terdiri dari 15 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan kriteria sebagai berikut :
   - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**,** realisasi 97,77 dengan target 89,50 sehingga capaian 109,24% **(Sangat Baik)**
   - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, realisasi 26,7 dengan target 26 sehingga capaian 102,69% **(Sangat Baik)**
   - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, realisasi 97,70 dengan target 91,00 sehingga capaian 107,36% **(Sangat Baik)**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, realisasi 100 dengan target 100 sehingga capaian 100,00% **(Baik)**
- Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, realisasi 91,11 dengan target 91,00 sehingga capaian 100,12% **(Sangat Baik)**
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, realisasi 92,99 dengan target 85,00 sehingga capaian 109,40% **(Sangat Baik)**
- Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, realisasi 98,00 dengan target 91,00 sehingga capaian 107,69% **(Sangat Baik)**
- Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, realisasi 88,57 dengan target 85,00 sehingga capaian 104,20% **(Sangat Baik)**
- Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, realisasi 99,50 dengan target 94,00 sehingga capaian 105,85% **(Sangat Baik)**
- Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, realisasi 95,10 dengan target 89,00 sehingga capaian 106,85% **(Sangat Baik)**
- Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, realisasi 97,63 dengan target 93,06 sehingga capaian 104,91% **(Sangat Baik)**
- Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, realisasi 91,00 dengan target 91,00 sehingga capaian 100,00% **(Baik)**
- Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, realisasi 103,96 dengan target 100 sehingga capaian 103,96% **(Sangat Baik)**
- Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, realisasi 11,11 dengan target 11,11 sehingga capaian 100% **(Baik)**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, realisasi 74,60 dengan target 73,90 sehingga capaian 100,95% **(Sangat Baik)**

2. Pada Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **"Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT"** mencapai Sasaran Kegiatan sebesar 100,99% dengan kriteria **"Sangat Baik**". Terdiri dari 4 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dimana 4 IKK dengan kriteria sebagai berikut :
   - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, realisasi 91,40 dengan target 87,93 sehingga capaian 103,95% **(Sangat Baik)**
   - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, realisasi 10 sekolah dengan target 10 sehingga capaian 100,00% **(Baik)**
   - Jumlah Desa Pangan Aman, realisasi 3 desa dengan target 3 sehingga capaian 100,00% **(Baik)**
   - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, realisasi 1 pasar dengan target 1 sehingga capaian 100,00% **(Baik)**

3. Pada Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **"Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu"** mencapai Sasaran Kegiatan sebesar 100 dengan kriteria "**Baik**". Terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan kriteria sebagai berikut :
   - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, realisasi 17,57 dengan target 17,57 sehingga capaian 100% **(Baik)**

4. Pada Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **"Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT"** mencapai Sasaran Kegiatan sebesar 103,33% dengan kriteria "**Sangat Baik**". Terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dengan kriteria sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT**,** realisasi 77,50 dengan target 76,00 sehingga capaian 103,33% **(Sangat Baik)**

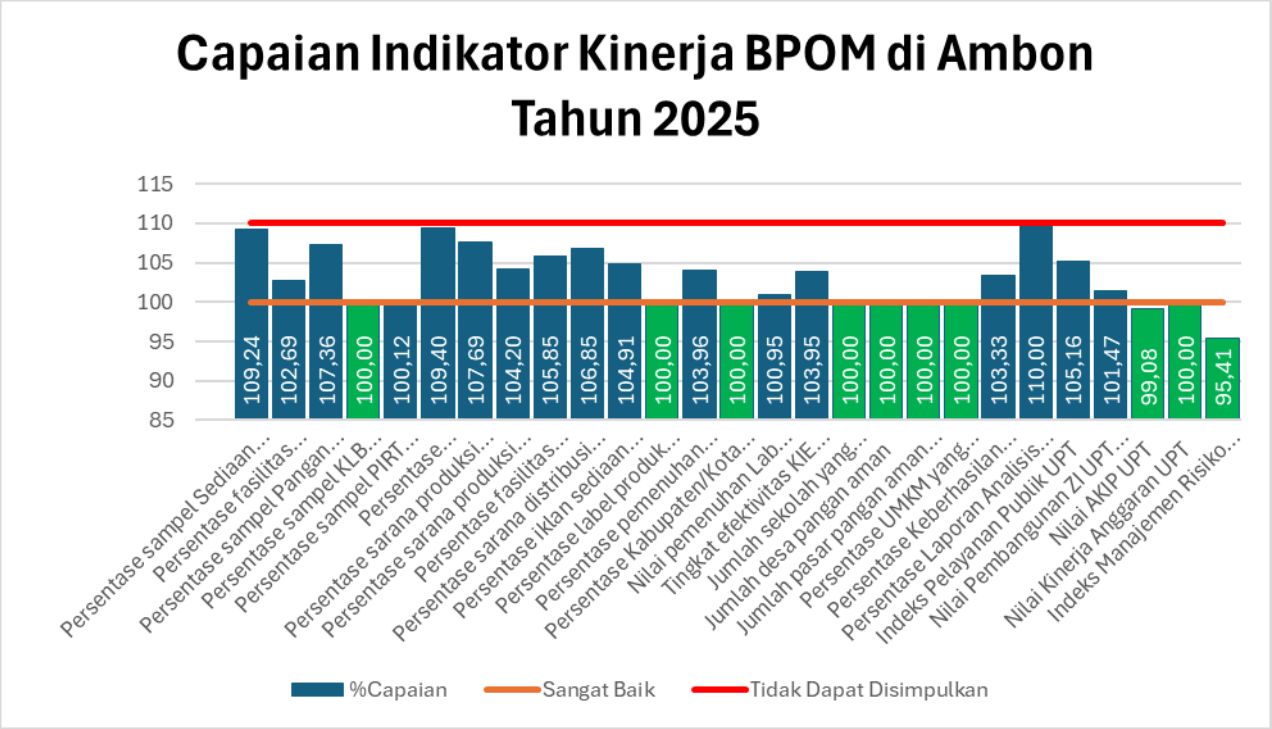
5. Pada Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **"Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT"** mencapai Sasaran Kegiatan sebesar 110% dengan kriteria "**Sangat Baik**". Terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dengan kriteria sebagai berikut :
   - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, realisasi 99,00 dengan target 90,00 sehingga capaian 110,00% **(Sangat Baik)**

6. Pada Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran "**Layanan Publik UPT yang prima**" mencapai Sasaran Kegiatan sebesar 105,16% dengan kriteria "**Sangat Baik**". terdiri dari 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan kriteria sebagai berikut :
   - Indeks Pelayanan Publik UPT, realisasi 4,89 dengan target 4,65 sehingga capaian 105,16% **(Sangat Baik)**

7. Pada Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **"Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"** mencapai sasaran kegiatan sebesar 98,99% dengan kriteria "**Baik**". Terdiri dari 4 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan kriteria sebagai berikut :
   - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, realisasi 87,26 dengan target 86,00 sehingga capaian 101,47% **(Sangat Baik)**
   - Nilai AKIP UPT, realisasi 78,77% dengan target 79,50 sehingga capaian 99,08% **(Baik)**
   - Nilai Kinerja Anggaran UPT, realisasi 5 dengan target 5 sehingga capaian 100,00% **(Baik)**
   - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, realisasi 2,91 dengan target 3,05 sehingga capaian 95,41% **(Baik)**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Balai POM di Ambon Tahun 2025



BPOM di Ambon akan terus melaksanakan optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana dilingkungan BPOM di Ambon sehingga dapat mendukung kinerja BPOM di Ambon secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government. Dalam pencapaian sasaran kegiatan yang ditelah ditetapkan, berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi dari perencanaan dan pelaksanaan hingga monitoring evaluasi kinerja secara berkala dilakukan oleh BPOM di Ambon.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran menjadi fokus perbaikan kinerja di periode selanjutnya.

Ambon, 27 Februari 2026
Kepala Balai POM di Ambon,

Tamran Ismail, S.Si, S.Farm, MP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

HIGHLIGHT KINERJA

Selama tahun 2025, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah menerima beberapa penghargaan dan catatan keberhasilan antara lain :

1. Piagam Penghargaan-Inovasi Pala Voor MBG sebagai Top 8 Kompetisi Inovasi (Koin) BPOM Tahun 2025



2. Penghargaan-Inovasi Pesta Kenari Pro-UMKM sebagai Top 22 Kompetisi Inovasi (Koin) BPOM Tahun 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Piagam Penghargaan-Inovasi Mobil Terosa sebagai Top 22 Kompetisi Inovasi (Koin) BPOM Tahun 2025



4. Piagam Penghargaan atas kontribusi dalam mengkoordinasikan lintas sektor dalam Kegiatan Semarak Aksi Nyata Pengendalian Resistensi Antimikroba



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



5. Piagam Penghargaan atas kontribusi Aktif dalam kolaborasi dan koordinasi Rebranding Gerakan Ayo Buang Sampah Obat Dengan benar (ABSO)


BADAN POM

PIAGAM PENGHARGAAN

Balai POM di Ambon

GERAKAN AYO BUANG SAMPAH OBAT DENGAN BENAR (ABSO)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Sertifikat Balai Terbaik 2 Pada Kategori Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan, Diberikan Pada Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan



7. Sertifikat Balai terbaik 1 Pada Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan diberikan pada forum komunikasi pencegahan kejahatan obat dan makanan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Piagam Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2025 Kategori Pelayanan Prima



9. Piagam penghargaan terbaik II Satuan Kerja dengan IKPA tertinggi untuk pagu sedang periode Tahun anggaran 2025 dari KPPN Ambon



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sebagai upaya mewujudkan visi "BPOM Menuju World Class Bureaucracy" pada Road Map Agen Perubahan Tahun 2025, Balai POM di Ambon telah merancang berbagai inovasi yang terintegrasi dalam Project Action Plan. Digitalisasi menjadi landasan utama, yang diimplementasikan melalui serangkaian program dan kegiatan yang mendukung pengembangan Birokrasi yang bersih, melayani, dan berintegritas. Adapun inovasi yang digunakan selama Tahun 2025 pada Balai POM di Ambon adalah :

1. **RB on Stage**

   Inovasi berupa kompetisi olahraga maupun seni yang bertujuan untuk meningkatkan engagement pegawai BPOM di Ambon melalui team building untuk menumbuhkan kerjasama dan kekompakan, meningkatkan kemampuan leadership dan mengasah kreativitas. RB On Stage mampu menciptakan momentum yang kuat untuk menggalang kesadaran akan pentingnya integritas berdasarkan Core Values ASN BerAKHLAK.

Gambar 1. Inovasi *RB on Stage*

2. **Sosis RB (Sosialisasi Reformasi Birokrasi)**

   Inovasi berupa sosialisasi reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mengedukasi dan menginternalisasi pegawai Balai POM di Ambon terkait pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta Core Values ASN BerAKHLAK. Inovasi ini dilaksanakan setiap hari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Senin saat apel pagi dan kuis yang dilaksanakan setiap triwulan sebagai salah satu evaluasi keberhasilan inovasi ini.



Gambar 2. Inovasi Sosis RB

3. Sagu Salempeng (Sarana Berbagi Ilmu, Sharing Pengalaman dan Pengetahuan)

Inovasi ini merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan BPOM di Ambon dalam rangka pemenuhan informasi publik. Inovasi ini hadir melalui platform sosial media Balai POM di Ambon seperti Channel Youtube, Facebook dan Instagram serta buletin Mag Manise pada Panorama 24.



Gambar 3. Inovasi Sagu Salempeng

4. Kalesang BMN

Kalesang BMN merupakan aplikasi berbasis website yang dikembangkan oleh Balai POM di Ambon guna mengefektifkan pemeliharaan BMN serta pelaporan yang dilakukan oleh pegawai/ pengguna BMN. Pada tahap awal pegawai akan diberikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5 pilihan fitur yaitu konsultasi, input laporan, monitoring status penanganan laporan, permintaan layanan TI dan FAQ (Frequently Asked Question).

Gambar 4. Kalesang BMN

5. Panorama 24 (Papan Informasi Online 24 Jam)

Panorama 24 merupakan salah satu inovasi berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk layanan publik dengan memberikan informasi terkait obat dan makanan yang dapat diakses secara online dengan mudah dan cepat berbasis web. Berbagai informasi yang dapat dilihat melalui menu profil, layanan, pengaduan dan konsultasi, informasi publik, inovasi dan kabar terkini seputar lingkup pengawasan Balai POM di Ambon melalui url: www.ambon.pom.go.id



Gambar 5. Inovasi Panorama 24

6. BETAKEPO (Bersama Kita Kembangkan Potensi)

Beta Kepo merupakan pelatihan/seminar/workshop yang bertujuan mendukung kompetensi pegawai Balai POM di Ambon untuk menunjang kinerja pegawai diluar kinerja utama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 6. Inovasi Beta Kepo

7. Kompas (KOMPetisi InovASi)

Kompas adalah inovasi sebagai sarana kompetisi antar pegawai Balai POM di Ambon terkait ide dan improvement yang dilakukan di masing-masing fungsi maupun tingkat organisasi Balai POM di Ambon dengan kriteria/aspek penilaian antara lain masalah/isu, manfaat, dampak, keberlangsungan inovasi dan indikator keberhasilan. Output dari inovasi ini menjadi salah satu komponen penilaian inovasi PEGAWAI MANISE



Gambar 7. Inovasi KOMPAS

8. Bacarita Do (Balai POM di Ambon Mudah Cari Data dan Dokumen di Subsite Balai POM di Ambon)

Bacarita Do merupakan salah satu cara penyimpanan data dan dokumen agar mudah telusur dan aman. Pemanfaatan data dan dokumen Bacarita Do dapat dengan mudah diakses oleh stakeholder internal maupun eksternal Balai POM di Ambon sebagai wujud keterbukaan publik terhadap pelayanan Balai POM di Ambon.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 8. Inovasi Bacarita Do

9. Pegawai Manise

Pegawai Manise merupakan sebuah inovasi yang dibentuk oleh Balai POM di Ambon dalam rangka pemberian apresiasi terhadap pegawai yang menunjukkan kinerja yang baik sesuai dengan beberapa kriteria diantaranya kinerja (SKP), penghargaan/apresiasi, hasil survey pegawai.



Gambar 9. Inovasi Pegawai Manise

10. Pin TOKI (Pin Tolak Gratifikasi)

Pin TOKI merupakan inovasi terkait gratifikasi berupa pin yang menjadi atribut wajib setiap pegawai Balai POM di Ambon baik yang berada di kantor (sebagai bentuk internalisasi) maupun bertugas di lapangan sebagai bentuk sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Selain itu, Pin TOKI juga diberikan kepada pengguna layanan publik/customer yang berkunjung ke Balai POM di Ambon sebagai bentuk sosialisasi terhadap sikap anti gratifikasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 10. Logo Pin TOKI (Pin Tolak Gratifikasi).

11. MASKOT TOKI (Maskot Tolak Gratifikasi)

Maskot TOKI merupakan maskot yang dibagikan kepada stakeholder terkait sebagai bukti komitmen Balai POM di Ambon terhadap penolakan Gratifikasi.



Gambar 11. Inovasi Maskot TOKI

12. Lapor Katong

Sebagai inovasi layanan pengaduan (Whistleblowing System) eksternal dan internal yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan pegawai yang dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai prosedur melalui QR Code. Pelaporan yang bersumber dari pihak eksternal (masyarakat) akan langsung diarahkan ke WA pengaduan yang dipegang oleh Kepala Balai POM di Ambon, dan pelaporan yang bersumber dari pihak internal akan tersambung langsung ke aplikasi Sang Integritas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 12. Inovasi Lapor Katong

13. KUKIS (Keku Risiko)

Kukis merupakan saluran pelaporan risiko secara *online* yang ditujukan bagi seluruh pegawai BPOM Ambon. Inovasi ini selalu terbuka bagi seluruh pegawai Balai POM di Ambon untuk mengidentifikasi dan melaporkan adanya potensi risiko yang ditemui dalam kegiatan kerja sehari-hari.



Gambar 13. Inovasi KUKIS

14. Pusaka OMA (Percepatan Pengujian Sampel Eksternal Obat dan Makanan)

Pusaka Oma merupakan salah satu inovasi dalam pelayanan publik Balai POM di Ambon sebagai wujud komitmen untuk memberikan layanan publik terbaik melalui percepatan pengujian sampel eksternal Obat dan Makanan yang cepat, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Pelayanan Publik Balai POM di Ambon.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 14. Inovasi Pusaka OMA

15. Gebrak Stunting (Gerakan Bersama Kurangi Stunting)

Gebrak Stunting merupakan kegiatan inovasi pelayanan publik Balai POM di Ambon bersama beberapa kolaborator dalam upaya penurunan angka stunting di Provinsi Maluku guna mencapai Indonesia emas 2045. Intervensi dalam program ini berupa pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal Maluku pada anak Gizi Kurang usia 1-4 tahun selama 1 tahun dengan intervensi wajib selama 90 hari (3 bulan) dan intervensi tambahan selama 9 bulan.



Gambar 15. Inovasi Gebrak Stunting

16. Pesta Kenari Pro UMKM (Pendampingan Percepatan Sertifikasi dan Registrasi Produk UMKM)

Pesta Kenari Pro UMKM merupakan kegiatan pembinaan dan pendampingan secara komprehensif kepada UMKM untuk meningkatkan daya saing produk melalui pendampingan pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB) dan Kegiatan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) melalui OSS RBA,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pendampingan pembuatan NPWP melalui pajak , percepatan proses pemeriksaan sarana balai, pendampingan proses e-sertifikasi, pendampingan proses e-registrasi, pendampingan akses permodalan, pendampingan SPP-IRT, pendampingan pembuatan desain label, membantu akses pemasaran, dan membantu akses sertifikasi halal.



Gambar 16. Inovasi Pesta Kenari Pro UMKM

17. Toska

Toska merupakan inovasi yang dibuat agar para pelaksana perjalanan dinas dapat dengan mudah dan efektif melengkapi dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas berupa dokumen Rincian Biaya Perjalanan, Surat Pernyataan, Daftar Riil Pengeluaran, dan dokumen LS Perjalanan Dinas.



Gambar 17. Inovasi TOSKA

18. Mobil Terosa (Mobil Keliling Pelayanan Terpadu Obat dan Makanan bersama Kader)

Mobil Terosa merupakan inovasi yang melibatkan berbagai pihak yakni pemerintan dan masyarakat (kader) dalam melakukan pengawasan obat dan makanan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

memberikan informasi dan edukasi obat dan makanan aman kepada masyarakat dan melakukan sampling dan pengujian cepat pangan aman olahan siap saji.



Gambar 18. Inovasi Mobil Terosa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		i
Ringkasan Eksekutif		ii
Highlight Kinerja		viii
Daftar Isi		xxiii
Daftar Tabel		
Daftar Gambar		
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Gambaran Umum Organisasi	2
1.3	Struktur Organisasi	4
1.4	Isu Strategis	5
1.4.1	Aspek Strategis Organisasi	5
1.4.2	Analisis Lingkungan Strategis	24
1.4.3	Pembahasan Isu Strategis BPOM Ambon	35
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
2.1	Uraian Singkat Rencana Strategis	57
2.2	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025	62
2.3	Perjanjian Kinerja (PK) 2025	66
2.4	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	70
2.5	Metode Pengukuran	76
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1	Capaian Kinerja Organisasi	83
	Analisis Akuntabilitas Kinerja	89

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSK. 1 Persentase sasmpel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan……. 95
IKSK 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO …… 102
IKSK 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ……. 107
IKSK 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT …….. 116
IKSK 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan …….. 123
IKSK 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder ….. 132
IKSK 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan …… 137
IKSK 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan …… 143
IKSK 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan …… 149
IKSK 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan …… 154
IKSK 11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan ……. 159
IKSK 12. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSK 13. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 169
IKSK 14. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 174
IKSK 15. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 179
IKSK 16. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 186
IKSK 17. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan Keamanan Pangan 191
IKSK 18. Jumlah Desa Pangan Aman 196
IKSK 19. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 201
IKSK 20. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan 207
IKSK 21. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT 214
IKSK 22. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar 219
IKSK 23. Indeks Pelayanan Publik UPT 224
IKSK 24. Nilai Pembangunan ZI 230
IKSK 25. Nilai AKIP UPT 237
IKSK 26. Nilai Kinerja Anggaran UPT 245
IKSK 27. Indeks Manajemen Risiko UPT 250

3.2 Pemanfaatan Informasi Kinerja 257

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.3 Realisasi Anggaran 260

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 279

4.2 Saran 280

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



BAB I
PENDAHULUAN







BADAN POM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di Ambon sebagai UPT dari BPOM bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta penga wasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya di wilayah Provinsi Maluku.

Tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan melekat pada Balai POM di Ambon sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan di Provinsi Maluku dalam hal perlindungan terhadap konsumen terkait obat dan makanan, dari hulu sampai ke hilir. Tupoksi Balai POM di Ambon ini sangat penting dan strategis dalam rangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (ASTA CITA) yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada butir 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; dan pada butir 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Tahun 2025 merupakan tahun awal rencana strategis 2025-2029, oleh karena itu, Balai POM di Ambon sebagai lembaga pengawas obat dan makanan sangat penting untuk diperkuat. Baik dari sisi kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan sarana pendukung lainnya seperti laboratorium, sistem teknologi informasi dan lain sebagainya dalam rangka mendukung tugas tersebut. Pelaporan kinerja penting dilakukan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI



Gambar 19. Gedung Balai POM di Ambon

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor No. 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai POM di Ambon merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Kedudukan Balai POM di Ambon berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Balai POM di Ambon sebagai unit pelaksana teknis Badan POM yang memiliki wilayah kerja di Provinsi Maluku meliputi 9 (sembilan) kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, pangan dan bahan berbahaya.

Tugas

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025, Balai POM di Ambon mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja di Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Balai POM di Ambon sebagai salah satu UPT Badan POM sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025, memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.3 STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 20. Bagan Struktur Organisasi Balai POM di Ambon

Tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Bagian dan Kelompok Tim Kerja dijabarkan sebagai berikut :

1. **Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.
2. **Kelompok Jabatan Fungsional Pengujian** mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan, terdiri atas Pengujian Kimia, Mikrobiologi dan Biomolekuler.
3. **Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksaan** mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. **Kelompok Jabatan Fungsional Penindakan** mempunyai tugas melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
5. **Kelompok Jabatan Fungsional Informasi dan Komunikasi** mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

1.4 ISU STRATEGIS

1.4.1 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Balai POM di Ambon memiliki peran sangat strategis dalam memastikan produk obat dan makanan yang beredar adalah produk yang aman, bermutu dan berkhasiat atau bergizi. Untuk melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan perlu peran serta pelaku usaha sebagai produsen dan masyarakat selaku konsumen.

Balai POM di Ambon akan terus meningkatkan kolaborasi dan sinergisme dengan para pemangku kepentingan di daerah khususnya Pemerintah Provinsi Maluku dan mitra kerja lainnya guna meningkatnya kinerja dari Balai POM di Ambon untuk penjaminan keamanan obat dan makanan yang beredar.

Kolaborasi dan sinergisme Balai POM di Ambon pada Tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Aspirasi Maluku: Hasil Intensifikasi Pangan selama Bulan Ramadan dan Jelang idul Fitri 1446 H

   Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon terus meningkatkan pengawasan pangan di Provinsi Maluku selama bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M. Intensifikasi pengawasan ini bertujuan untuk memastikan keamanan pangan yang beredar di masyarakat, dengan fokus pada produk pangan yang dikonsumsi selama bulan suci Ramadan. Hasil pengawasan dipaparkan dalam dialog yang menghadirkan Kepala Dinas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku dan Kepala Balai POM di Ambon



Gambar 21. Aspirasi Maluku: Hasil Intensifikasi Pangan selama Bulan Ramadan

2. Forum Advokasi Terpadu BPOM Ambon dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku

   Sebagai tindak lanjut dari hasil kooordinasi antara Kepala BPOM Ambon, Tamran Ismail dan Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku, Budy Cahyadi, maka tanggat 17 Maret 2025 dilaksanakan Forum Advokasi Terpadu yang membahas monitoring dan evaluasi terkait pelayanan pengujian sampel pihak ketiga. Selama ini BPOM Ambon merupakan satu-satunya instansi yang memberikan pelayanan pengujian sampel Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Demi meningkatkan pelayanan publik, maka secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepuasan pelanggan, yang dalam hal ini Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku menjadi salah satunya. Untuk mengakomodir Satuan Rserse Narkoba se Provinsi Maluku, maka kegiatan ini dilakukan secara hybrid dan berpusat di ruang Aula Polda Maluku

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 22. Advokasi Terpadu BPOM Ambon dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku

3. Forum Advokasi Propenas 2025

Dalam rangka memperkuat sinergi lintas sektor demi mewujudkan keamanan pangan yang menyeluruh, Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Ambon menyelenggarakan Forum Advokasi Komitmen Program Prioritas Nasional (Propenas) Tahun 2025 di Aula Vlissingen, Kantor Wali Kota Ambon, Selasa (15/4).



Gambar 23. Forum Advokasi Propenas 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Balai POM di Ambon Gelar Forum Konsultasi Publik dan Canangkan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

   Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon menggelar Forum Konsultasi Publik dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku pada Selasa (27/5). Kegiatan ini bertujuan menghimpun kritik, saran, serta harapan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus mendeklarasikan komitmen menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

   Sebagai bagian dari pencanangan Zona Integritas, dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh para pihak terkait juga menjadi simbol dukungan terhadap pembangunan Zona Integritas dan pelayanan prima di BPOM Ambon. Pada momen ini juga dilakukan penyerahan sertifikat IP-CPPOB dan nomor izin edar produk kepada pelaku usaha oleh Asisten I dan Kepala Balai POM Ambon. Tamran Ismail juga menyerahkan maskot TOKI (Tolak Gratifikasi) dan buletin Mag Manize edisi 1 dan 2 kepada Asisten I sebagai bentuk sosialisasi Balai POM Ambon menola Gratifikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



Gambar 24. Konsultasi Publik dan Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Audiensi Dengan Kepala Balai KIPM Ambon

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, Tamran Ismail, bersama staf Anita Soenarko dan Siska Yanti melakukan audiensi dengan Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIMP), Kementerian Kelautan dan Perikanan di Ambon ,M Hatta Arisandi, Senin, 14 Juli 2025 di Kantor Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Jalan Laksda Leo Wattimena Waiheru – Ambon. Dari hasil pertemuan ini, didapatkan informasi penting tentang ruang lingkup yang dimiliki laboratorium Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan maupun laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan dan menyepakati untuk dilakukan kerjasama dalam mengawal komoditi hasil perikanan





Gambar 25. Audiensi Dengan Kepala Balai KIPM Ambon

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Balai POM di Ambon dan Universitas Pattimura Sepakati Implementation Agreement Pengembangan Kompetensi Mahasiswa Peternakan

   Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Ambon kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan tinggi dengan menjalin sinergi bersama Universitas Pattimura. Bertempat di ruang pertemuan Gedung Pelayanan Publik Balai POM di Ambon, telah dilaksanakan penandatanganan Implementation Agreement (IA) antara Balai POM di Ambon dan Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Pattimura.

   Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sebelumnya telah disepakati antara Badan POM dan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura. Penandatanganan IA dilakukan langsung oleh Kepala Balai POM di Ambon, Tamran Ismail, dan Ketua Jurusan Peternakan, J. M. Tatipikalawan. Sebelum penandatanganan IA, kedua belah pihak telah melalui proses diskusi dan penyelarasan isi dokumen. Proses ini memastikan bahwa sinergisme dan kontribusi masing-masing pihak terakomodasi secara optimal. Dokumen IA memuat rincian pelaksanaan kegiatan, mekanisme koordinasi, hingga evaluasi pelaksanaan kerja sama.



Gambar 26. Implementation Agreement antara Balai POM di Ambon dan Universitas Pattimura

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Forum Konsultasi Jejaring Laboratorium di Provinsi Maluku

   Laboratorium pengujian memiliki peran penting dalam berbagai bidang, termasuk memastikan kualitas produk, keamanan konsumen dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Laboratorium juga berperan dalam pengembangan produk baru, memberikan data akurat untuk pengambilan keputusan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi, akses produk menjadi lebih mudah dan cepat yang memungkinkan meningkatnya produk illegal atau substandard dan kasus keracunan juga semakin tinggi diwilayah Maluku. Selain itu perkembangan dunia usaha juga meningkat termasuk UMKM sehingga permintaan pengujian produk obat dan makanan untuk menjamin keamanan, mutu dan kualitas produk juga meningkat. Dilain pihak dengan adanya efisiensi anggaran, kebutuhan sumber daya dibatasi.

   Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan suatu wadah bersama sehingga jejaring laboratorium pengujian menjadi urgent dan solutif karena dapat meningkatkan efisiensi,akurasi, dan kredibilitas pengujian, serta mendukung keamanan produk dan persaingan pasar.

   Terkait hal ini maka dilakukanlah Forum Konsultasi Pembentukan Jejaring Laboratorium Pengujian di Provinsi Maluku pada tanggal 14 Agustus 2025 di aula Pattimura Balai POM di Ambon. Kegiatan ini di buka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie dalam sambutannya disampaikan bahwa pertemuan ini sangat penting dan strategis untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas dalam mengamankan produk produk terutama produk produk Maluku berbasis kearifan lokal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).





Gambar 27. Forum Konsultasi Jejaring Laboratorium

8. BPOM Ambon Hadiri Musyawarah Wilayah IDI Maluku, Perkuat Sinergi Sektor Kesehatan

   Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Ambon turut hadir dalam Musyawarah Wilayah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Maluku yang diselenggarakan secara hybrid di Ruang Rapat Kantor Gubernur Maluku, Sabtu (23/8). Kegiatan ini menjadi ajang strategis dalam memperkuat kolaborasi antara IDI, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan di sektor kesehatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kegiatan ini dihadiri oleh para Ketua Pengurus Cabang IDI Kabupaten/Kota se-Maluku, anggota IDI, Kepala BPOM Ambon, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, ketua-ketua organisasi profesi kesehatan, serta para undangan lainnya. Musyawarah Wilayah ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan memperkuat koordinasi dalam mengatasi tantangan kesehatan di Provinsi Maluku, serta membangun sistem pelayanan kesehatan yang inklusif dan merata



Gambar 28. Musyawarah Wilayah IDI Maluku

9. BPOM Ambon hadiri Rapat Kerja Bersama Pansus I DPRD Kota Ambon.

   Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Ambon semakin meningkat karena menjadi bagian dari kehidupan masyarakat , namun keberadaannya ada yang sesuai ketentuan tetapi ada juga yang cukup memprihatinkan sehingga perlu adanya pengaturan penyelenggaraan depot air minum. Menindaklanjuti kondisi ini maka Komisi I DPRD Kota Ambon memandang perlu beberapa OPD Kota Ambon terkait dan Asosiasi untuk duduk bersama membahas kondisi usaha Depot Minum Air Isi Ulang yang sudah berproses pada Pembobotan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Ambon pada hari Selasa , 9 September 2025 bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Ambon. Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus I, Bpk Erol da Costa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 29. Rapat Kerja Bersama Pansus I DPRD Kota Ambon

10. Tim Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Tual Melaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Aksi

    Tual-(8/09/25) Sebagai bukti keseriusan dan komitmen Pemerintah Kota Tual yang telah membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM), maka dilakukan rapat pembahasan rencana aksi TKPPOM Kota Tual di Ruang Rapat Kantor Dinas Kesehatan Kota Tual dengan dipimpin langsung oleh Plt.Sekretaris Daerah Kota Tual, Ridwan Husain Renwarin.

    Pada pertemuan ini dilakukan pembahasan terkait rencana aksi masing-masing OPD dalam mengawal pengawasan obat dan makanan, di mana hal ini juga akan menjadi aspek pendukung dalam persiapan menuju Kota Tual sebagai Kota Pangan Aman. Dalam tools penilaian Kota Pangan Aman, berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh TKPPOM menjadi penentu dan Gambaran bahwa pemerintah daerah benar-benar telah berkomitmen melaksanakan program keamanan pangan di daerahnya. Tidak hanya terkait pangan, tapi pengawasan obat termasuk pengawasan penggunaaan antimikroba.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).





Gambar 30. Rapat Bersama pemerintah kota Tual

11. Balai POM Ambon Gelar Rapat Pembahasan Rencana Aksi TKPPOM dan Pendampingan Pengisian Tools KKPA di Kabupaten Buru

    Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon melaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Aksi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) serta Advokasi dan Pendampingan Pengisian Tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) bersama lintas sektor terkait di Kabupaten Buru. Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati Buru dengan menghadirkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang termasuk dalam keanggotaan TKPPOM Kabupaten Buru.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hal ini membuktikan bahwa keamanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu OPD, melainkan merupakan kerja bersama seluruh lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, Balai POM di Ambon mendorong sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan penilaian mandiri KKPA untuk memastikan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi masyarakat.



Gambar 31. TKPPOM di Kabupaten Buru

12. Balai POM Ambon Gelar Rapat Pembahasan Rencana Aksi TKPPOM dan Pendampingan Pengisian Tools KKPA di Kabupaten Maluku Tengah

BPOM di Ambon terus mendorong daerah untuk lakukan pengawasan obat dan makanan secara komprehensif dan sinergis diantaranya dengan adanya Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM). Untuk mewujudkan kinerja TKPPOM, pada Rabu, 17 September 2025 bertempat di Aula Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tengah TKPPOM Kabupaten Maluku Tengah digelar Rapat Pembahasan Rencana Aksi.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, serta pengisian Rencana Aksi TKPPOM yang memuat target-target strategis. Dokumen rencana aksi tersebut juga akan menjadi data dukung Program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) yang diinisiasi oleh Badan POM RI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Peserta rapat tampak antusias mengikuti jalannya kegiatan, terutama dalam proses pengisian Rencana Aksi sesuai tugas dan fungsi OPD masing-masing.





Gambar 32. TKPPOM di Kabupaten Maluku Tengah

13. Balai POM di Ambon bersama Kolaborator Siap Sukseskan Implementasi Inovasi Gebrak Stunting di Kota Ambon Tahun 2025

    Balai POM di Ambon adakan rapat koordinasi bersama kolaborator Inovasi Gebrak Stunting sebagai bagian dari upaya dalam pencegahan dan penurunan angka

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

stunting di Provinsi Maluku, bertempat di Aula Pattimura KanTOR Balai POM di Ambon, Kamis (02/10/2025). Kegiatan rapat koordinasi kolaborator ini dihadiri oleh para kolaborator seperti Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dinas Kesehatan Kota Ambon, Puskesmas Air Salobar, Akademisi (Universitas Pattimura, Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku, STIKes Prof, Dr. J.A Latumeten, dan STIKes Maluku Husada), Lembaga Swadaya Masyarakat / Filantropi (Human Initiative dan Dompet Dhuafa), dan Pihak Swasta (BNI KCU Ambon), Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Ambon dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kudamati PIK I dan II. Kehadiran para kolaborator tersebut merupakan komitmen dalam menyukseskan Implementasi Gebrak Stunting yang akan mengintervensi Kota Ambon Tahun 2025 (Kelurahan Kudamati dan Kelurahan Nusaniwe).



Gambar 33. Rapat bersama Kolaborator Inovasi Gebrak Stunting

14. Balai POM di Ambon Hadiri Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Ambon turut serta dalam kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap. Acara ini diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku dan berlangsung di halaman Kantor BNNP Maluku. Pemusnahan barang bukti tersebut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian (Plh.) Kepala BNNP Maluku, Stevy Frits Pattiasina yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah Maluku. Balai POM di Ambon diwakili oleh Ketua Tim Kerja Pemeriksaan, Claudia S. Songalin. Kehadiran Balai POM menunjukkan sinergi lintas lembaga dalam mengawal proses penegakan hukum dan memastikan barang bukti narkotika yang disita tidak lagi membahayakan masyarakat.



Gambar 34. Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

15. Peringatan Word Pharmacist Day

Dalam rangka peringatan *World Pharmacist Day*, BPOM di Ambon bekerja sama dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Maluku menyelenggarakan kegiatan *Car Free Day* (CFD) di depan Gong Perdamaian Kota Ambon, Minggu (11/10/2025) diisi dengan senam bersama dan juga serangkaian kegiatan menarik yang mengundang antusiasme masyarakat Kota Ambon. Bertajuk "*THINK HEALTH THINK PHARMACIST*: Tetap Sehat Bersama Apoteker", kegiatan diawali dengan Senam Zumba bersama langsung diikuti oleh Kepala BPOM di Ambon, Tamran Ismail beserta seluruh pegawai BPOM di Ambon dan Gubernur Maluku yg diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Maluku, Muhammad Malawat dan Ketua PD IAI Maluku, Hency Kotalewala serta anggota Ikatan Apoteker Indonesia Maluku serta beberapa lintas sektor terkait juga masyarakat termasuk Kader Kata BPOM on The Spot (KaBOS).



Gambar 35. Kegiatan *Car Free Day* (CFD) memperingati *World Pharmacist Day*

16. Bertempat di Gedung Merah Putih, Badan POM RI, Negeri Rutong Kembali naik panggung dengan menerima Penghargaan Juara 1 Lomba Desa Pangan Aman Tingkat Nasional. Penghargaan diberikan langsung oleh Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar kepada Raja Negeri Rutong, Reza Valdo Maspaitella di Jakarta (21/10/25).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hadir pula mendampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Ambon, Meggy Lekatompessy.



Gambar 36. Penerimaan penghargaan Negeri Rutong sebagai Juara 1 Desa Pangan Aman Tingkat Nasional

17. Perkuat Kualitas Pengujian di Wilayah Provinsi Maluku, BPOM Ambon Rangkul Lintas Sektor Gelar Workshop Estimasi Ketidakpastian Pengukuran.

    Balai POM di Ambon menyelenggarakan Workshop Estimasi Ketidakpastian Pengukuran untuk pengujian kimia dan mikrobiologi pada tanggal 10–11 November 2025. Kegiatan ini merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kompetensi teknis personil laboratorium agar mampu menerapkan prinsip ketidakpastian pengukuran sesuai standar ISO/IEC 17025:2017. Pelatihan ini diikuti oleh 37 peserta, yang terdiri dari personil Laboratorium BPOM Ambon serta perwakilan dari berbagai instansi jejaring laboratorium di Ambon dan wilayah Maluku yaitu LOKA POM kabupaten Kepulaun Tanimbar, Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Lab Kes Mas) Ambon, Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI), Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon, dan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).





Gambar 37. Workshop Estimasi Ketidakpastian Pengukuran

18. Monev Terpadu Program Prioritas Nasional GERMA SAPA 2025 : Pemerintah Daerah Kota Ambon Siap Pastikan Program Keamanan Pangan tetap Berlanjut.

    Balai POM di Ambon menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Terpadu tahun 2025 melalui tiga kegiatan utama, yaitu Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), serta Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) yang dibuka langsung oleh Walikota Ambon Bodewin Melkias Wattimena didampingi oleh kepala Balai POM di Ambon Tamran Ismail. Kegiatan digelar pada Rabu 26 November 2025 di Aula Vlissingen Kantor Walikota Ambon, yang dihadiri sejumlah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

35 orang peserta terdiri dari OPD terkait, Camat, Kepala Desa , Tim Keamanan Pangan Desa/Negeri, Kepala sekolah dan Kepala Pasar Waiheru.





Gambar 38. Monev Terpadu Program Prioritas Nasional GERMA SAPA 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.4.2 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1.4.2.1 INTERNAL

1.4.2.1.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah yang dimiliki Balai POM di Ambon untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sejumlah 68 (enam puluh delapan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan rincian 55 (lima puluh lima) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 (dua) CPNS dan 11 (sebelas) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, kemudian terdapat juga sejumlah 18 (delapan belas) orang Pegawai dengan menggunakan Pihak Ketiga (outsourcing). Untuk pegawai ASN, terhitung sebanyak 51 (Lima puluh satu) orang pegawai yang menjabat sebagai tenaga Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) dan sisanya menjabat sebagai fungsional tertentu non-pengawas farmasi makanan, fungsional umum atau pelaksana/tugas belajar dan struktural berjumlah sebanyak 14 (Empat belas) orang pegawai.

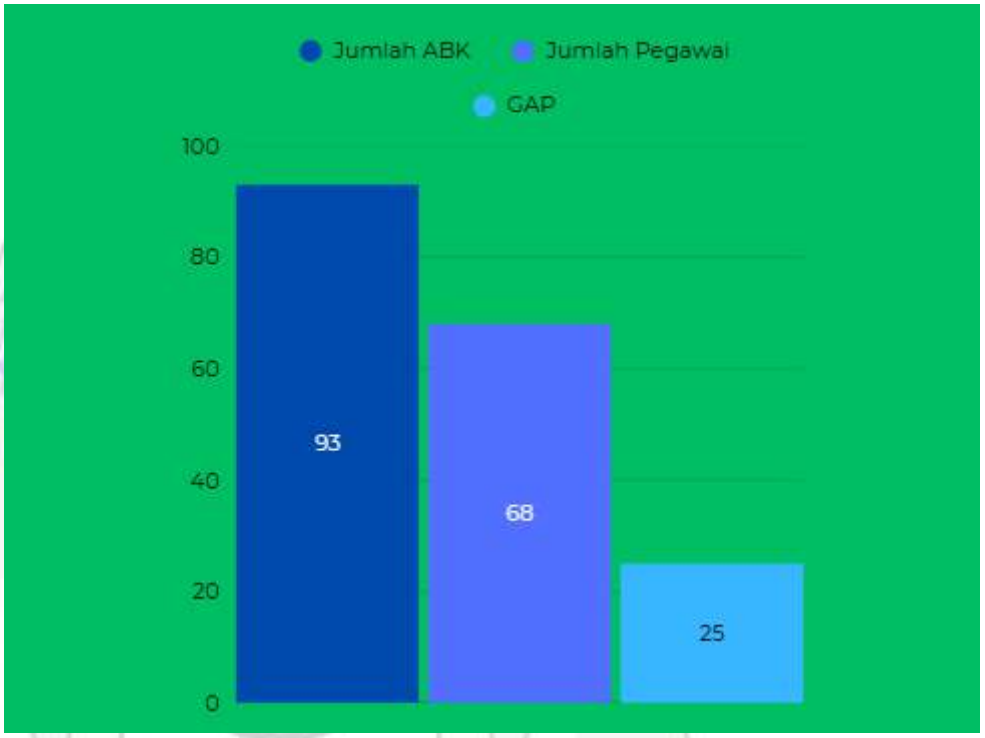
Tabel 2. Jumlah Pegawai Balai POM di Ambon

No	Kategori	Jumlah Pegawai
1	Pejabat Struktural	2
2	Fungsional PFM	51
3	Fungsional Tertentu lainnya	8
4	Fungsional Umum (Pelaksana)	7
6	Outsourcing	18
Total		86

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BPOM telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja. Berdasarkan Gambar 5 dapat diketahui bahwa untuk

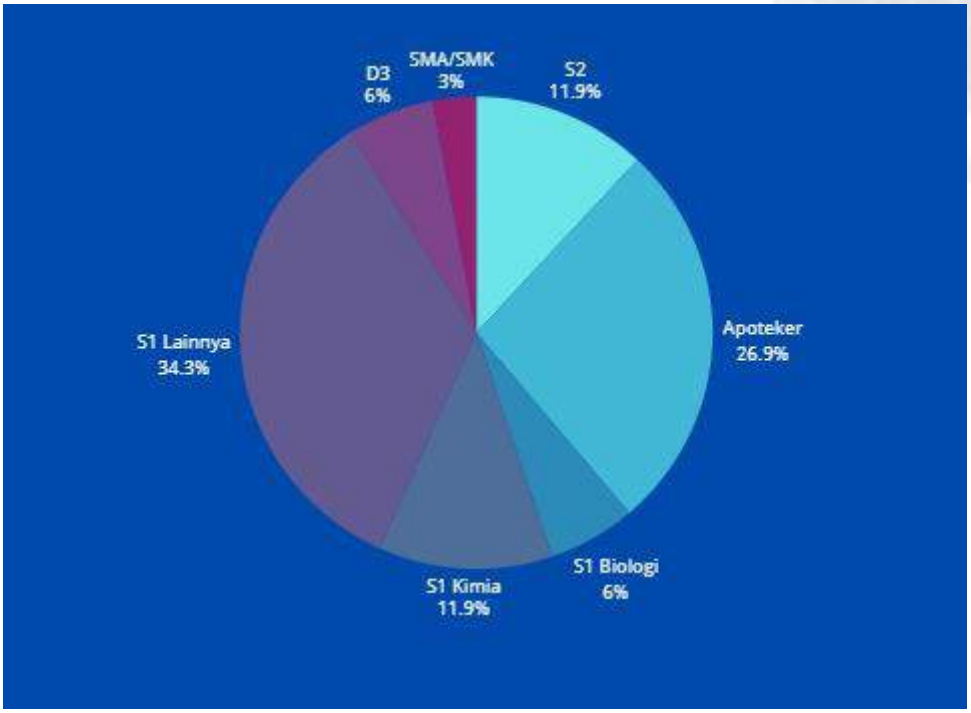
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi tersebut dibutuhkan pegawai sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang ASN, jumlah tersebut sudah sesuai dengan perhitungan Aplikasi SISRENSDM dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait Analisis Beban Kerja dan Pemenuhannya pada Periode Perencanaan 2026-2030 untuk data cut off tanggal 25 November 2025, sedangkan jumlah SDM yang tersedia sampai 31 Desember 2025 berjumlah 55 (lima puluh lima) orang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 (dua) orang sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 11 (delapan) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 18 (delapan belas) orang sebagai Outsorcing dari penyedia Pihak Ketiga. Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sekitar 25 (Dua puluh lima ASN) orang ASN (dengan rincian Jumlah ABK = 93; GAP = 25 ; Jumlah SDM Yang Direncanakan = 43) diluar tenaga PPNPN dan Pihak Ketiga, guna mendukung peningkatan pelayanan dan kinerja yang optimal dari Balai POM di Ambon dengan pemenuhan SDM sekitar 73.12%



Gambar 39. Gap Jumlah Pegawai Terhadap ABK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 40. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tingkat pendidikan pada Balai POM di Ambon

Diketahui bahwa komposisi pegawai negeri sipil Balai POM di Ambon telah mencakup beberapa background pendidikan, yang diharapkan semakin melengkapi fungsi masing-masing bagian, sehingga semua bisnis proses dapat berjalan dengan baik. Namun, dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Ambon harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Balai POM di Ambon juga memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk mengikuti Tugas Belajar maupun Izin Belajar. Tercatat sampai dengan bulan September Tahun 2025 sebanyak 6 (enam) orang pegawai yang melaksanakan tugas belajar bekerja dan 1 (satu) orang pegawai yang melaksanakan tugas belajar lepas jabatan.

Balai POM di Ambon harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (succession planning), perencanaan karir (career planning) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (individual development planning) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.4.2.1.2 Sumber Daya Lainnya

Luas lahan Balai POM di Ambon seluas 4.450 m^2 dengan luas lantai Bangunan sebesar 3.172 m^2 dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan *meubelair* kerja masih terpenuhi. Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Ambon. Laboratorium Balai POM di Ambon harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan obat dan makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium di Balai POM di Ambon telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

Selain itu, Balai POM di Ambon dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu berdasarkan Standar ISO 17025:2017 dan telah tersertifikasi untuk seluruh bisnis prosesnya.

Balai POM di Ambon telah tersertifikasi ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sejak tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.4.2.1.3 Anggaran

Anggaran Kegiatan Balai POM di Ambon yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Tahun 2025 sebesar Rp26.128.121.000 (Dua puluh enam milyar seratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu rupiah). Untuk Realisasi Anggaran sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp17.816.674.364 (Tujuh belas miliar delapan ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) atau sebesar 96,68%. Pagu awal sebesar Rp26.128.121.000 (Dua puluh enam miliar seratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) setelah revisi terakhir menjadi Rp17.878.733.000 (Tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga pagu anggaran terlihat sebagai berikut ini:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3. Revisi Anggaran DIPA Tahun 2025

No	Alasan Revisi	Surat Penetapan Revisi DIPA	Tanggal	Pagu Awal
0	Pagu Awal	9185 1803 3242 5540	29-Nov-24	26.935.263.000,00
1	Penyesuaian Halaman III DIPA	9185 1803 3242 5540	30-Jan-25	26.935.263.000,00
2	Penyesuaian Halaman III DIPA	9185 1803 3242 5540	12-Feb-25	26.935.263.000,00
3	Penyesuaian Halaman III DIPA	9185 1803 3242 5540	18-Feb-25	26.935.263.000,00
4	Penyesuaian Halaman III DIPA	2097 5057 4861 4407	22-Feb-25	26.935.263.000,00
5	Penyesuaian Halaman III DIPA	9731 7272 2017 8620	21-Mar-25	26.128.121.000,00
6	Penyesuaian Halaman III DIPA	0043 3021 0020 0262	10-Apr-25	26.128.121.000,00
7	Penyesuaian Halaman III DIPA	0043 3021 0020 0262	21-Apr-25	26.128.121.000,00
8	Penyesuaian Halaman III DIPA	0043 3021 0020 0262	23-Apr-25	26.128.121.000,00
9	Penyesuaian Halaman III DIPA	0043 3021 0020 0262	15-May-25	26.128.121.000,00
10	Penyesuaian Halaman III DIPA	0043 3021 0020 0262	10-Jun-25	26.128.121.000,00
11	Penyesuaian Halaman III DIPA	0043 3021 0020 0262	01-Jul-25	26.128.121.000,00
12	Penyesuaian Halaman III DIPA	6348 2733 0943 9013	07-Jul-25	25.220.587.000,00
13	Penyesuaian Halaman III DIPA	6348 2733 0943 9013	16-Jul-25	25.220.587.000,00
14	Penyesuaian Halaman III DIPA	6348 2733 0943 9013	23-Jul-25	25.220.587.000,00
15	Penyesuaian Halaman III DIPA	7534 0500 2568 7322	01-Aug-25	25.220.587.000,00
16	Penyesuaian Halaman III DIPA	7534 0500 2568 7322	10-Oct-25	25.220.587.000,00
17	Penyesuaian Halaman III DIPA	7534 0500 2568 7322	14-Oct-25	25.220.587.000,00
18	Penyesuaian Halaman III DIPA	7534 0500 2568 7322	24-Oct-25	25.220.587.000,00
19	Penyesuaian Halaman III DIPA	2734 6700 7758 1588	03-Nov-25	25.371.205.000,00
20	Penyesuaian Halaman III DIPA	2734 6700 7758 1588	05-Nov-25	25.371.205.000,00
21	Penyesuaian Halaman III DIPA	3039 0481 4119 4508	11-Nov-25	25.371.205.000,00
22	Penyesuaian Halaman III DIPA	3039 0481 4119 4508	17-Nov-25	25.371.205.000,00
23	Penyesuaian Halaman III DIPA	3039 0481 4119 4508	01-Dec-25	25.371.205.000,00
24	Penyesuaian Halaman III DIPA	3039 0481 4119 4508	11-Dec-25	25.371.205.000,00
25	Penyesuaian Halaman III DIPA	3039 0481 4119 4508	18-Dec-25	25.371.205.000,00
26	Penyesuaian Halaman III DIPA	3039 0481 4119 4508	23-Dec-25	25.371.205.000,00
27	Penyesuaian Halaman III DIPA	3039 0481 4119 4508	30-Dec-25	25.371.205.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Revisi anggaran sebanyak 27 kali sesuai kebutuhan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Maluku

1.4.2.2 EKSTERNAL

1.4.2.2.1 Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan kepentingan gender dalam kebijakan dan program pembangunan guna menciptakan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki. Kesalahpahaman umum di masyarakat sering menyamakan gender dengan jenis kelamin atau menganggapnya hanya terkait dengan perempuan. Padahal, isu gender mencakup ketimpangan yang berdampak pada akses, hak, peran, dan kesempatan bagi kedua belah pihak. Untuk mengatasi ketimpangan ini, PUG menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan akuntabel. Strategi ini telah dicanangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 yang mewajibkan setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mengimplementasikan PUG sesuai dengan tugas dan kewenangannya.Sebagai upaya percepatan implementasi, pada tahun 2012 ditetapkan Strategi Nasional (STRANAS) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). BPOM turut berkomitmen dalam pengarusutamaan gender dengan menerbitkan berbagai regulasi, termasuk Keputusan Kepala BPOM tahun 2013 dan 2014 tentang pedoman serta pembentukan Kelompok Kerja PUG. Kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga diperkuat melalui kesepakatan bersama pada 2015. Pada 2022, BPOM menegaskan komitmen ini dalam arah kebijakan tahun 2023 yang menekankan keadilan dan kesetaraan gender dalam pengawasan obat dan makanan, sehingga PUG menjadi bagian integral dalam memastikan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.

BPOM Ambon berkomitmen mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai aspek kegiatan dan pelayanan. Setiap kegiatan mencantumkan data jenis kelamin dan usia dalam daftar hadir untuk memastikan keterwakilan yang inklusif. Selain itu, fasilitas bagi kelompok rentan telah disediakan guna mendukung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

akses yang setara bagi seluruh peserta. Dalam komunikasi resmi, prinsip PUG juga diterapkan dengan mencantumkan aspek kesetaraan gender dalam surat-menyurat. Dukungan terhadap PUG semakin diperkuat melalui tagging anggaran pada rincian output tertentu untuk memastikan kebijakan ini berjalan secara terarah. Setiap bahan paparan dan spanduk kegiatan BPOM Ambon juga telah dilengkapi dengan logo PUG 'Setara Berdaya' sebagai simbol komitmen terhadap kesetaraan dan pemberdayaan gender. Dengan langkah-langkah ini, BPOM Ambon terus berupaya menciptakan lingkungan kerja dan layanan yang adil serta responsif terhadap kebutuhan semua.

1.4.2.2.2 Stunting di Prov Maluku

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, kurangnya stimulasi psikososial, serta paparan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih rendah dibandingkan standar usianya. Selain berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal, stunting juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan, menghambat perkembangan kecerdasan, dan mempengaruhi potensi produktivitas di masa depan. Dari sisi ekonomi, stunting berpotensi menyebabkan kerugian sebesar 2-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Percepatan penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dengan target nasional prevalensi stunting turun menjadi 14% pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, Prevalensi stunting di Provinsi Maluku naik 2,3% dari Tahun 2022 yaitu 26,1% menjadi 28,4%. Terdapat 7 dari 11 Kabupaten/kota di Maluku mengalami kenaikan signifikan, yakni Kabupaten Kepulauan Aru naik dari 28,1% menjadi 40,6 %. Maluku Tenggara naik dari 26,8% menjadi 34 %. Kota Tual naik dari 24,9% menjadi 32%. Kabupaten Seram Bagian Barat naik menjadi 31,4% dari 27,5 %. Maluku Barat Daya naik dari 25,7% menjadi 29,9%. Kabupaten Maluku Tengah juga alami kenaikan signifikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yakni dari 27% naik menjadi 29,4%. Dan Kabupaten Seram Bagian Timur naik menjadi 27,5 % dari 24,1%. Sementara 4 Kabupaten/Kota lain, mengalami penurunan yakni, Kepulauan Tanimbar dari 31,5% menjadi 25,1%. Kabupaten Buru dari 23,3% menjadi 20,3%. Buru Selatan turun dari 41,6% menjadi 35,5% dan an Kota Ambon turun dari 21,1% menjadi 20,7%.

Badan POM menjadi salah satu institusi pemerintah yang diamanatkan oleh Perpres 72 2021 melakukan intervensi sensitif, maka Balai POM di Ambon berinisasi mengembangkan inovasi GEBRAK STUNTING (Gerakan bersama Kurangi Stunting). Untuk keberhasilan Inovasi ini, maka diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga program percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku dapat direalisasikan baik melalui intervensi sensitif maupun spesifik. Dalam melaksanakan Inovasi Gebrak Stunting ini, Balai POM di Ambon mengadeng Organisasi Perangkat Daerah, Kementrian/Lembaga, Oragnisasi Profesi, Organisasi Kemanusiaan, dan Akademisi. Total ada 13 kolaborator yang berkomitmen bekerja sama dalam menyukseskan kegiatan ini.

Gambar 41. Inovasi Gebrak Stunting BPOM Ambon

1.4.2.2.3 Resistensi Antimikroba

Resistensi antimikroba (AMR) adalah kondisi di mana mikroorganisme, seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit, tidak lagi merespons pengobatan dengan obat-obatan antimikroba yang sebelumnya efektif. Ini berarti kuman-kuman tersebut menjadi kebal terhadap obat tersebut, sehingga infeksi yang disebabkan oleh mereka menjadi lebih sulit diobati, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, dan dapat meningkatkan keparahan penyakit atau bahkan kematian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Badan POM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) memiliki peran penting dalam pengendalian resistensi antimikroba di Indonesia melalui pengawasan peredaran dan penggunaan antimikroba, pemantauan dan evaluasi registrasi obat, penguatan kebijakan melalui pedoman, dan edukasi masyarakat. Badan POM juga aktif dalam gugus tugas pengendalian resistensi antimikroba dan melakukan kajian serta surveilans terkait antimikroba.

Resistensi antimikroba (AMR) di Prov Maluku sendiri adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian serius, terutama karena penggunaan antibiotik yang berlebihan dan tidak tepat. BPOM Ambon hadir untuk berupaya memperkuat sinergi penta helix untuk mengatasi AMR, termasuk pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media. Pencegahan AMR dapat dilakukan dengan strategi ABC + 4T, yang mencakup pemahaman tentang AMR, bahayanya, cara mikroba menjadi resisten, serta pentingnya penggunaan antimikroba sesuai resep dokter dan tidak menghentikannya sebelum selesai. Pada Tahun 2024, Kota Ambon mendapatkan predikat sebagai Kota dengan penanganan dan kepatuhan terhadap pencegahan resistensi antimikroba. Hal ini menjadi trigger bagi kab/kota lainnya di Provinsi Maluku untuk melakukan hal serupa sehingga dapat dikatakan bahwa edukasi dan pengawasan BPOM di Ambon dalam pengendalian resistensi antimikroba cukup berhasil



Gambar 42. Sosialisasi pencegahan AMR melalui media sosial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.4.2.2.4 Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki luas keseluruhan 712.479,69 km^2, yang terdiri terdiri dari luas lautan 658.294,69 km^2 dan luas daratan 54.185 km^2, dengan kata lain 90% wilayah provinsi Maluku adalah lautan.



Gambar 43. Peta Provinsi Maluku

Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten/kota yakni 2 (dua) kota dan 9 (sembilan) kabupaten dengan jumlah penduduk 1.831.880 jiwa menurut proyeksi tahun 2020. Wilayah Kerja Balai POM di Ambon meliputi 9 kabupaten/kota:

- Kota Ambon
- Kota Tual
- Kabupaten Maluku Tengah
- Kabupaten Seram Bagian Barat
- Kabupaten Seram Bagian Timur
- Kabupaten Buru
- Kabupaten Buru Selatan
- Kabupaten. Maluku Tenggara
- Kabupaten Kepulauan Aru

Sedangkan untuk 2 Kabupaten lainnya yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, pengawasan dilakukan oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar. Pola transportasi yang digunakan ke semua kota/kabupaten di Provinsi Maluku adalah melalui transportasi darat, laut, dan udara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.4.2.2.5 Sarana yang diawasi

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan, pada tahun 2025 sarana produksi dan distribusi yang diawasi sejumlah 45 sarana dengan rincian sarana produksi OMKA sebanyak 3, sarana distribusi OMKA termasuk sarana pelayanan kefarmasian sebanyak 42 sarana.

1.4.3 Pembahasan Isu Strategis Balai POM di Ambon

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai POM di Ambon baik internal maupun eksternal, antara lain:

1.4.3.1 Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Badan POM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan Badan POM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan obat dan makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

1.4.3.2 Sumber Daya Manusia

Diketahui bahwa komposisi pegawai negeri sipil Balai POM di Ambon telah mencakup beberapa background pendidikan, yang diharapkan semakin melengkapi fungsi masing-masing bagian, sehingga semua bisnis proses dapat berjalan dengan baik. Namun, dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Ambon harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Balai POM di Ambon juga memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk mengikuti Tugas Belajar maupun Izin Belajar. Tercatat sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 sebanyak 6 (enam) orang pegawai yang melaksanakan tugas belajar bekerja dan 1 (satu) orang pegawai yang melaksanakan tugas belajar lepas jabatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Balai POM di Ambon harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (succession planning), perencanaan karir (career planning) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (individual development planning) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.4.3.3 Infrastruktur dan Fasilitas

Pembangunan Infrastruktur sangat penting untuk menghadapi persaingan di masa mendatang. Infrastruktur bukan hanya bangunan fisik, tetapi meliputi juga jaringan komunikasi, informasi, etika kerja, dan lain-lain. Dalam bentuk bangunan fisik, pembangunan tempat pelayanan publik sangatlah penting karena akan menciptakan kenyamanan bagi publik dalam memperoleh pelayanan, dan kepuasaan dari pelayanan publik dapat tercapai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Balai POM di Ambon telah memiliki gedung layanan publik yang memadai, di mana dilakukan pelayanan secara terpadu sesuai dengan standar pelayanan yang telah dimaklumatkan oleh Balai POM di ambon. Tidak hanya dari segi bangunan, tapi kompetensi petugas layanan public juga terus dikembangkan lewat berbagai pelatihan terpusat dan pelatihan mandiri.

Balai POM di Ambon telah meningkatkan kualitas layanan publik dengan melakukan pembenahan ruang pelayanan publik. Pembenahan ini berpedoman dengan prinsip layanan publik yang transparan dan nyaman termasuk bagi konsumen penyandang disabilitas. Predikat “Pelayanan Prima” yang telah disandang oleh Balai POM di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ambon menjadi sebuah standar kualitas pelayanan yang terus memicu untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kenyamanan dan kepuasan masyarakat yang menggunakan layanan Balai POM di Ambon senantiasa menjadi prioritas utama. Fasilitas layanan untuk disabilitas juga telah memadai.

Fasilitas yang tersedia di gedung layanan publik sudah sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM RI nomor 28 tahun 2022.

Standar Pelayanan Publik BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) adalah pedoman yang digunakan BPOM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu perorangan maupun pelaku usaha, terkait registrasi, perizinan, dan pengawasan obat dan makanan. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya, hingga penanganan pengaduan.Tujuannya adalah untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.

Komponen Standar Pelayanan Publik Balai POM di Ambon adalah sebagai berikut:

- Persyaratan: Dokumen dan kriteria yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan layanan.
- Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: Rangkaian langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses pelayanan.
- Jangka Waktu Pelayanan: Batas waktu yang ditetapkan untuk setiap tahapan pelayanan.
- Biaya/Tarif: Biaya yang dikenakan untuk setiap jenis pelayanan.
- Produk Pelayanan: Hasil akhir dari proses pelayanan, misalnya izin edar, sertifikat, dll.
- Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan: Mekanisme untuk menanggapi keluhan dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan.

BPOM secara berkala melakukan evaluasi dan perbaikan standar pelayanan untuk memastikan bahwa standar tersebut selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. BPOM juga melibatkan berbagai pihak, seperti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pelaku usaha, instansi terkait, akademisi, dan organisasi masyarakat, dalam proses penyusunan dan perbaikan standar pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik



Gambar 44. Ruang Pelayanan Terpadu Balai POM Ambon



Alat Bantu disabilitas



Guiding Block menuju loket



Guiding Block menuju toilet

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Wheelchair



Parkiran khusus disabilitas



Alat bantu dengar & Buku Braille



Loket Layanan Prioritas





Toilet Disabilitas

Gambar 45. Fasilitas Disabilitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Ruang Tunggu



Layanan oleh Security



Tempat pemyimpanan helm dan jaket



Bahan Bacaan



Charging station dan welcome drink

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Informasi Layar Sentuh



Mesin Antrian



Parkiran khusus tamu



Tempat bermain anak



Ruang Laktasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Kulkas penyimpanan ASI



Ruang Pengaduan



TV untuk edukasi

Gambar 46. Fasilitasi pelayanan publik Balai POM di Ambon

Selain penyelenggaraan *Good Governance*, Balai POM di Ambon juga selalu mengutamakan aspek Pelayanan Prima (*Service Excellent*) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Balai POM di Ambon harus mampu menjawab ekspektasi dan kepercayaan masyarakat Maluku yang begitu besar terhadap kehadiran Balai POM di Ambon untuk menjamin keamanan produk obat dan makanan yang beredar di Maluku.

1.4.3.3 Penguatan pengawasan obat dan makanan

Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan TA. 2025 Pada BPOM di Ambon antara lain melalui penguatan Intensifikasi Pengawasan Pangan (Inwas) Inovasi Mobil Terosa yang dilaksanakan di beberapa kabupaten dan kota. Melalui inovasi ini diberikan 4 layanan yakni layanan informasi dan pengaduan; layanan pemantauan; layanan sertifikasi; dan layanan pengujian sederhana menggunakan rapid tes kit. Pada tahun 2025 capaian layanan mobil terosa sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Layanan Informasi dan Pengaduan : 132 layanan
- Layanan Pemantauan :105 sarana
- Layanan Pengujian : 321 sampel
- Layanan Sertifikasi : 2 Nomor ijin edar diterbitkan

Layanan Inovasi Mobil Terosa ini bukan hanya mencakup lingkup Kota Ambon, tetapi juga di Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan edukasi keamanan obat dan makanan.

1.4.3.4 Dukungan program kesehatan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

MBG paling umum dikenal sebagai singkatan dari Makan Bergizi Gratis, sebuah program yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada Januari 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama anak usia sekolah, serta balita dan ibu hamil atau menyusui. Program MBG sendiri secara resmi dilaksanakan sejak tanggal 6 Januari 2025 hingga sekarang dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan gizi pada anak sekolah, menurunkan angka stunting, dan meningkatkan mutu pendidikan dasar. Selain itu melalui program ini diharapkan juga dapat berkontribusi dalam meringankan beban ekonomi bagi keluarga dan memberdayakan pengusaha lokal. Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) berperan penting dalam mendukung program ini melalui pengawasan mutu dan keamanan pangan, seperti pelatihan, sampling, pengujian produk, dan pengawasan rantai pasok. Pada Tahun 2025 Berbagai kegiatan dilaksanakan oleh Balai POM di Ambon dalam menunjang keberhasilan program MBG di wilayah Maluku, diantaranya:

1. BPOM Ambon Menjadi Instruktur Untuk 469 Orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Maluku

   Bertempat di Kolat XIV Rindam XV Pattimura, dilaksanakan Kuliah Keamanan Pangan bagi 469 orang SPPI yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia Timur. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari yakni pada hari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Jumat (27/06/25) dan Senin (30/06/25). BPOM Ambon menjadi instruktur dalam kuliah tersebut dengan menerjunkan 21 orang instruktur yang telah kompeten di bidang edukasi keamanan pangan. Peserta ini dibagi ke dalam 5 kelas dan mendapatkan materi berbeda setiap harinya. Selama kuliah 2 hari, peserta diberikan materi sebanyak 4 materi yakni Materi Pengawasan Pangan dan. Penanganan Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan, Materi *Hazard Analysis and Critical Control Points*, Materi Traceability, dan Materi Nilai Gizi Pangan. Materi ini merupakan bekal penting bagi SPPI nantinya saat menjadi koordinator di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tempat pengolahan makanan bergizi sebelum disalurkan ke penerima makanan.



Gambar 47. Kuliah Keamanan Pangan bagi 469 orang SPPI

2. Balai POM di Ambon Berikan Bimtek Food Safety Kepada SPPI

   Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon berikan bimbingan teknis kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Provinsi Maluku mengenai food safety atau keamanan pangan secara daring, Sabtu (09/08/2025). dalam pelaksanaan kegiatan program ini masih dijumpai beberapa permasalahan seperti terdepat banyak kasus pemberitaan kejadian luar biasa keracunan makanan (KLB-KP) dan kontaminasi cemaran, khususnya cemaran biologi pada paket MBG yang dikonsumsi oleh siswa di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

berbagai daerah, termasuk Provinsi Maluku. Dalam mengatasi masalah tersebut Balai POM Ambon berikan bimtek food safety kepada SPPI. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan Balai POM di Ambon dalam meningkatkan pengetahuan SPPI dan sekaligus sebagai antisipasi meminimalkan terjadinya kasus yang tidak diinginkan seperti KLB-KP dan/atau adanya kontaminasi cemaran (fisik/kimia/biologi) pada paket MBG.



Gambar 48. Bimtek Food Safety Kepada SPPI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Antisipasi Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) MBG, Balai POM di Ambon Edukasi Siswa di Sekolah Dasar

   Balai POM di Ambon memberikan KIE dan melakukan pengujian MBG yang di konsumsi oleh siswa SDN 3 Hative Besar pada Selasa 19 Agustus 2025. Pemberian KIE diawali dengan sambutan dari Kepala Sekolah SD N 3 Hative Besar, Sarah Manusama, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Balai POM di Ambon sangat peduli terhadap kesehatan siswa SD N 3 Hative Besar dalam kaitannya menerima MBG di sekolah, Kegiatan ini merupakan implementasi dari kolaborasi inovasi dari Balai POM di Ambon " Pala (pantau dan kawal) voor MBG dan program Eka Germas MBG (Edukasi Generasi Emas Cerdas Konsumsi Makan Bergizi Gratis) dari Dinas Pendidikan Kota Ambon.



Gambar 49. KIE MBG

4. BPOM di Ambon bersama Pemerintah Provinsi Maluku Lakukan Rapat evaluasi terhadap kemajuan dan kemanfaatan Pelaksanaan Program MBG

   Balai POM di Ambon menghadiri rapat Rapat evaluasi terhadap kemajuan dan kemanfaatan pelaksanaan program MBG yang diadakan oleh Pemprov Maluku pada tanggal 25 September 2025 di Ruang Rapat Lt. 2 Kantor Gubernur Maluku dengan melibatkan berbagai pihak terkait antar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

lembaga/institusi pemerintah di Maluku, diantaranya BINDA, Kodam Pattimura, Polda Maluku, BPOM di Ambon dan OPD 11 Kab/Kota melalui zoom. Rapat bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program MBG dan Kemajuan serta kendala yang dihadapi di Provinsi Maluku.

Pemerintah Provinsi Maluku mengadakan rapat koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan program MBG secara menyeluruh terkait adanya sejumlah insiden keracunan yang dialami para siswa setelah menyantap MBG yang disediakan oleh mitra pengelola dapur bergizi. Evaluasi mencakup pengawasan terhadap pengelola dapur, kualitas dan keamanan makanan, serta transparansi dan akuntabilitas program nasional MBG. Setiap instansi terkait menyampaikan evaluasi program dan kendala yang telah dilaksanakan dalam program MBG di wilayahnya.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 50. Rapat evaluasi Balai POM Ambon dengan Pemerintah Prov. Maluku

5. Balai POM di Ambon Edukasi Petugas Penjamah Pangan Dapur SPPG Se-Provinsi Maluku

   Dalam rangka mendukung Program Unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Ambon memberikan edukasi kepada para petugas penjamah pangan pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Se-Provinsi Maluku terkait pentingnya keamanan pangan dan kebijakan keamanan pangan siap saji bertempat di Aula The Natsepa Hotel and Resort (Luring) dan melalui zoom meeting (Daring), Minggu (28/09/2025).

   Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ini bertujuan untuk membekali para petugas dapur dengan pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan pangan yang higienis, aman, dan sesuai standar nasional. Kegiatan tersebut dihadiri oleh narasumber dari berbagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota di Provinsi Maluku. Selain itu kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Kepala Balai POM di Ambon,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tamran Ismail, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, dan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Se-Provinsi Maluku, dr. Rosita.





Gambar 51. Edukasi Petugas Penjamah Pangan Dapur SPPG Se-Provinsi Maluku

1.4.3.5 Kerjasama dalam hal Pengawasan

Sebagai tindak lanjut dari rencana aksi yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Balai POM di Ambon dan beberapa kampus di wilayah Provinsi Maluku, dilaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka memberikan pemahaman kepada civitas akademika mengenai keamanan obat dan makanan. Dalam periode tahun 2025, dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Kader KaBoS STIKes Prof. Dr. J.A. Latumeten Ajak 142 Mahasiswa Baru Kenali Produk Obat dan Pangan Olahan yang Aman



Gambar 52. Edukasi oleh Kader KaBoS STIKes Prof. Dr. J.A. Latumeten

2. Balai POM di Ambon Laksanakan KIE Keamanan Pangan MBG dan Stunting di SMPN 45 Buru Bersama SAKA POM



Gambar 53. KIE Keamanan Pangan MBG dan Stunting di SMPN 45 Buru Bersama SAKA POM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Balai POM di Ambon Bersama Poltekkes Kemenkes Maluku Edukasi Mahasiswa Baru, Kenali Peran SAKA POM dalam Pengenalan Obat dan Makanan Aman



Gambar 54. Kolaborasi Balai POM di Ambon bersama Poltekkes Kemenkes Maluku

1.4.3.6 Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri obat dan makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution* 4.0 Dalam salah satu studinya, the *World Economic Forum* (EF) menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 ditandai oleh pembauran (*fusion*) teknologi yang mampu menghapus batas-batas penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital maupun biologi.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Total populasi rakyat Indonesia diperkirakan sebesar 265 juta jiwa, dimana sebanyak 130 juta orang (49%) merupakan pengguna aktif media sosial pada bermacam *platform*.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dampak *e-commerce* menawarkan berbagai kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan makanan yang dijajakan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tak acuh pada aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan, misalnya ketersediaan tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyaluran obat. Untuk menghadapi perubahan gaya hidup masyarakat, menanggapi perkembangan teknologi yang bisa mengancam keamanan obat dan pangan aman.

Balai POM di Ambon mengadakan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). BPOM di Ambon memastikan semua pegawai memahami pentingnya keamanan informasi dan tanggung jawab mereka terkait keamanan informasi.

1.4.3.7 Pertumbuhan UMKM Obat dan Makanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan/pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM yang ada sebanyak 57.895.721 dari jumlah total industri 57.900.787 atau sebanyak 99,99%.

Sasaran pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam RPJPN 2005-2025 (Undang-undang Nomor 17 tahun 2007) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kesenjangan. Dalam mencapai sasaran ini

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

telah teridentifikasi kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang berperan yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Badan Standarisasi Nasional, Badan Ekonomi kreatif, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Badan POM telah menginisiasi dan menandatangani *MoU* dan PKS dengan beberapa K/L dan Ormas, perlu ditindaklanjuti dengan rencana aksi program/kegiatan yang menyasar pada UMKM. Balai POM di Ambon sepanjang Tahun 2025 telah melakukan kegiatan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM, yaitu dengan adanya inovasi Pesta Kenari Pro UMKM (Pendampingan Percepatan Sertifikasi dan Registrasi).

1.4.3.8 Keadaan Wilayah Geografis Provinsi Maluku

Provinsi Maluku merupakan salah satu dari beberapa provinsi yang wilayahnya 90% adalah lautan. Maluku merupakan provinsi kepulauan dimana hampir semua wilayahnya terbagi dari beberapa pulau. Maluku sendiri terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota.

Wilayah yang cukup luas dengan keadaan topografinya yang mempunyai bermacam-macam medan, menjadikan pengawasan terhadap obat dan makanan sangat penting, karena dengan keadaan geografis seperti ini, akan menjadi resiko terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang berlaku yang berhubungan dengan obat dan makanan.

1.4.3.9 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sebagai upaya untuk implementasi instruksi Presiden nomor 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, Badan POM telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus non fisik bantuan operasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kesehatan pengawasan obat dan makanan tahun anggaran 2025 pada 9 (Sembilan) Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku melalui Dinas Kesehatan untuk membiayai kegiatan operasional pengawas obat dan makanan yang menjadi urusan daerah. Balai POM di Ambon berkomitmen mendukung pelaksanaan program DAK NF POM melalui :

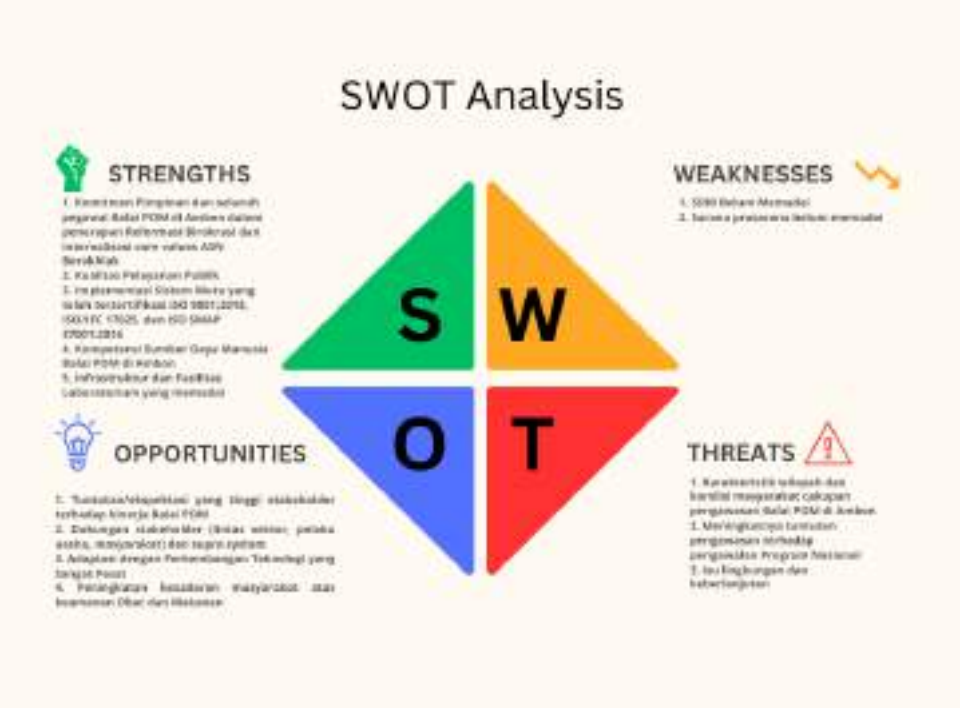
A. Memberikan pendampingan dan pengawalan implementasi kegiatan DAK NF POM oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota
B. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian produk pangan
C. Memberikan konsultasi pelaksanaan pengawasan sarana UMOT, dan sarana IRTP Pre dan Post Market
D. Mendukung pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan KIE keamanan pangan
E. Monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan dan tim pelaksana

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi BPOM digunakan analisa SWOT dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM periode 2025-2029. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Balai POM di Ambon.

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Gambar 55. berikut :



Gambar 55. Analisis SWOT Balai POM di Ambon

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, BPOM melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2025-2029.

Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan BPOM, karena dari sisi faktor internal, BPOM memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut :

2. Pengembangan SDM yang profesional, berintegritas tinggi, kredibel, mau bekerja sama, inovatif dan responsif untuk menjaga kepercayaan publik
3. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait agar tercipta komitmen dan sinergitas pengawasan *full spectrum*
4. Optimalisasi penggunaan fasilitas dan kemajuan teknologi untuk mengatasi permasalahan wilayah geografis Maluku yang susah dijangkau untuk pemerataan pengawasan
5. Optimalisasi kemajuan teknologi untuk pelayanan publik
6. Optimalisasi pendampingan pada UMKM dalam meningkatkan daya saing produk
7. Modifikasi sistem pengawasan obat dan makanan dalam memasuki masa New Normal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



BAB II
PERENCANAAN KINERJA







BADAN POM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

VISI DAN MISI BADAN POM

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2025 - 2029, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2025 - 2029 yaitu:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan Sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman**: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu**: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing**: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat**: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Dalam mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 yang menjadi pedoman Balai POM di Ambon adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan Masyarakat;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, selaras dengan tujuan BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan Balai POM di Ambon dalam kurun waktu 2025 - 2029 adalah:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM**: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima**: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasit as organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

SASARAN KEGIATAN BALAI POM DI AMBON

Secara rinci, perubahan Strategi Balai POM di Ambon Tahun 2025-2029 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4. Sasaran Kegiatan Balai POM di Ambon 2025-2029

Strategi
1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja
2. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja
3. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
4. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja
5. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja
6. Layanan Publik BPOM AMBON yang prima
7. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025

Dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Balai POM di Ambon Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Ambon tentang Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Ambon Tahun 2025. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Balai POM di Ambon No. HK.02.02.7B.10.24.200 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Balai POM di Ambon Tahun 2025

Tabel 5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Tahunan	TW IV
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,50	89,50
		Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	26,00
		Persentase sample pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai kebutuhan	91,00	91,00
		Persentase sample KLB keracunan pangan yang di uji sesuai standar oleh UPT	100,00	100,00
		Persentase sample PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	91,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi	85,00	85,00
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang di periksa	91,00	91,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00
		Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,00	94,00
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,00	89,00
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,06	93,06
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman	11,11	11,11
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00	91,00
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon	100,00	100,00
		Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan BPOM Ambon Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,90	73,90
2	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi di	Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	87,93	87,93

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	masing–masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10
		Jumlah desa pangan aman	3	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	17,57	17,57
4	Terlaksananya Penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	75,00	75,00
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	90,00
6	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,65	4,65
7	Terwujudnya tata Kelola pemerintan unit organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	86	86
		Nilai AKIP UPT BPOM	79,5	79,5
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	89,85	89,85
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,05	3,05

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 6. Direktif Penugasan Kepala UPT Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Tahunan	TW IV
1	Direktif Penugasan	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri	87,00	87,00
		Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan	97,00	97,00
		Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	95,00	95,00
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	95,17	95,17
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00	95,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,25	97,25

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai POM di Ambon sebagai unit kerja Eselon IV wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Ambon) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Balai POM di Ambon Tahun 2025 telah ditetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja pada tanggal 12 Februari 2025 Dan perubahan Perjanjian Kinerja tanggal 29 Agustus 2025 yang disesuaikan dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

anggaran yang tersedia sebesar Rp25,220,587,000,- (*Dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh rupiah*). Balai POM di Ambon berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon Tahun 2025

	Sasaran Strategis		Indikator	Target
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,50
		2	Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00
		3	Persentase sample pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai kebutuhan	91,00
		4	Persentase sample KLB keracunan pangan yang di uji sesuai standar oleh UPT	100,00
		5	Persentase sample PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00
		6	Persentase keputusan/rekomendasi	85,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			hasil pengawasan sediaan farmasi	
		7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00
		8	Persentase sarana produksi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00
		9	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,00
		10	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,00
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,06
		12	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman	11,11
		13	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00
		14	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon	100,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		15	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan BPOM Ambon Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,90
2	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi di masing–masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	87,93
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10
		3	Jumlah desa pangan aman	3
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	17,57
4	Terlaksananya Penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	75,00
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00
6	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,65

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7	Terwujudnya tata Kelola pemerintan unit organisasi yang optimal	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	86,00
		2	Nilai AKIP UPT BPOM	79,50
		3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00
		4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,05
	Kegiatan :			
	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			Rp 16.918.603.000
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM			Rp 8.301.984.000
	Total			Rp 25.220.587.000

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Ambon selalu dimonitoring setiap Tahun untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap Tahun berikutnya

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2025

Dalam rangka pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Balai POM di Ambon Tahun 2025, maka dibuat Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Ambon Tahun 2025 yang memuat target capaian secara Tahun yang disertai dengan jumlah anggaran yang tersedia. Berikut Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Ambon Tahun 2025 :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	89	0	85	85	85	85	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	612.459.000
		Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	41.000.000
		Persentase sample pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai kebutuhan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	96.020.800
		Persentase sample KLB keracunan pangan yang di uji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	127.423.800
		Persentase sample PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	127.423.800
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	84.950.800

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	91	91	91	91	91	16.995.600
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	16.995.600
		Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	416.139.500
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang di periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	89	89	89	89	89	367.094.000
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,66	88,66	88,66	88,66	88,66	88,66	88,66	93,06	93,06	93,06	93,06	93,06	174.735.500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target											Anggaran (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman												11,11	73.877.600
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								91	91	91	91	91	16.161.000
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon												100	80.468.000
		Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan BPOM Ambon Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	0	70,99	70,99	70,99	71,85	71,85	71,85	73,04	73,04	73,04	73,90	12.055.726.000
2	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi di masing–	Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	0	0	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	207.750.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target											Anggaran (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0	45	70	70	95	95	95	100	100	10	537.064.000
		Jumlah desa pangan aman	0	0	0	50	50	70	90	90	90	10	10	3	544.308.000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	0	25	50	70	90	90	100	100	100,00	1	152.085.000
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	15	25	40	50	55	60	65	65	75	85	17,57	50.925.000
5	Terlaksananya Penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	0	5	10	15	20	30	40	62,50	70	75	75	75	400.110.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target											Anggaran (Rupiah)
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	94.383.000
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT												4,65	118.507.000
8	Terwujudnya tata Kelola pemerintan unit organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												86	2.179.396.000
		Nilai AKIP UPT BPOM												79,5	2.168.936.000
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	2.180.626.000
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3,05	2.279.026.000
														Total	**25.220.587.000**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.5 Metode Pengukuran

Sejalan dengan berbagai regulasi terkait sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, diperlukan pedoman yang dapat menjadi acuan bagi unit/satuan kerja dalam melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja secara berkelanjutan. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 Tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Kriterian Penilaian Capaian Kinerja

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	> 110%	
Sangat Baik	$100\% \leq x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	< 60	

Penetapan ini bertujuan untuk :

i. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.

ii. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Kriterian Penilaian Tahunan Capaian Kinerja

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai / Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar ≥ 100%	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar 70% - < 100% (70 ≤ x < 100).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar < 70% (x < 70)	

NKO Tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:

1. Capaian Perjanjian Kinerja

   Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

   Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Perhitungan NKO tahunan sebagaimana tertuang dalam matriks berikut:

Tabel 10. Matriks Perhitungan NKO

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) ((1)x(100%-(2))x100)
	Total Capaian PK (4)							
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)							
	Predikat NKO (6)							

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 11. Predikat AKIP UPT

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Predikat NKO

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel 12. Predikat NKO

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>100%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap Tahun untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam Tahun tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2025. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Balai POM di Ambon adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan tim pelaporan dan Monitoring evaluasi di Balai POM di Ambon yang disahkan oleh SK Kepala BPOM;
2. Kepala Balai POM di Ambon menunjuk perwakilan penanggung jawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala Balai POM di Ambon;
3. Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada database online https://sites.google.com/view/kele-data-bpom-ambon secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggung jawab data Balai;
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas dan setiap Tahun pada aplikasi e-performance;
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Scorecard (BSC) serta pengukuran kinerja secara cascading dari level eselon 3 hingga eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran inipun diintegrasikan dengan aplikasi SIMAKIN pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik Tahunan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada Tahun berikutnya;
6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam pemantauan kinerja BPOM di Ambon menerapkan manajemen risiko dengan mengevaluasi respon yang diambil dalam penanganan terhadap hambatan/akar penyebab yang memungkinkan tidak tercapainya target kinerja.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).













BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BADAN POM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran kinerja baik itu kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran menggunakan yang memenuhi unsur SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timebond).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua rumus IKK tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Untuk Indikator positif / polarisasi *maximize* (semakin **tinggi** realisasi, semakin **baik** kinerja), dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Balai POM di Ambon dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara tahunan. NKO tahunan dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut dan predikat AKIP. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Balai POM di Ambon tahun 2025 sebesar 93,01% dengan kriteria **"Baik"**.

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka indikator kinerja utama (IKU) yang capaiannya lebih dari 110% dinormalisasikan menjadi 110% dan capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi dan berdasarkan penilaian AKIP Balai POM di Ambon oleh Inspektorat dengan realisasi 78,77 dengan predikat "**BB**" (koreksi capaian 10% untuk masing – masing IKU), maka hasil pengukuran kinerja, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Balai POM di Ambon tahun 2025 sebesar 92,72% sebagaimana tabel dibawah ini :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 13. Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi Balai POM di Ambon Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Kinerja			Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
				Target	Realisasi	%Capaian			
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	89,5	97,77	109,24%	-	10%	98,32%
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Desember	26	26,7	102,69%	-	10%	92,42%
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	91,00	97,70	107,36%	-	10%	96,63%
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Desember	100,00	100,00	100,00%	-	10%	90,00%
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	91,00	91,11	100,12%	-	10%	90,11%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Kinerja			Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
				Target	Realisasi	%Capaian			
6	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Desember	85,00	92,99	109,40%	-	10%	98,46%
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	91,00	98,00	107,69%	-	10%	96,92%
8	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	85,00	88,57	104,20%	-	10%	93,78%
9	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	94,00	99,50	105,85%	-	10%	95,27%
10	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	89,00	95,10	106,85%	-	10%	96,17%
11	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Desember	93,06	97,63	104,91%	-	10%	94,42%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Kinerja			Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
				Target	Realisasi	%Capaian			
12	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Desember	91,00	91,00	100,00%	-	10%	90,00%
13	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Desember	100,00	103,96	103,96%	-	10%	93,56%
14	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Desember	11,11	11,11	100,00%	-	10%	90,00%
15	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Desember	73,90	74,60	100,95%	-	10%	90,85%
16	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Desember	87,93	91,40	103,95%	-	10%	93,55%
17	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Desember	10,00	10,00	100,00%	-	10%	90,00%
18	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman	Desember	3,00	3,00	100,00%	-	10%	90,00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Kinerja			Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
				Target	Realisasi	%Capaian			
19	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Desember	1,00	1,00	100,00%	-	10%	90,00%
20	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Desember	17,57	17,57	100,00%	-	10%	90,00%
21	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Desember	75,00	77,50	103,33%	Normalisasi	10%	93,00%
22	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Desember	90,00	99,00	110,00%	-	10%	99,00%
23	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	Desember	4,65	4,89	105,16%	-	10%	94,65%
24	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optima	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Desember	86	87,26	101,47%	-	10%	91,32%
25	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optima	Nilai AKIP UPT	Desember	79,5	78,77	99,08%	-	10%	89,17%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Strategis	Indikator	Bulan	Kinerja			Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
				Target	Realisasi	%Capaian			
26	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optima	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Desember	5	5	100,00%	-	10%	90,00%
27	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optima	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Desember	3,05	2,91	95,41%	-	10%	85,87%
								Total Capaian PK	2503%
								Nilai Kinerja Organisasi (Rata – rata capaian PK)	93,01%
								Predikat NKO	**BAIK**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat 7 sasaran kegiatan dan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 14. Capaian Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Capaian Sasaran Kegiatan	Kategori dan Notifikasi Warna
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	104,22%	Sangat Baik
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100,99%	Sangat Baik
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100,00%	Baik
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	103,33%	Sangat Baik
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	110,00%	Sangat Baik
6	Layanan Publik UPT yang prima	105,16%	Sangat Baik
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	98,99%	Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dari 7 sasaran kegiatan yang diukur pada Tahun 2025, terdapat **5 sasaran kegiatan** dengan kategori **"sangat baik"**, dan **2 sasaran strategis** dengan kategori **"baik"**. Sedangkan untuk pencapaian setiap indikator kinerja ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Indikator	Target jangka Menengah RENSTRA (2029)	Target 2025	Realisasi Kinerja					
				Realisasi Tahun 2025	Capaian terhadap target Tahun 2025	Kriteria Capaian terhadap Target Tahun 2025	Capaian terhadap target Jangka Menengah (2029)	Kriteria Capaian terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2029	Ket
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,50	89,50	97,77	109,24%	Sangat Baik	104,57%	Tercapai / Melampaui	
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	30,00	26,00	26,7	102,69%	Sangat Baik	89,00%	Akan Tercapai	
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	91,00	97,70	107,36%	Sangat Baik	102,84%	Tercapai / Melampaui	
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00%	Baik	100,00%	Tercapai / Melampaui	
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	91,00	91,11	100,12%	Sangat Baik	95,91%	Akan Tercapai	
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder	93,00	85,00	92,99	109,40%	Sangat Baik	99,99%	Akan Tercapai	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Target jangka Menengah RENSTRA (2029)	Target 2025	Realisasi Kinerja					
				Realisasi Tahun 2025	Capaian terhadap target Tahun 2025	Kriteria Capaian terhadap Target Tahun 2025	Capaian terhadap target Jangka Menengah (2029)	Kriteria Capaian terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2029	Ket
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	91,00	98,00	107,69%	Sangat Baik	103,16%	Tercapai / Melampaui	
8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	95,00	85,00	88,57	104,20%	Sangat Baik	93,23%	Akan Tercapai	
9	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	98,50	94,00	99,50	105,85%	Sangat Baik	101,02%	Tercapai / Melampaui	
10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan (Termasuk PIRT) Yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	93,00	89,00	95,10	106,85%	Sangat Baik	102,26%	Tercapai / Melampaui	
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan	97,60	93,06	97,63	104,91%	Sangat Baik	100,03%	Tercapai / Melampaui	
12	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman	55,56	11,11	11,11	100,00%	Baik	20,00%	Perlu Upaya Keras	
13	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	95,00	91,00	91,00	100,00%	Baik	95,79%	Akan Tercapai	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Target jangka Menengah RENSTRA (2029)	Target 2025	Realisasi Kinerja					
				Realisasi Tahun 2025	Capaian terhadap target Tahun 2025	Kriteria Capaian terhadap Target Tahun 2025	Capaian terhadap target Jangka Menengah (2029)	Kriteria Capaian terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2029	Ket
14	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon	100,00	100,00	103,96	103,96%	Sangat Baik	103,96%	Tercapai / Melampaui	
15	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan BPOM Ambon Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	84,90	73,90	74,60	100,95%	Sangat Baik	87,87%	Akan Tercapai	
16	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT	91,45	87,93	91,40	103,95%	Sangat Baik	99,95%	Akan Tercapai	
17	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	18	10	10,00	100,00%	Baik	55,56%	Perlu Upaya Keras	
18	Jumlah Desa Pangan Aman	7	3	3,00	100,00%	Baik	42,86%	Perlu Upaya Keras	
19	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	2	1	1,00	100,00%	Baik	50,00%	Perlu Upaya Keras	
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan	100,00	100,00	17,57	100,00%	Baik	17,57%	Perlu Upaya Keras	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	Target jangka Menengah RENSTRA (2029)	Target 2025	Realisasi Kinerja					
				Realisasi Tahun 2025	Capaian terhadap target Tahun 2025	Kriteria Capaian terhadap Target Tahun 2025	Capaian terhadap target Jangka Menengah (2029)	Kriteria Capaian terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2029	Ket
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	79,00	75,00	77,50	103,33%	Sangat Baik	98,10%	Akan Tercapai	
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan	94,00	90,00	99,00	110,00%	Sangat Baik	105,32%	Tercapai / Melampaui	
23	Indeks Pelayanan Publik BPOM Ambon	4,85	4,65	4,89	105,16%	Sangat Baik	100,82%	Tercapai / Melampaui	
24	Nilai Pembangunan ZI	90,00	86,00	87,26	101,47%	Sangat Baik	96,96%	Akan Tercapai	
25	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,50	79,50	78,77	99,08%	Baik	96,65%	Akan Tercapai	
26	Nilai Kinerja Anggaran	5	5	5	100,00%	Baik	100,00%	Tercapai / Melampaui	
27	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja	3,25	3,05	2,91	95,41%	Baik	89,54%	Akan Tercapai	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Analisis akuntabilitas kinerja pada tiap indikator Adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan I

Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Ambon terdiri dari beberapa indikator kinerja utama, sebagai berikut :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan Laboratorium
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

IKSK 1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sedangkan Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Dalam penetuan realisasi kinerja pada indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dihitung dengan menggunakan formula:

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C} + \mathbf{D})/\mathbf{4}$$

Keterangan:

A. Persentase Sampel **Obat** Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = a+b+c+d+e

   a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%)
   b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %)
   c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).
   d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)
   e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%)

B. Persentase Sampel **Obat Bahan Alam** Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e) / 5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Pemenuhan target pengawasan
b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%
d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
e. Tanggapan atas surat tindak lanjut.

C. Persentase Sampel **Suplemen Kesehatan** Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e) / 5

a. Pemenuhan target pengawasan
b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%
d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
e. Tanggapan atas surat tindak lanjut.

D. Persentase Sampel **Kosmetik** Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan
b. Kesesuaian pelaksanaan sampling
c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan
d. Ketepatan dalam penentuan Kesimpulan
e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Tahun 2025

Tabel 16. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,50	97,77	109,24	Sangat Baik

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan sampel obat (obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik) yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon. Sampel obat yang dimaksud adalah obat yang disampling oleh Balai POM di Ambon sesuai dengan Pedoman Sampling Tahun 2025, walaupun sampel tersebut dilakukan pengujian oleh UPT sendiri maupun UPT lainnya sesuai dengan petunjuk teknis regionalisasi laboratorium dengan realisasi 97,77% Sehingga capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada Tahun 2025 adalah sebesar **109,24%** dengan kriteria "**Sangat Baik**". Berdasarkan komoditi, capaian indikator sampel sediaan farmasi tertinggi pada sampel obat dengan 99,85, kemudian sampel kosmetik 99,82, sampel obat bahan alam 98,00, dan sampel suplemen Kesehatan 93,41.

Gambar 55. Capaian sampel sediaan farmasi per komoditi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 17. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
2024	-	-	-	-
2025	89,50	97,77	109,24	Sangat Baik

Indikator *Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* merupakan indikator kinerja dengan perhitungan baru pada periode RENSTRA 2025 - 2029, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi serta capaian kinerja tahun sebelumnya.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA 2025 - 2029

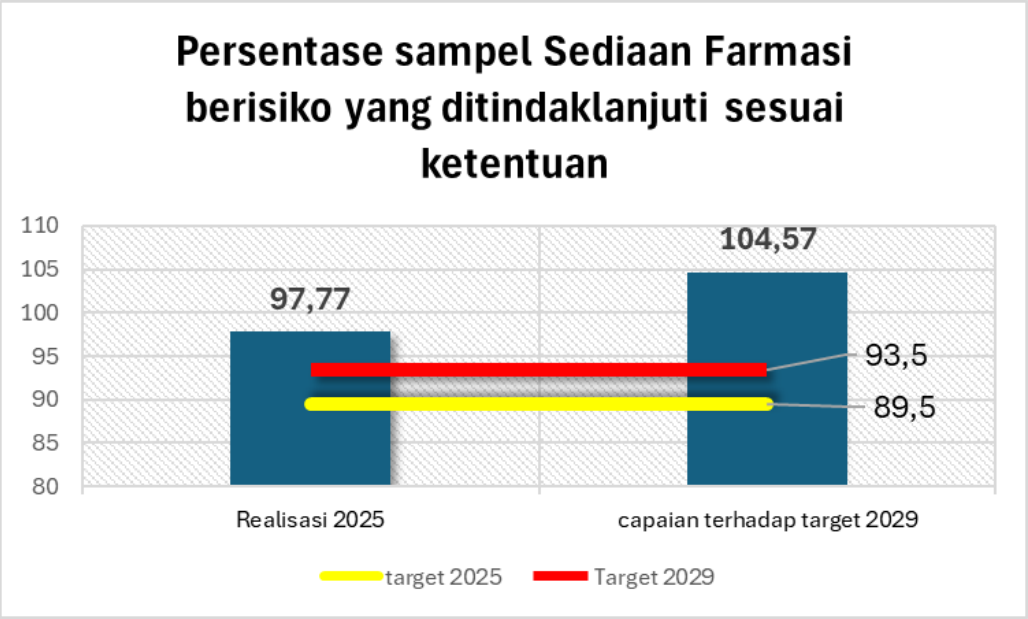
Tabel 18. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

INDIKATOR	TARGET RENSTRA (2029) (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,50	97,77	104,57	Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 sebesar 97,77% jika dibandingkan dengan target Tahun 2029 yaitu 93,50%, dengan capaian 109,24% masuk ke dalam kriteria **"Tercapai/ Melampaui"**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 56. Grafik capaian realisasi terhadap target jangka menengah



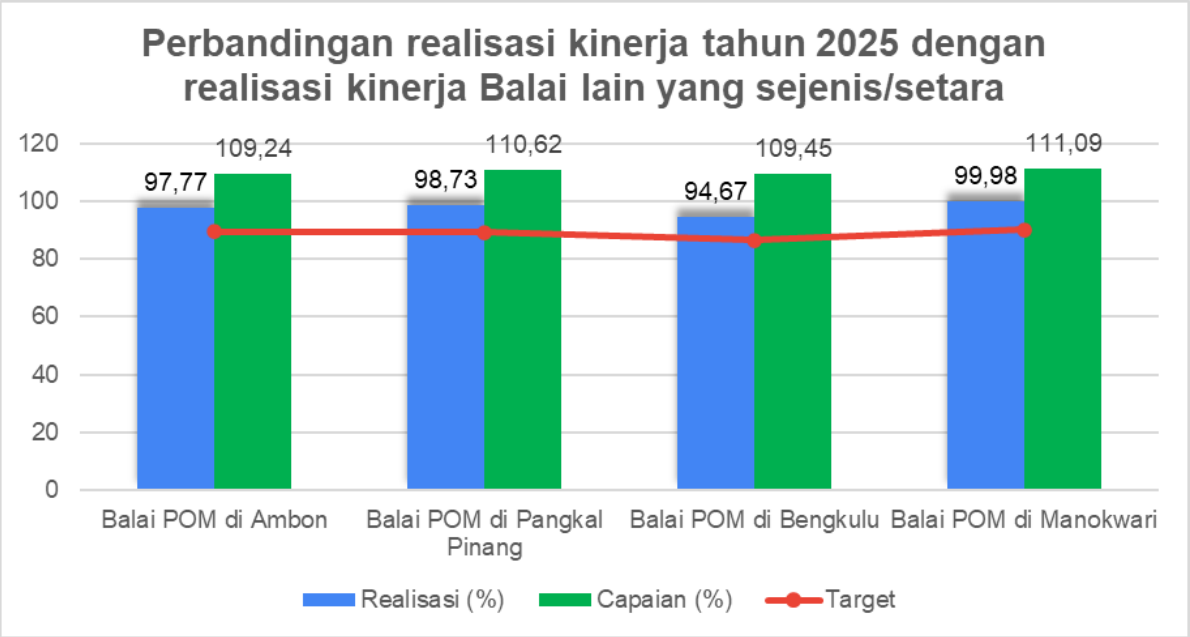
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

Tabel 19. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

UPT	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Balai POM di Ambon	89,50	97,77	109,24%	Sangat Baik
Balai POM di Pangkal Pinang	89,25	98,73	110,62%	Tidak Dapat Disimpulkan
Balai POM di Bengkulu	86,50	94,67	109,45%	Sangat Baik
Balai POM di Manokwari	90,00	99,98	111,09%	Tidak Dapat Disimpulkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 57. Grafik perbandingan realisasi kinerja dengan balai lain yang setara



Realisasi indikator kinerja persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 pada BPOM di Ambon, BPOM di Pangkal Pinang, BPOM di Bengkulu, dan BPOM di Manokwari, hanya BPOM di Ambon dan BPOM di Bengkulu yang kriteria capaiannya “Sangat Baik” karena berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk BPOM di Pangkal Pinang dan BPOM di Manokwari, kriteria capaiannya “Tidak Dapat Disimpulkan” karena realisasi melebihi 110% dari target.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 97,77%, sehingga diperoleh capaian 109,24% dengan kategori **“Sangat Baik”.** Adapun penyebab kegagalan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Pemeriksaan :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Obat:
   - Terdapat 248 dari 246 (100,81%) target sampel obat yang disampling di tahun 2025
   - Terdapat 246 dari 246 (100%) target sampel obat yang sesuai renlak per kategori sampel
   - Terdapat 246 dari 246 (100%) target sampel obat yang sesuai renlak per kelas terapi.
   - Terdapat 243 dari 246 (98,78%) target sampel obat yang sesuai renlak waktu
   - Terdapat 247 dari 246 (100,41%) target sampel obat yang dilakukan evaluasi penandaan sesuai ketentuan
   - 4 dari 4 (100%) laporan monitoring penarikan telah dilaporkan sesuai ketentuan.
   - Adanya SOP Makro dan SOP Mikro terkait Sampling Sediaan Farmasi serta Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2025.
   - Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) mempermudah pelaporan dan tindak lanjut.
   - Kepatuhan terhadap rencana pelaksanaan sampling sediaan farmasi.
   - Kompetensi petugas yang memadai dalam memahami regulasi dan kedisiplinan dalam pelaporan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

- Pemeriksaan:
  - Adanya pemetaan risiko sediaan farmasi berbasis data sehingga pengambilan sampel lebih terfokus pada sediaan yang berisiko tinggi.
  - Kepatuhan terhadap jadwal dan target sampling oleh petugas di lapangan, menunjukkan adanya disiplin pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Pelatihan rutin dan peningkatan kapasitas SDM, sehingga petugas memahami regulasi terbaru serta mampu melakukan pengambilan dan pengujian sampel dengan akurat.

IKSK 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Persentase *fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO* dapat dihitung dengan menggunakan **(A / B) x 100%**

A = Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan

B = jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

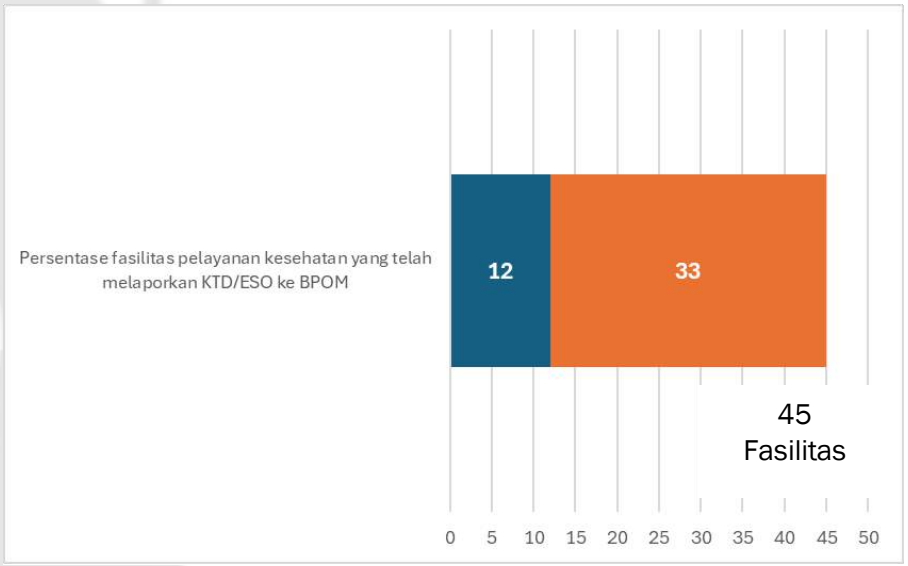
1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Tahun 2025

Tabel 20. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	26,7	102,69	Sangat Baik

Realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO pada wilayah pengawasan Balai POM di Ambonyaitu 26,7 Sehingga capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada Tahun 2025 adalah sebesar **102,69%** dengan kriteria "**Sangat Baik**". Realisasi tersebut diperoleh berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh Balai POM di Ambon pada tahun 2025 sebanyak 45 fasilitas, dan yang telah melaporkan KTD/ESO ke Balai POM di Ambon sebanyak 12 Fasilitas.

Gambar 58. Data jumlah pelaporan KTD/ESO Tahun 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 21. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
2024	-	-	-	-
2025	26	26,7	102,69	Sangat Baik

Indikator *Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO* merupakan indikator kinerja dengan perhitungan baru pada periode RENSTRA 2025 - 2029, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi serta capaian kinerja tahun sebelumnya.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA 2025 - 2029

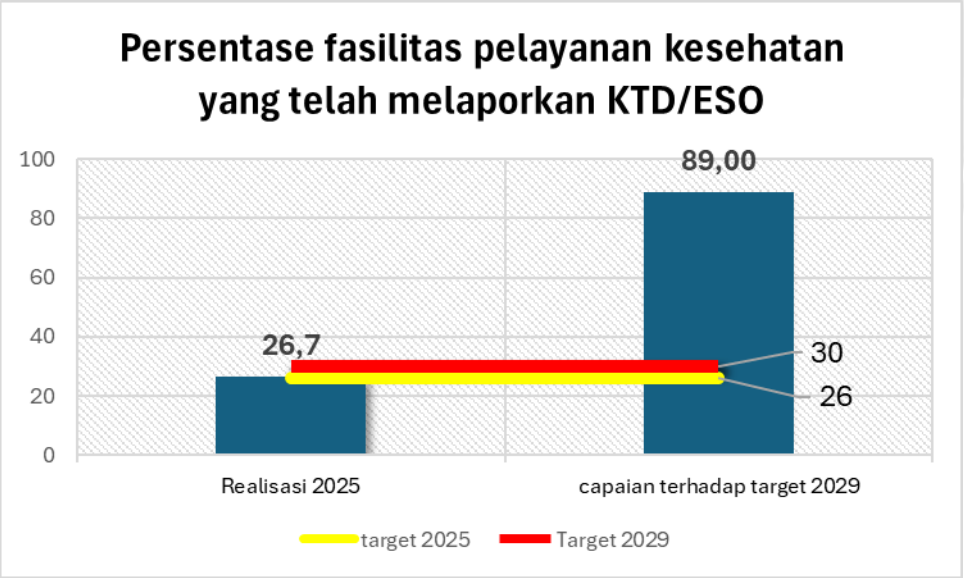
Tabel 22. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

INDIKATOR	TARGET RENSTRA (2029) (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	30	26,7	89,00	Akan Tercapai

Realisasi *Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO* pada Tahun 2025 sebesar 26,7 jika dibandingkan dengan target Tahun 2029 yaitu 30, dengan capaian 89% masuk ke dalam kriteria **"Akan Tercapai".**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 59. Grafik capaian realisasi terhadap target jangka menengah

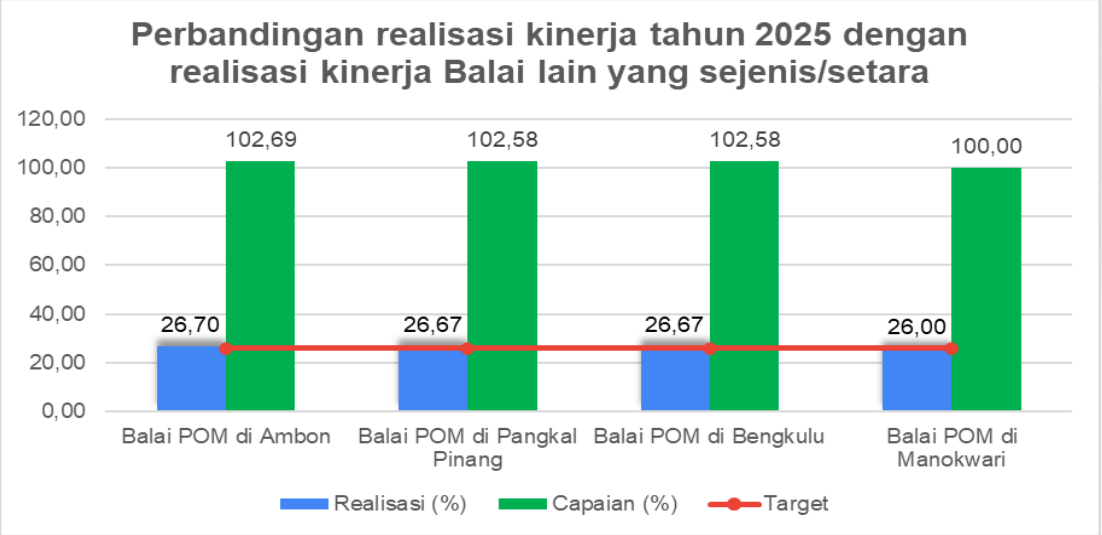


4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

Tabel 23. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

UPT	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Balai POM di Ambon	26,00	26,70	102,69%	Sangat Baik
Balai POM di Pangkal Pinang	26,00	26,67	102,58%	Sangat Baik
Balai POM di Bengkulu	26,00	26,67	102,58%	Sangat Baik
Balai POM di Manokwari	26,00	26,00	100%	Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Realisasi Indikator kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO pada Tahun 2025 pada BPOM di Ambon, BPOM di Pangkal Pinang, dan BPOM di Bengkulu telah dilaksanakan secara maksimal dengan kriteria **"Sangat Baik"**, sedangkan untuk BPOM di Manokwari dengan kriteria capaiannya "**Baik**".

5. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

- Melakukan komunikasi aktif melalui WA grup BPOM di Ambon dan sarana pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan KIE Farmakovigilans untuk melaporkan KTD/ESO yang terjadi serta kendala yang ditemui dalam rangka pelaporan.
- Koordinasi dan pendampingan sarana pelayanan kesehatan yang baik dalam pelaporan KTD/ESO.
- Adanya pergantian penanggung jawab pelaporan e-MESO di sarana pelayanan kesehatan sehingga terdapat lebih dari 1 akun untuk 1 saryankes.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Adanya koordinasi dan pendampingan sarana pelayanan kesehatan yang baik dalam pelaporan KTD/ESO.
- Beberapa sarana kesehatan telah memiliki akun e-MESO

IKSK 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan salah satu indikator dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Ambon. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Nilai capaian dari indikator ini dihitung dari serangkaian kegiatan mulai dari tahapan perencanaan, pengambilan, pemeriksaan dan pengujian sampel yang dilakukan berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai dengan ketentuan pedoman sampling, hingga tahapan pelaksanaan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Cara perhitungan :

% sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan :

A : kesesuaian target sampel

B : kesesuaian parameter uji

C : ketepatan pengambilan kesimpulan

D : ketepatan waktu pengambilan sampel

E : ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

F : tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya

Pada tahun 2025, BPOM di Ambon telah melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap 291 sampel pangan olahan, dengan nilai perolehan tiap aspek sebagai berikut :

A. Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)

Pada tahun 2025, telah dilakukan sampling dan pemeriksaan terhadap 291 sampel pangan olahan. Jumlah dan waktu pelaksanaan sampling dan pemeriksaan seluruhnya sesuai dengan target sampel UPT berdasarkan Pedoman Sampling 2025 dan Rencana Pelaksanaan (Renlak) Sampling BPOM di Ambon. Pada fungsi pengujian, telah melaksanakan pengujian terhadap keseluruhan sampel yang masuk sesuai dengan tingkatan Tier 3 sebanyak 418 sampel yang terdiri dari 291 sampel BPOM di Ambon dan 127 sampel Loka POM di Kepulauan Tanimbar. Dengan demikian, kesesuaian target sampel pangan olahan BPOM di Ambon pada tahun 2025 sebesar 100%.

B. Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)

Dari 291 sampel yang disampling oleh BPOM di Ambon, seluruhnya telah diuji dengan parameter uji sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada Pedoman Sampling dan Pengujian 2025, sehingga kesesuaian parameter uji sampel pangan olahan BPOM di Ambon pada tahun 2025 sebesar 100%.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)

Pengambilan kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu dilakukan berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel tanpa izin edar (TIE), rusak dan kadaluarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Pada tahun 2025, BPOM di Ambon telah melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap 291 sampel, dan seluruhnya telah ditetapkan kesimpulan sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian 2025. Ketepatan pengambilan kesimpulan sampel pangan olahan BPOM di Ambon pada tahun 2025 sebesar 100%.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada aspek waktu pengambilan sampel, sebanyak 291 sampel pangan olahan telah disampling sesuai dengan perencanaan waktu pada Renlak Sampling, sehingga ketepatan waktu pengambilan sampel pangan olahan BPOM di Ambon pada tahun 2025 sebesar 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)

Berdasarkan Pedoman Sampling dan Pengujian 2025, pelaporan sampling dan pengujian dilaksanakan paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya. Dari 291 sampel pangan olahan yang diuji, terdapat 67 sampel dilaporkan tidak tepat waktu, yang disebabkan oleh adanya kerusakan detektor PHRED, kerusakan alat ICP-MS untuk uji logam sampel regionalisasi di BBPOM di Makassar, keterlambatan hasil uji DNA Porcine dari BBPOM di Makassar, serta hasil uji error dari kit ELISA Reader. Dengan demikian, ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian sampel pangan olahan BPOM di Ambon pada tahun 2025 sebesar 76.98%.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)

Pada tahun 2025, terdapat 5 sampel pangan olahan tidak memenuhi syarat (TMS) yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan, dengan rincian :

Tabel 24. Sampel Pangan TMS

No	Jenis Pangan	Jenis TMS	Tindak Lanjut
1	Agar-agar/jeli siap konsumsi	Angka Kapang Khamir	Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
2	Olesan berbasis kakao	Angka Kapang Khamir	
3	Naget	Listeria monocytogenes	
4	Es Untuk Dimakan	Siklamat	
5	Naget	Listeria monocytogenes	

Seluruh sampel pangan olahan dengan hasil uji TMS tersebut diproduksi di luar wilayah kerja BPOM di Ambon, sehingga bentuk tindak lanjut yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan UPT BPOM sesuai lokasi produksi terkait penyampaian hasil uji produk TMS. Dengan demikian, persentase tindak lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/Ketentuan lainnya yang dilakukan oleh BPOM di Ambon pada tahun 2025 sebesar 100%.

Berdasarkan 6 aspek tersebut, diperoleh nilai realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 97.70%.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Tahun 2025

Tabel 25. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	97,70	107,36	Sangat Baik

Persentase *sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* pada Tahun 2025 **telah mencapai target** dengan capaian sebesar **107.36%** dengan kriteria "**Sangat Baik**".

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 26. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
2024	-	-	-	-
2025	91,00	97,70	107,36	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator *Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* merupakan indikator kinerja dengan perhitungan dan manual IKU baru pada periode RENSTRA 2025 - 2029, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi serta capaian kinerja tahun sebelumnya.

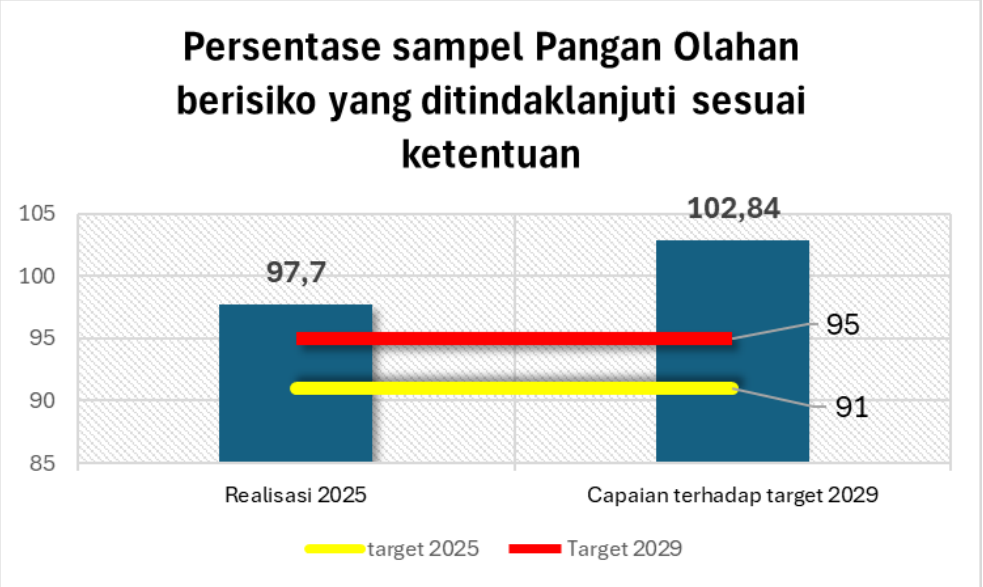
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA 2025 – 2029

Tabel 27. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

INDIKATOR	TARGET RENSTRA (2029) (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	97,70	102,84	▲ Tercapai / Melampaui

Realisasi *Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* pada Tahun 2025 sebesar 97,70 jika dibandingkan dengan target Tahun 2029 yaitu 95,00, dengan capaian 102,84% masuk ke dalam kriteria **"Tercapai / Melampaui"**

Gambar 60. Grafik capaian realisasi terhadap target jangka menengah

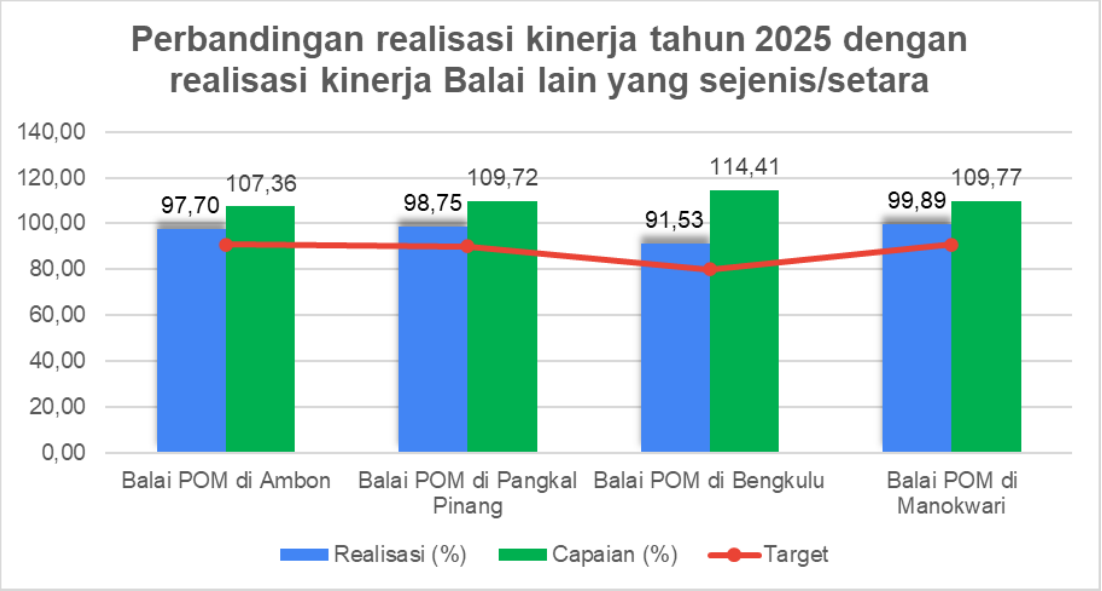


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

Tabel 28. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

UPT	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Balai POM di Ambon	91,00	97,70	107,36%	Sangat Baik
Balai POM di Pangkal Pinang	90,00	98,75	109,72%	Sangat Baik
Balai POM di Bengkulu	80,00	91,53	114,41%	Tidak Dapat Disimpulkan
Balai POM di Manokwari	91,00	99,89	109,77%	Sangat Baik



Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian *Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* pada tahun 2025 pada BPOM di Ambon, BPOM di Pangkal Pinang, dan BPOM di Manokwari dapat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

memenuhi target dengan kriteria "**Sangat Baik**", sedangkan Balai POM di Bengkulu dengan kriteria "**Tidak dapat disimpulkan**" karena capaian melebihi 110%.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 sebesar 97.70%, sehingga diperoleh capaian 107.36% dengan kategori "Sangat Baik". Penyebab kegagalan/keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

a. Aspek kesesuaian target sampel sebesar 100%, menunjukkan bahwa fungsi pemeriksaan konsisten melaksanakan sampling berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai dengan ketentuan pedoman sampling, serta fungsi pengujian telah melaksanakan pengujian sesuai dengan tingkatannya. Kuantitas dan waktu pelaksanaan sampling telah sesuai dengan target sampel UPT berdasarkan Pedoman Sampling 2025 dan Rencana Pelaksanaan (Renlak) Sampling BPOM di Ambon. Berdasarkan tingkatannya, laboratorium BPOM di Ambon masuk dalam Tier 3 dan memiliki tugas dalam melakukan pengujian sampel dari BPOM di Ambon dan Loka POM di Kepulauan Tanimbar.
b. Aspek kesesuaian parameter uji sebesar 100%, artinya seluruh sampel telah diuji sesuai dengan dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada Pedoman Sampling dan Pengujian 2025.

   Pada bulan februari - maret terdapat kendala kerusakan detektor PHRED untuk pengujian aflatoxin dan terjadi efisiensi anggaran sehingga tidak tersedia dana untuk perbaikan alat. Namun kendala tersebut dapat diselesaikan dengan meminjam alat di BBPPTP sehingga pengujian aflatoxin tetap dapat dilaksanakan dan tidak menurunkan capaian kesesuaian parameter uji.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Aspek ketepatan pengambilan kesimpulan sebesar 100%, menunjukkan adanya pemahaman yang baik dari petugas dalam melakukan pengambilan kesimpulan sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian 2025.
d. Aspek ketepatan waktu pengambilan sampel sebesar 100%, artinya pelaksanaan sampling telah sesuai dengan perencanaan waktu pada Renlak Sampling. Waktu pelaksanaan sampling rata-rata selama 5 (lima) hari kerja. Sebaran lokasi pengambilan sampel telah dilakukan pada 9 (sembilan) kabupaten/kota sehingga sampel lebih representatif dan dapat memberikan gambaran kinerja organisasi yang sesungguhnya.
e. Aspek ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian sebesar 76.98%, artinya sebagian besar hasil pemeriksaan dan pengujian sampel telah dilaporkan tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pelaksanaan pemeriksaan/evaluasi penandaan label pada seluruh sampel pangan olahan telah dilakukan tepat waktu sehingga sampel dapat dikirimkan ke laboratorium pengujian internal Balai POM Ambon dan laboratorium regionalisasi sebelum tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. Namun pelaporan hasil pengujian belum seluruhnya dilaksanakan tepat waktu karena adanya oleh beberapa kendala, yaitu :
    1. Kegiatan sampling januari baru dapat dilaksanakan pada pertengahan bulan, sehingga hasil pengujian belum dapat dilaporkan pada tanggal 15 bulan berikutnya
    2. Detektor PHRED untuk pengujian aflatoksin rusak dan tidak ada anggaran untuk pemeliharaan karena efisiensi, sehingga pengujian dilaksanakan dengan dengan meminjam alat di BBPPTP
    3. Kurang cermat dalam memahami Pedoman Sampling dan Pengujian 2025 sehingga pelaporan SIPT pada bulan Januari - Mei dilaksanakan pada akhir bulan dan ketepatan waktu pelaporan hanya dihitung berdasarkan timeline pengujian 15 - 20 HK. Jika berdasarkan timeline, semua sampel memenuhi ketentuan.
    4. Kerusakan alat ICP-MS BBPOM di Makassar untuk pengujian logam sampel regionalisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Keterlambatan hasil uji DNA porcine dari BBPOM di Makassar
6. Pengujian histamin pada produk olahan ikan memberikan hasil uji error sehingga perlu menunggu pengiriman kit yang baru dari vendor

f. Aspek tindak lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/Ketentuan lainnya sebesar 100%, menunjukkan bahwa BPOM di Ambon telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil pengujian yang tidak memenuhi syarat (TIE / Rusak / Kedaluwarsa / TMS Pengujian)

Realisasi dan capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada BPOM di Ambon tahun 2025 sudah sangat baik, namun belum optimal pada aspek ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian. Rekomendasi upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan antara lain :

- Lebih cermat dalam memahami Pedoman Sampling dan Pengujian serta melakukan verifikasi berjenjang untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaporan pengujian.
- Evaluasi kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pelaporan dan pemenuhan timeline pengujian sampel pangan olahan dilaksanakan secara rutin
- Melakukan *maintenance* peralatan laboratorium secara rutin dan monitoring ketersediaan reagensia, media, suku cadang, bahan habis pakai, serta sumber daya/kemampuan uji yang kompeten agar pengujian berjalan lancar dan menunjang komitmen BPOM di Ambon dalam melakukan pengujian sesuai persyaratan ISO/IEC 17025 : 2015 dan mendukung penerapan sistem manajemen mutu laboratorium uji.
- Rutin melakukan koordinasi dan monitoring antara fungsi pemeriksaan dan pengujian pada proses perencanaan, pengambilan, pemeriksaan, pengujian, pelaporan dan tindak lanjut sampel pangan olahan sesuai dengan ketentuan Pedoman Sampling
- Memperkuat koordinasi antar balai dalam satu region agar pengujian dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang IKU Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah Pengujian laboratorium sampel makanan dan Pengadaan sampel makanan, selain itu melakukan intervensi ke sarana produksi pangan pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPPOB. Target pengadaan sampel makanan adalah 342 sampel, terdiri dari 291 sampel pangan olahan, 27 sampel PIRT dan 24 sampel *emerging issue*/pangan tertentu. Realisasi sampling pangan olahan sebesar 291 sampel atau 100%. Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BPOM di Ambon, juga dilakukan pengujian terhadap sampel.dari Loka POM di Tanimbar, dan sampel regionalisasi parameter uji EG DEG, Sianida dan Okratoxin dari BBPOM di Makassar, BPOM di Kendari, BPOM di Mamuju, BPOM di Palopo dan BPOM di Bau-Bau. Hal ini mengakibatkan semakin banyak sampel yang harus diuji BBPOM di Surabaya sedangkan sarana prasarana sangat terbatas.

IKSK 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan (KLB-KP) adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB-KP berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan (PODK) atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). Definisi sampel KLB-KP diuji sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

penelusuran dugaan KLB-KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Pengujian sampel KLP-KB yang merupakan PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Regulasi terkait pengujian sampel KLB-KP :

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Tahun 2025

Tabel 29. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	Baik

Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh Balai POM Ambon 100% Sehingga capaian Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh Balai POM Ambon pada Tahun 2025 adalah sebesar dengan kriteria "**Baik**". Selama tahun 2025, jumlah sampel KLB yang diuji oleh Balai POM di Ambon sebanyak 39 sampel dengan parameter yang terkonfirmasi sebanyak 79 parameter, dari pelaksanaan sampling terhadap dugaan kasus KLB Keracunan pangan, terdapat 38 sampel dan 78 parameter yang terkonfirmasi. Untuk data pelaksanaan sampling dan pengujian KLB keracunan pangan selama tahun 2025, dapat disajikan dalam tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 30. Jumlah sampel KLB tahun 2025

Bulan	Pengujian KLB				Sampling KLB			
	Jumlah Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi	Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling	Jumlah parameter yang terkonfirmasi	Jumlah Sampel	jumlah sampel yang diterima yang layak uji (secara organoleptis) sesuai hasil investigasi	Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling	Jumlah parameter yang terkonfirmasi
Maret	6	18		2	6	6		2
April	6	24		9	6	6		9
September	5	7		6	4	4		5
Oktober	8	14		12	8	14		12
Desember	14	47	3	50	14	47	3	50
JUMLAH	**39**	**110**	**3**	**79**	**38**	**77**	**3**	**78**

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 31. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
2024	-	-	-	-
2025	100	100	100	Baik

Indikator *Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT* merupakan indikator kinerja dengan perhitungan baru pada periode RENSTRA 2025 - 2029, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi serta capaian kinerja tahun sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

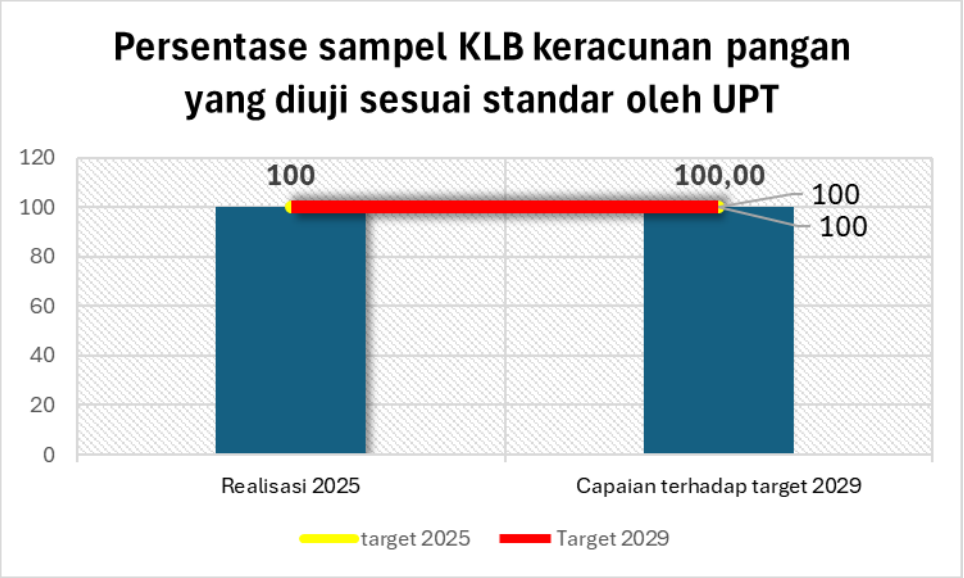
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA 2025 – 2029

Tabel 32. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

INDIKATOR	TARGET RENSTRA (2029) (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	▲ Tercapai / Melampaui

Realisasi *Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT* pada Tahun 2025 sebesar 100 jika dibandingkan dengan target Tahun 2029 yaitu 100, dengan capaian 100% masuk ke dalam kriteria **"Tercapai / Melampaui".**

Gambar 61. Grafik capaian realisasi terhadap target jangka menengah

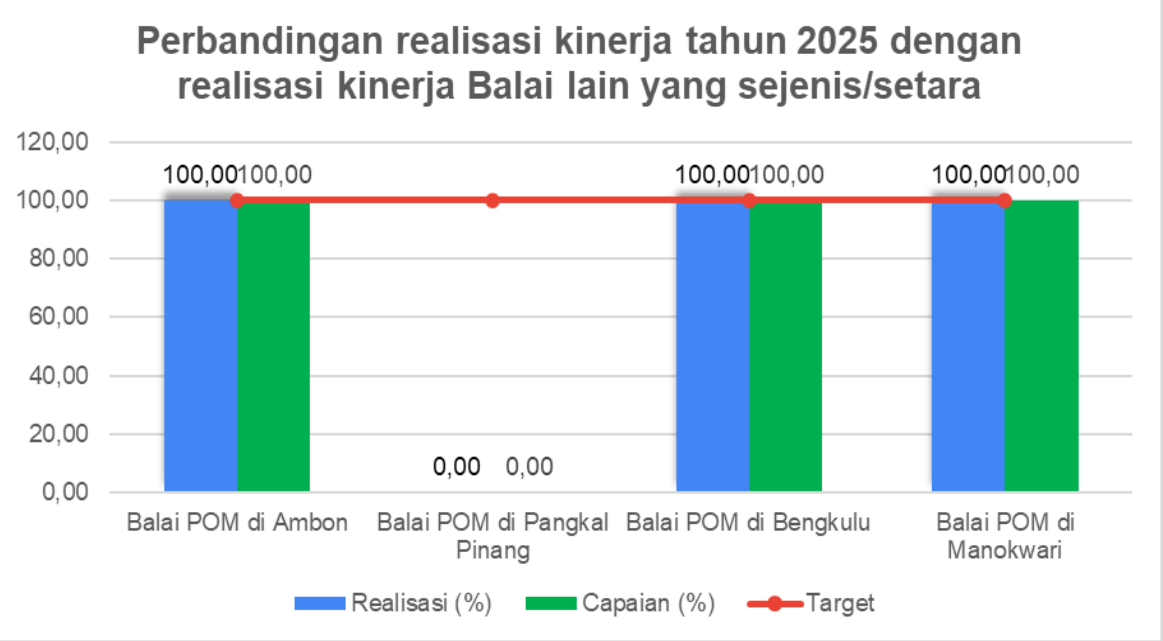


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

Tabel 33. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

UPT	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Balai POM di Ambon	100,00	100,00	100,00	Baik
Balai POM di Pangkal Pinang	100,00	0	0	Kurang
Balai POM di Bengkulu	100,00	100,00	100,00	Baik
Balai POM di Manokwari	100,00	100,00	100,00	Baik



Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian *Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT* pada tahun 2025 pada BPOM di Ambon, BPOM di Bengkulu, dan BPOM di Manokwari dapat memenuhi target dengan kriteria "**Baik**", sedangkan Balai POM di Pangkal Pinang dengan kriteria "**Kurang**" karena tidak terdapat realisasi sampel KLB selama tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

- Fungsi pemeriksaan konsisten melaksanakan sampling berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai dengan ketentuan pedoman sampling. Waktu pelaksanaan sampling di tahun 2025 rata-rata selama 5 (lima) hari kerja. Sebaran lokasi pengambilan sampel telah dilakukan pada 9 (sembilan) kabupaten/kota sehingga sampel lebih representatif dan dapat memberikan gambaran kinerja organisasi yang sesungguhnya.
- Penyelesaian evaluasi penandaan label pangan olahan dilakukan tepat waktu sehingga sampel dapat dikirimkan ke laboratorium pengujian internal Balai POM Ambon dan laboratorium regionalisasi sebelum tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- Laboratorium konsisten dalam melaksanakan pengujian sampel pangan olahan dengan parameter uji sesuai ketentuan pada pedoman sampling, dengan waktu pengujian 15 - 20 hari kerja, serta mematuhi ketentuan pengambilan kesimpulan, dan melaporkan hasil uji pada SIPT secara tepat waktu, yaitu maksimal tanggal 15 bulan berikutnya.
- Koordinasi yang baik antara petugas pemeriksaan dan pengujian dalam perencanaan dan pelaksanaan sampling, pengujian, pelaporan dan tindak lanjut sampel pangan olahan.
- Koordinasi yang baik antar semua pihak yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat penanganan KLB-KP di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga investigasi epidemiologi dapat dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, sehingga bisa didapatkan data dugaan agen penyebab KLB-KP yang spesifik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Kepatuhan pada rencana pelaksanaan (renlak) sampling yang telah disusun berdasarkan dengan pedoman sampling dan disepakati antara pemeriksaan dan laboratorium pengujian
- Pemerataan sebaran lokasi sampling pada setiap kabupaten/kota untuk pemenuhan dari setiap sampel kategori pangan olahan dan untuk melihat setiap profiling penyebaran produk pangan.
- Evaluasi penandaan label pangan olahan dilakukan rata-rata selama 2-3 hari kerja.
- Percepatan waktu pengambilan sampel setiap bulan yang sebelumnya dilakukan pada minggu ke-4 disetiap bulannya.
- Evaluasi kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pelaporan dan pemenuhan timeline pengujian sampel pangan olahan dilaksanakan secara rutin
- Monitoring ketersediaan reagensia, media, suku cadang, bahan habis pakai, peralatan laboratorium, serta sumber daya/kemampuan uji yang kompeten agar dapat menunjang komitmen BPOM di Ambon dalam melakukan pengujian sampel pangan olahan sesuai persyaratan ISO/IEC 17025 : 2015 dan mendukung penerapan sistem manajemen mutu laboratorium uji.
- Rutin melakukan koordinasi dan monitoring proses perencanaan, pengambilan, pemeriksaan, pengujian, pelaporan dan tindak lanjut sampel pangan olahan sesuai dengan ketentuan Pedoman Sampling.
- Tim KLB-KP telah mengikuti bimbingan teknis penanganan KLB-KP sehingga memiliki kompetensi yang baik dalam melaksanakan investigasi epidemiologi dan dapat menentukan dugaan agen penyebab dengan lebih cepat.
- Hasil asesmen standar kemampuan laboratorium 2025, pemenuhan ruang lingkup pengujian mikrobiologi sebesar 90.6% sehingga laboratorium mampu melakukan pengujian mikrobiologi dengan range mikroba yang cukup luas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSK 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan salah satu indikator dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BPOM di Ambon. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sedangkan Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Nilai capaian dari indikator ini dihitung dari serangkaian kegiatan mulai dari tahapan perencanaan, pengambilan, pemeriksaan dan pengujian sampel yang dilakukan berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai dengan ketentuan pedoman sampling, hingga tahapan pelaksanaan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Cara perhitungan :

%sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
= 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan :
A : kesesuaian target sampel
B : kesesuaian parameter uji
C : ketepatan pengambilan kesimpulan
D : ketepatan waktu pengambilan sampel
E : ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
F : tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya

Pada tahun 2025, BPOM di Ambon telah melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap 27 sampel PIRT, dengan nilai perolehan tiap aspek sebagai berikut :

A. Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada tahun 2025, telah dilakukan sampling dan pemeriksaan terhadap 27 sampel PIRT yang beredar di wilayah kerja BPOM di Ambon. Jumlah dan waktu pelaksanaan sampling dan pemeriksaan seluruhnya sesuai dengan target sampel UPT berdasarkan Pedoman Sampling 2025 dan Rencana Pelaksanaan (Renlak) Sampling BPOM di Ambon. Pada fungsi pengujian, telah melaksanakan pengujian terhadap keseluruhan sampel yang masuk sesuai dengan tingkatan Tier 3 sebanyak 38 sampel yang terdiri dari 27 sampel BPOM di Ambon dan 11 sampel Loka POM di Kepulauan Tanimbar. Dengan demikian, kesesuaian target sampel PIRT BPOM di Ambon pada tahun 2025 sebesar 100%.

B. Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)

Pedoman Sampling dan Pengujian 2025 telah mengatur ketentuan pengujian sampel PIRT minimal 3 parameter uji kimia dan minimal 1 parameter uji mikrobiologi (jika ada). Parameter uji diutamakan adalah parameter uji prioritas sesuai urutannya, dan jika terdapat kendala dapat dilakukan pengujian dengan parameter uji pilihan sesuai urutannya. Dari 27 sampel yang disampling oleh BPOM di Ambon, terdapat 12 sampel dengan parameter uji yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga kesesuaian parameter uji sampel pangan olahan BPOM di Ambon pada tahun 2025 sebesar 55.56%.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)

Pengambilan kesimpulan sampel PIRT yang aman dan bermutu dilakukan berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel tanpa izin edar (TIE), rusak dan kadaluarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Pada tahun 2025, BPOM di Ambon telah melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap 27 sampel PIRT, dan seluruhnya telah ditetapkan kesimpulan sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian 2025. Ketepatan pengambilan kesimpulan sampel pangan olahan BPOM di Ambon pada tahun 2025 sebesar 100%.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)

Berdasarkan Pedoman Sampling dan Pengujian 2025, jadwal sampling PIRT oleh UPT BPOM dilakukan pada triwulan I tahun berjalan agar tidak terjadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sampling berulang (*double sampling/double counting*) pada produk yang sama dengan Dinas Kesehatan. Karena adanya efisiensi anggaran pada bulan Februari - Maret, jadwal sampling PIRT diubah menjadi sampai dengan triwulan II. Realisasi sampling keseluruhan sampel PIRT telah selesai pada bulan Mei, sehingga ketepatan waktu pengambilan sampel pangan olahan BPOM di Ambon pada tahun 2025 sebesar 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)

Seluruh sampel PIRT telah dilaporkan melalui SIPT paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya, sehingga ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian sampel PIRT BPOM di Ambon pada tahun 2025 sebesar 100%.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)

Pada tahun 2025, terdapat 3 sampel PIRT tidak memenuhi syarat (TMS) yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan, dengan rincian :

Tabel 34. Sampel PIRT TMS

No	Jenis Pangan	Jenis TMS	Tindak Lanjut
1	Manisan buah	Siklamat	Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
2	Manisan buah	Siklamat	
3	Gula merah	Sulfit	

Seluruh sampel PIRT dengan hasil uji TMS tersebut diproduksi di luar wilayah kerja BPOM di Ambon, sehingga bentuk tindak lanjut yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dan UPT BPOM sesuai lokasi produksi terkait penyampaian hasil uji produk TMS. Dengan demikian, persentase tindak lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/Ketentuan lainnya yang dilakukan oleh BPOM di Ambon pada tahun 2025 sebesar 100%.

Berdasarkan 6 aspek tersebut, diperoleh nilai realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 91,11%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Tahun 2025

Tabel 35. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	91,11	100,12	Sangat Baik

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Balai POM Ambon 91,11%, sehingga capaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Balai POM Ambon pada Tahun 2025 adalah sebesar 100,12% dengan kriteria "**Sangat Baik**".

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 36. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
2024	-	-	-	-
2025	91,00	91,11	100,12	Sangat Baik

Indikator *Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* merupakan indikator kinerja dengan perhitungan baru pada periode RENSTRA 2025 - 2029, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi serta capaian kinerja tahun sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

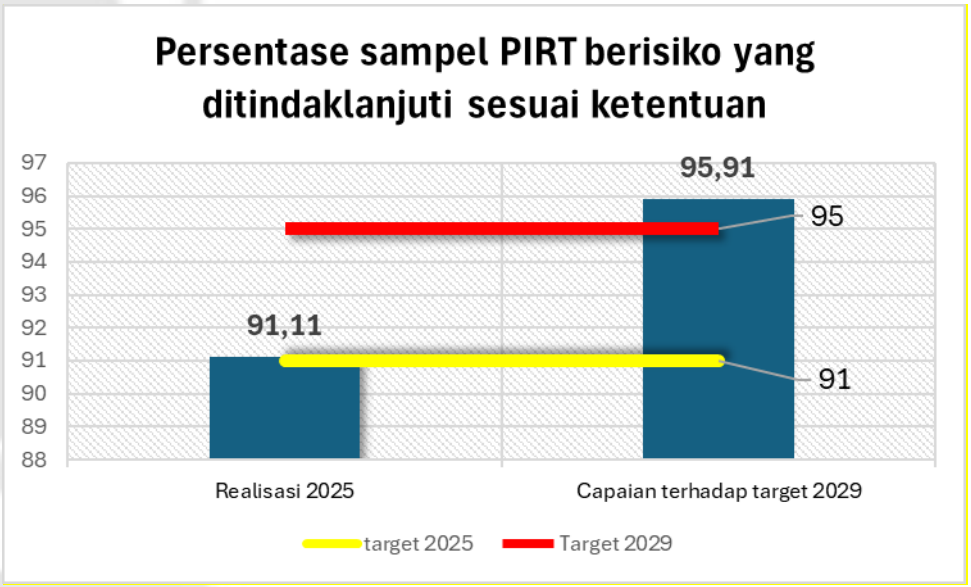
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA 2025 – 2029

Tabel 37. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

INDIKATOR	TARGET RENSTRA (2029) (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	91,11	95,91	Akan Tercapai

Realisasi *Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* pada Tahun 2025 sebesar 91,11% jika dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu Tahun 2029 yaitu 95,00%, dengan capaian 95,91% masuk ke dalam kriteria **"Akan tercapai".**

Gambar 62. Grafik capaian realisasi terhadap target jangka menengah

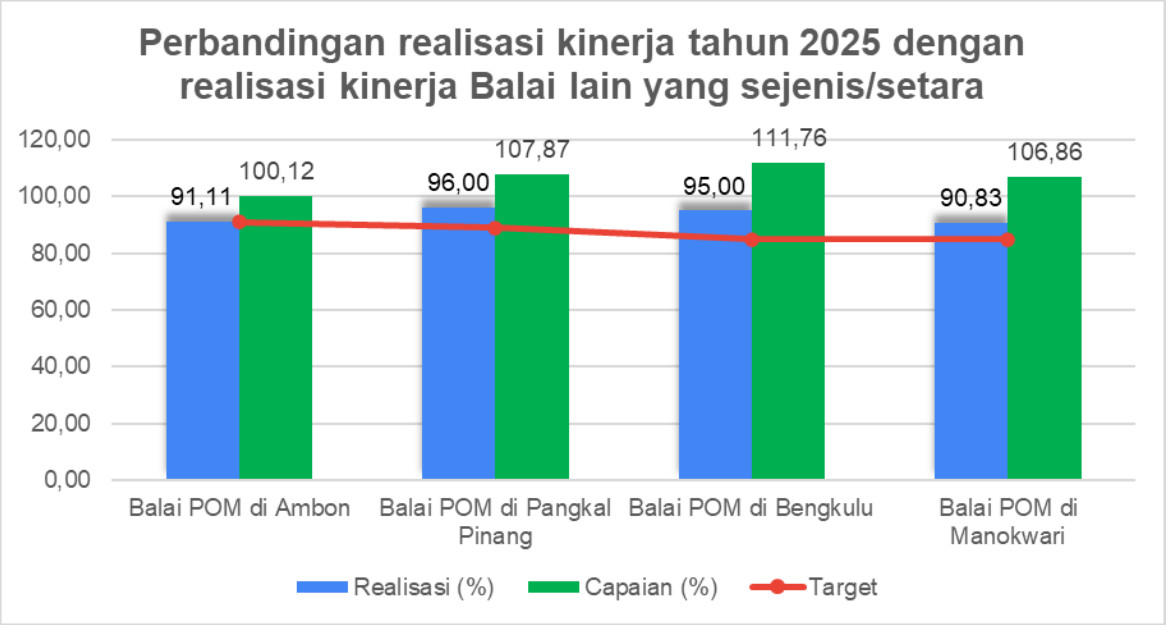


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

Tabel 38. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

UPT	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Balai POM di Ambon	91,00	91,11	100,12	Sangat Baik
Balai POM di Pangkal Pinang	89,00	96,00	107,87	Sangat Baik
Balai POM di Bengkulu	85,00	95,00	111,76	Tidak Dapat Disimpulkan
Balai POM di Manokwari	85,00	90,83	106,86	Sangat Baik



Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian *Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* pada tahun 2025 pada BPOM di Ambon, BPOM di Pangkal Pinang, dan BPOM di Manokwari dapat memenuhi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

target dengan kriteria "**Sangat Baik**", sedangkan Balai POM di Bengkulu dengan kriteria "**Tidak dapat disimpulkan**" karena capaian diatas 110%.

5. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

   Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 sebesar 91,11%, sehingga diperoleh capaian 100,12% dengan kategori "Sangat Baik". Penyebab kegagalan/keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

   a. Aspek kesesuaian target sampel sebesar 100%, menunjukkan bahwa fungsi pemeriksaan konsisten melaksanakan sampling berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai dengan ketentuan pedoman sampling, serta fungsi pengujian telah melaksanakan pengujian sesuai dengan tingkatannya. Kuantitas dan waktu pelaksanaan sampling telah sesuai dengan target sampel UPT berdasarkan Pedoman Sampling 2025 dan Rencana Pelaksanaan (Renlak) Sampling BPOM di Ambon. Berdasarkan tingkatannya, laboratorium BPOM di Ambon masuk dalam Tier 3 dan memiliki tugas dalam melakukan pengujian sampel PIRT dari BPOM di Ambon dan Loka POM di Kepulauan Tanimbar.
   b. Aspek kesesuaian parameter uji sebesar 55,56%, artinya hanya sebagian sampel PIRT diuji sesuai dengan ketentuan parameter uji wajib yang ditetapkan pada Pedoman Sampling dan Pengujian 2025. Ketidaksesuaian parameter uji tersebut disebabkan oleh petugas yang kurang cermat dalam memahami ketentuan minimal 3 parameter uji kimia dan minimal 1 parameter uji mikrobiologi, sehingga sebanyak 12 sampel PIRT hanya diuji parameter kimia prioritas saja, dengan jumlah kurang dari 3 parameter.
   c. Aspek ketepatan pengambilan kesimpulan sebesar 100%, menunjukkan adanya pemahaman yang baik dari petugas dalam melakukan pengambilan kesimpulan sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Aspek ketepatan waktu pengambilan sampel sebesar 100%, artinya petugas telah melaksanakan sampling sesuai dengan perencanaan waktu pada Renlak Sampling, dan dilaksanakan sesuai ketentuan yaitu sampai dengan triwulan II.
e. Aspek ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian sebesar 100%, menunjukkan bahwa seluruh hasil pemeriksaan dan pengujian sampel telah dilaporkan tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
f. Aspek tindak lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/Ketentuan lainnya sebesar 100%, menunjukkan bahwa BPOM di Ambon telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil pengujian yang tidak memenuhi syarat (TIE / Rusak / Kedaluwarsa / TMS Pengujian)

Realisasi dan capaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada BPOM di Ambon tahun 2025 sudah sangat baik, namun belum optimal pada aspek kesesuaian parameter uji. Rekomendasi upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan antara lain :

- Lebih cermat dalam memahami Pedoman Sampling dan Pengujian serta melakukan verifikasi berjenjang untuk meminimalisir kesalahan dalam penetapan parameter uji. Setelah Ketua Tim membuat Surat Perintah Kerja (SPK), hendaknya verifikator dan penguji juga melakukan pemeriksaan silang terhadap kesesuaian antara SPK dengan Pedoman Sampling dan Pengujian.
- Mengusulkan kepada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dan Pusdatin agar dilakukan automasi parameter uji sampel PIRT pada SIPT sehingga dapat mengurangi kesalahan penetapan parameter uji.
- Evaluasi kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pelaporan dan pemenuhan timeline pengujian sampel PIRT dilaksanakan secara rutin
- Melakukan *maintenance* peralatan laboratorium secara rutin dan monitoring ketersediaan reagensia, media, suku cadang, bahan habis pakai, serta sumber daya/kemampuan uji yang kompeten agar pengujian berjalan lancar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan menunjang komitmen BPOM di Ambon dalam melakukan pengujian sesuai persyaratan ISO/IEC 17025 : 2015 dan mendukung penerapan sistem manajemen mutu laboratorium uji.

- Rutin melakukan koordinasi dan monitoring antara fungsi pemeriksaan dan pengujian pada proses perencanaan, pengambilan, pemeriksaan, pengujian, pelaporan dan tindak lanjut sampel pangan olahan sesuai dengan ketentuan Pedoman Sampling

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang IKU Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah Pengujian laboratorium sampel makanan dan Pengadaan sampel makanan, selain itu melakukan intervensi ke sarana produksi pangan pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPPOB. Target pengadaan sampel makanan adalah 342 sampel, terdiri dari 291 sampel pangan olahan, 27 sampel PIRT dan 24 sampel *emerging issue*/pangan tertentu. Realisasi sampling PIRT sebesar 27 sampel atau 100%. Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BPOM di Ambon, juga dilakukan pengujian terhadap sampel dari Loka POM di Tanimbar, dan sampel regionalisasi parameter uji EG DEG, Sianida dan Okratoxin dari BBPOM di Makassar, BPOM di Kendari, BPOM di Mamuju, BPOM di Palopo dan BPOM di Bau-Bau. Hal ini mengakibatkan semakin banyak sampel yang harus diuji BBPOM di Surabaya sedangkan sarana prasarana sangat terbatas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSK 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Tahun 2025

Tabel 37. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,00	92,99	109,40	Sangat Baik

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder oleh Balai POM Ambon 92,99% sehingga capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder oleh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Balai POM Ambon pada Tahun 2025 adalah sebesar 109,40% dengan kriteria "**Sangat Baik**".

Pada tahun 2025, terdapat 478 rekomendasi yang diberikan ke pelaku usaha terdiri dari 45 sarana produksi, 268 sarana distribusi obat, 55 sarana distribusi kosmetik, dan 110 sarana distribusi pangan olahan. Dari rekomendasi tersebut yang telah ditindaklanjuti sebanyak 411 rekomendasi

Gambar 63. Total Rekomendasi yang ditindaklanjuti pelaku usaha



Dari lintas sektor, selama tahun 2026 terdapat 6 rekomendasi yang diberikan oleh Balai POM di Ambon, dan seluruhnya telah ditindaklanjuti.

Gambar 64. Total Rekomendasi yang ditindaklanjuti pelaku usaha



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 38. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
2024	-	-	-	-
2025	85,00	92,99	109,40	Sangat Baik

Indikator *Persentase* keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder merupakan indikator kinerja dengan perhitungan baru pada periode RENSTRA 2025 - 2029, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi serta capaian kinerja tahun sebelumnya.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA 2025 - 2029

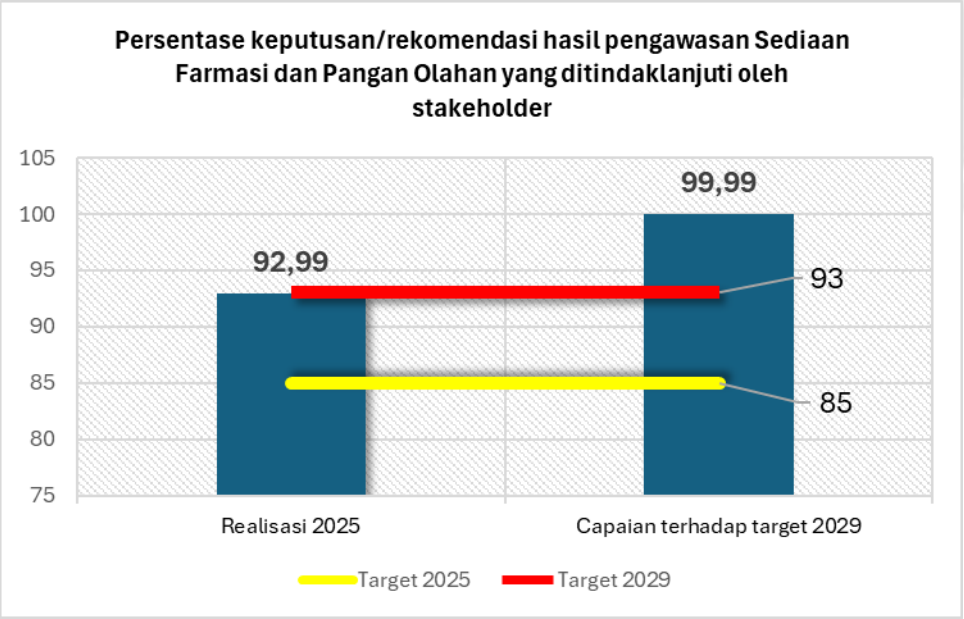
Tabel 39. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

INDIKATOR	TARGET RENSTRA (2029) (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,00	92,99	99,99	Akan Tercapai

Realisasi *Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder* pada Tahun 2025 sebesar 92,99 jika dibandingkan dengan target Tahun 2029 yaitu 93 dengan capaian 99,99% masuk ke dalam kriteria **"Akan Tercapai"**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 65. Grafik capaian realisasi terhadap target jangka menengah

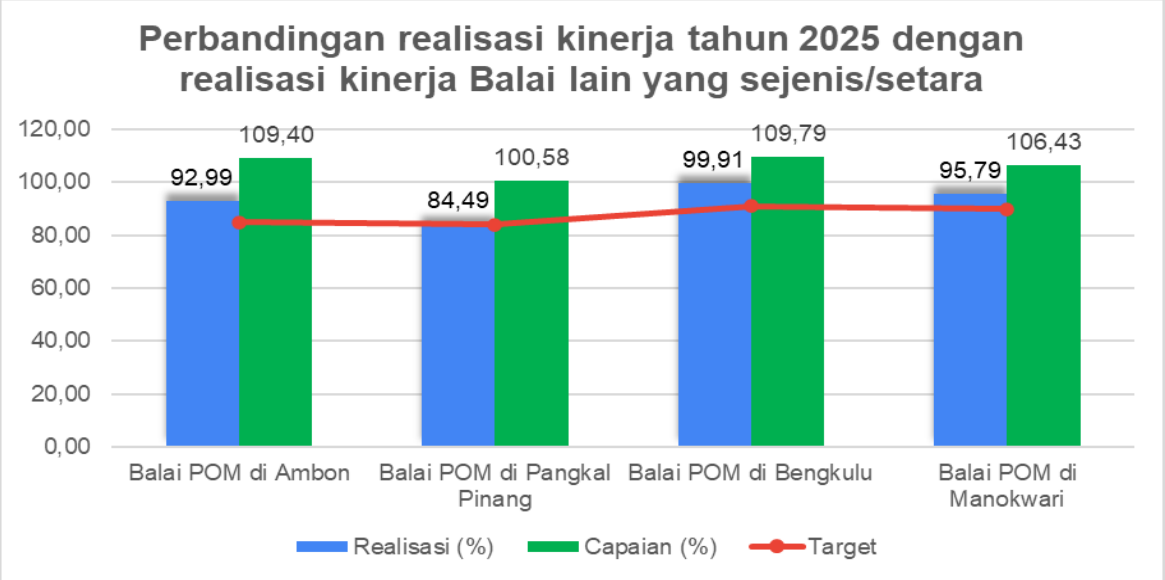


4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

Tabel 40. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

UPT	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Balai POM di Ambon	85,00	92,99	109,40	Sangat Baik
Balai POM di Pangkal Pinang	84,00	84,49	100,58	Sangat Baik
Balai POM di Bengkulu	91,00	99,91	109,79	Sangat Baik
Balai POM di Manokwari	90,00	95,79	106,43	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian *Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder* pada tahun 2025 pada BPOM di Ambon, BPOM di Pangkal Pinang, BPOM di Bengkulu, dan BPOM di Manokwari dapat memenuhi target dengan kriteria "**Sangat Baik**".

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor penyebab keberhasilan Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, antara lain:

- Terdapat 411 dari 478 (85,98%) pelaku usaha telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan;
- Terdapat 6 dari 6 (100%) lintas sektor telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan;
- Adanya basis data Keputusan/rekomendasi pengawasan kepada stakeholder sehingga memudahkan pemantauan oleh petugas;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Adanya regulasi yang mengikat (Peraturan BPOM, Peraturan Menteri Kesehatan) yang mewajibkan pelaku usaha atau instansi terkait untuk menindaklanjuti hasil pengawasan;
- Peningkatan koordinasi dan komunikasi aktif antara BPOM dan stakeholder (pemerintah daerah, pelaku usaha, dan asosiasi);
- Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi hasil pengawasan kepada stakeholder yang dilakukan secara intensif;
- Adanya sanksi administratif dan/atau pidana, sehingga meningkatkan komitmen dari pelaku usaha untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, antara lain:

- Bimbingan teknis kepada pelaku usaha melalui program DAK Non Fisik POM;
- Pemantauan penyelesaian CAPA dan desk CAPA yang dilakukan secara

IKSK 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

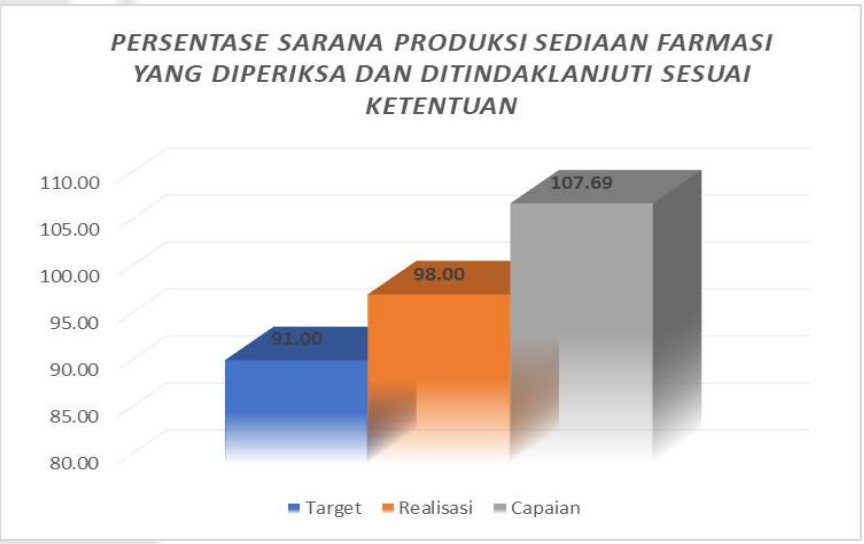
1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Tahun 2025

Tabel 41. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	98,00	107,69	Sangat Baik

Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 98,0% terhadap target 91,0%, sehingga capaian Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 adalah sebesar 107,69% dengan kriteria "**Sangat Baik.**"

Gambar 66. Grafik Capaian Persentase Sarana Produksi Tahun 2025



Realisasi persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW IV sebesar 98,0%, terdapat peningkatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dibandingkan realisasi pada TW III sebesar 97,50%, dengan capaian triwulan IV tahun 2025 sebesar 107,69%. Peningkatan realisasi tersebut disebabkan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi telah sesuai dengan target yang ditetapkan, pelaporan dilakukan tepat waktu, kesimpulan hasil pemeriksaan sarana yang tepat, serta penentuan kategori tindak lanjut telah sesuai dengan pedoman, yaitu 14 sarana dibandingkan target 14 sarana yang terdiri dari 13 sarana OBA dan 1 sarana kosmetik.

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 42. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
2024	-	-	-	-
2025	91,00	98,00	107,69	Sangat Baik

Indikator *Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* merupakan indikator kinerja dengan perhitungan baru pada periode RENSTRA 2025 - 2029, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi serta capaian kinerja tahun sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

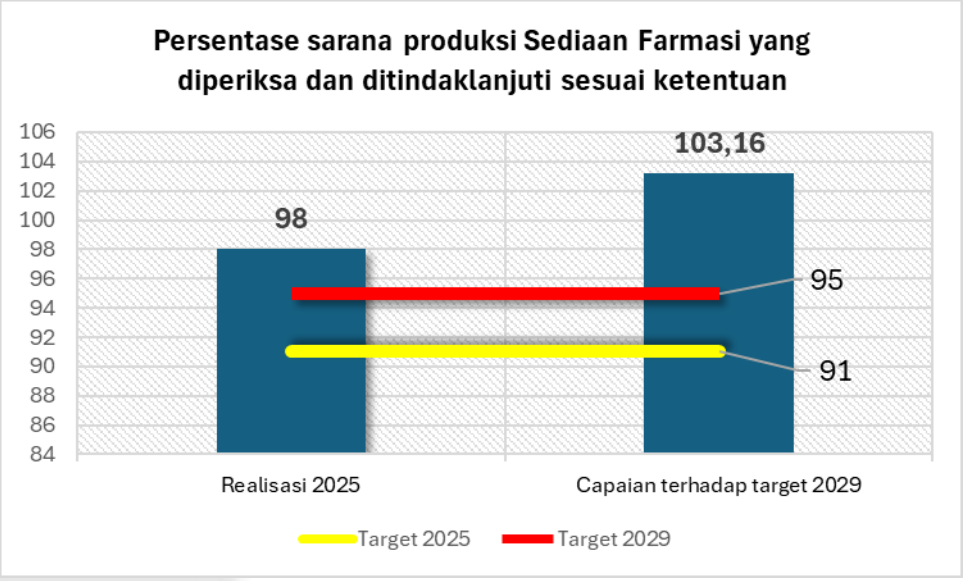
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA 2025 - 2029

Tabel 43. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

INDIKATOR	TARGET RENSTRA (2029) (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	98,00	103,16	▲ Tercapai / Melampaui

Realisasi *Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* pada Tahun 2025 sebesar 98,00 jika dibandingkan dengan target Tahun 2029 yaitu 95,00, dengan capaian 103,16% masuk ke dalam kriteria **"Tercapai / Melampaui"**

Gambar 67. Grafik capaian realisasi terhadap target jangka menengah

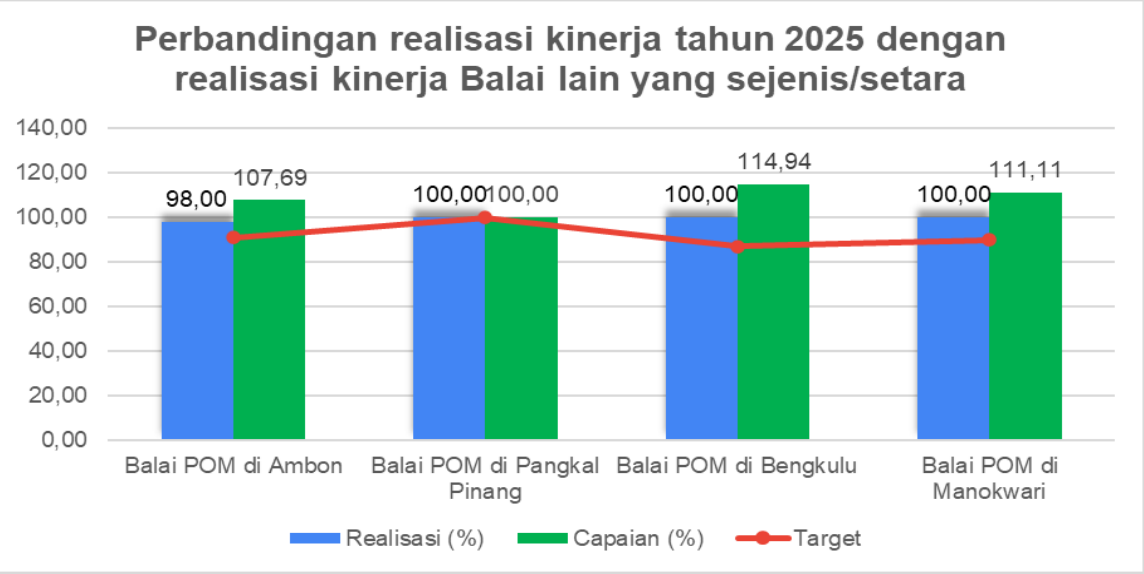


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

Tabel 44. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

UPT	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Balai POM di Ambon	91,00	98,00	107,69%	Sangat Baik
Balai POM di Pangkal Pinang	100	100	100%	Baik
Balai POM di Bengkulu	87,00	100	114,94%	Tidak Dapat Disimpulkan
Balai POM di Manokwari	90,00	100	111,11%	Tidak Dapat Disimpulkan



Berdasarkan gambaran pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 pada Balai POM di Ambon lebih baik dibandingkan ketiga balai lainnya, yaitu dengan capaian tahunan 107,69% kriteria **"sangat baik",** sedangkan capaian Balai POM di Pangkal Pinang 100,0%, kriteria **"Baik",** Balai POM di Bengkulu 114,94% dengan kriteria **"Tidak Dapat Disimpulkan",**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan capaian Balai POM di Manokwari 111,11% dengan kriteria **"Tidak Dapat Disimpulkan".** Hal ini menunjukkan bahwa penetapan target indikator persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan selama tahun 2025 telah sesuai dengan kriteria penetapan target serta telah konsisten mengawal komitmen pemenuhan persyaratan cara produksi yang baik oleh pelaku usaha dibandingkan dengan Balai POM di Pangkal Pinang, Balai POM di Bengkulu, dan Balai POM di Manokwari.

5. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

a. Pemenuhan target pemeriksaan sarana terhadap target sarana yang diperiksa yang mencapai 100%, yaitu 14 sarana diperiksa sesuai waktu yang ditetapkan berbanding 14 sarana yang ditargetkan;
b. Realisasi hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan telah sesuai dengan rencana / target pemeriksaan sarana yang ditetapkan;
c. Pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan timeline pelaporan yang ditetapkan;
d. Akurasi pengambilan kesimpulan hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan oleh petugas pemeriksa sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku;
e. Kesesuaian pengkategorian tindak lanjut dan ketepatan waktu sesuai dengan standar yang ditetapkan.

6. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

a. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses pelaksanaan kegiatan, pelaporan, pengambilan keputusan, tindak lanjut pengawasan dan waktu pelaksanaan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Bimbingan dan pembinaan yang dilakukan secara konsisten selama proses inpseksi maupun dalam proses perbaikan hasil pemeriksaan kepada sarana yang diperiksa.

IKSK 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1) Ketepatan waktu tindak lanjut
2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Tahun 2025

Tabel 45. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

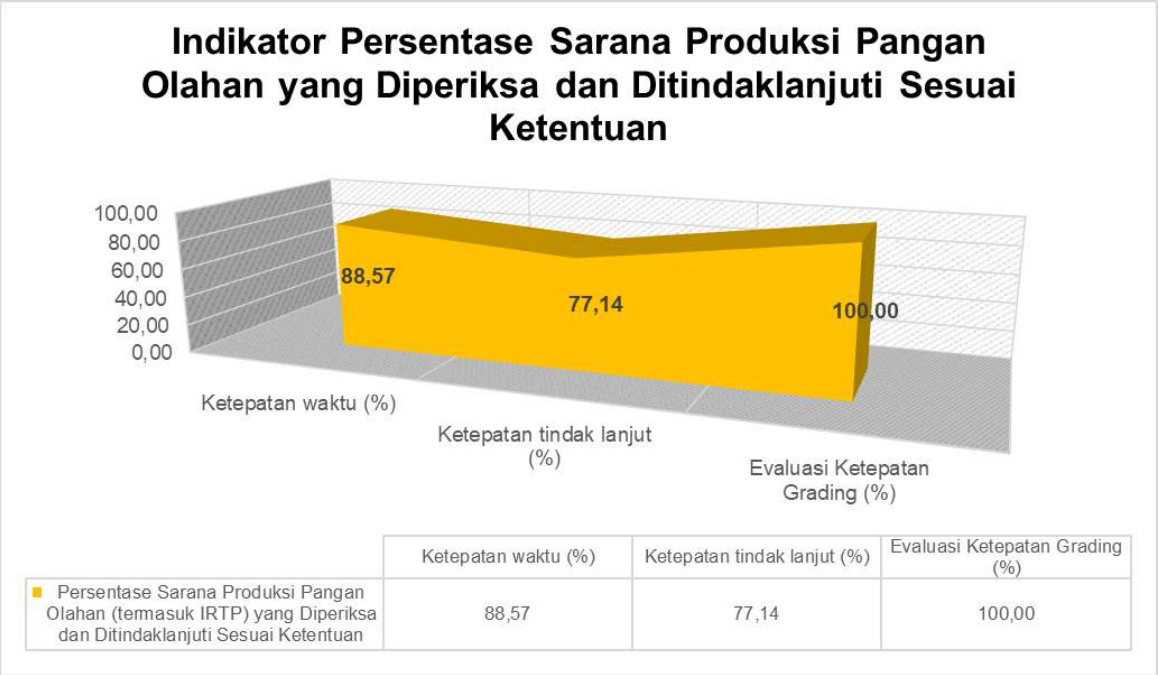
INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	88,57	104,20	Sangat Baik

Pada tahun 2025 target yang ditetapkan sebesar 85,0%. Realisasi Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tri wilan IV sebesar 88,57%, sehingga capaian persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar **104,20 %** dengan kriteria "**sangat baik**". Jumlah sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebanyak 35 sampai dengan triwulan IV tahun 2025.

Terdapat 3 aspek yang digunakan dalam perhitungan Jumlah sarana produksi pangan olahan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu pada persentase ketepatan waktu 88,57, persentase ketepatan tindak lanjut 77,14, dan evaluasi ketepatan grading 100 sehingga realisasi pada Balai POM di Ambon tahun 2025 sebesar 88,57

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 68. Aspek pengukuran indikator Persentase Sarana Produksi yang diperiksa dan ditindaklanjuti



	Ketepatan waktu (%)	Ketepatan tindak lanjut (%)	Evaluasi Ketepatan Grading (%)
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	88,57	77,14	100,00

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 46. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
2024	-	-	-	-
2025	85,00	88,57	104,20	Sangat Baik

Indikator *Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* merupakan indikator kinerja dengan perhitungan dan manual IKU baru pada periode RENSTRA 2025 - 2029, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi serta capaian kinerja tahun sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

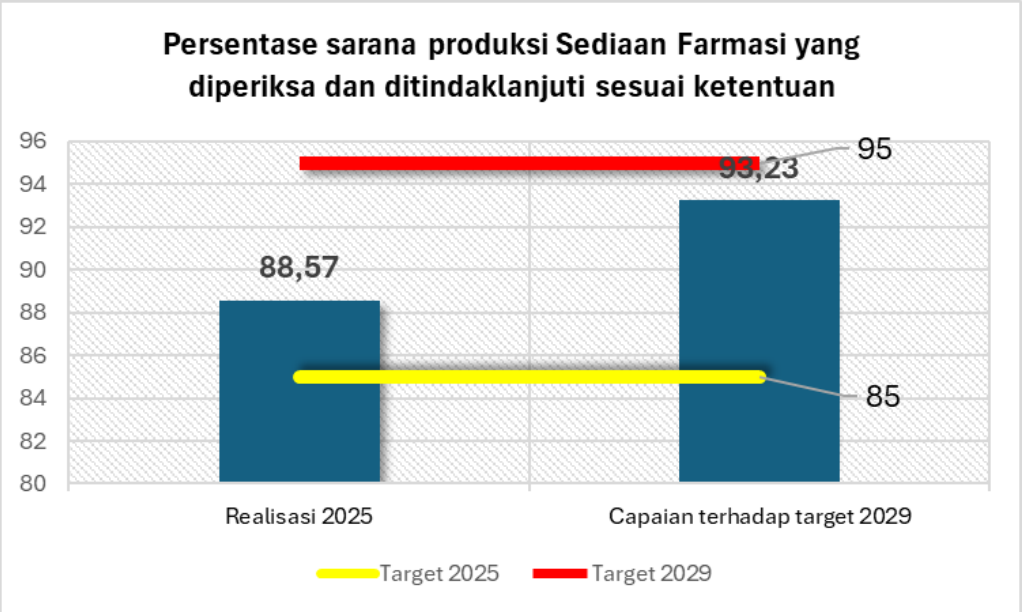
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA 2025 - 2029

Tabel 47. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

INDIKATOR	TARGET RENSTRA (2029) (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	88,57	93,23	Akan Tercapai

Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 sebesar 88,57 jika dibandingkan dengan target Tahun 2029 yaitu 95,00%, dengan capaian yang belum mencapai 100 yaitu 93,23% masuk ke dalam kriteria **"Akan Tercapai".**

Gambar 69. Grafik capaian realisasi terhadap target jangka menengah

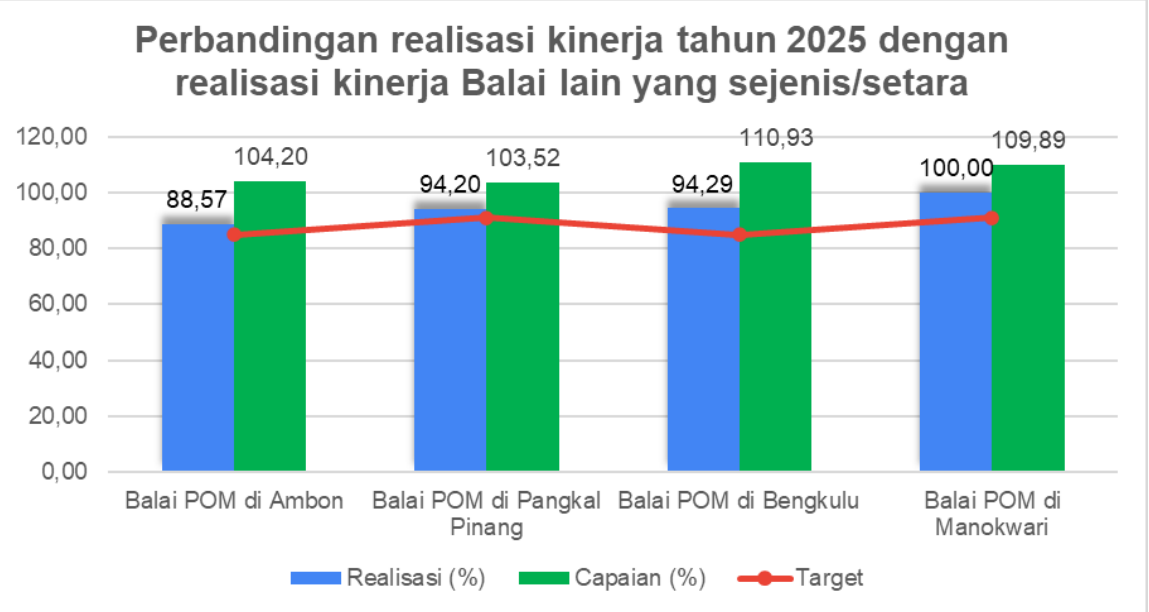


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

Tabel 48. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

UPT	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Balai POM di Ambon	85,00	88,57	104,20%	Sangat Baik
Balai POM di Pangkal Pinang	91,00	94,20	103,52%	Sangat Baik
Balai POM di Bengkulu	85,00	94,29	110,93%	Tidak Dapat Disimpulkan
Balai POM di Manokwari	91,00	100	109,89%	Sangat Baik



Berdasarkan gambaran pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 pada empat Balai POM mencapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

target yaitu pada Balai POM di Ambon, Balai POM di Pangkal Pinang, dan Balai POM di Manokwari memiliki kriteria pencapaian **"Sangat Baik"**, dan Balai POM di Bengkulu kriteria **"Tidak Dapat Disimpulkan".** Hal ini menunjukkan bahwa penetapan target indikator persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan selama tahun 2025 telah sesuai dengan kriteria penetapan target serta telah konsisten mengawal komitmen pemenuhan persyaratan cara produksi yang baik oleh pelaku usaha pada empat Balai POM.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

a. Pemenuhan target pemeriksaan sarana secara tepat waktu terhadap target sarana yang diperiksa (88,57%), yaitu 31 sarana diperiksa sesuai waktu yang ditetapkan berbanding 35 sarana yang telah diperiksa;
b. Kesesuaian pengkategorian tindak lanjut dan ketepatan waktu sesuai dengan standar/pedoman yang ditetapkan;
c. Akurasi pengambilan kesimpulan hasil pemeriksaan sarana sesuai dengan grading sarana dengan mengacu pada pedoman pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang mencapai 100%.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

a. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses pelaksanaan kegiatan, pengambilan keputusan, tindak lanjut pengawasan, dan waktu pelaksanaan.
b. Bimbingan dan pembinaan yang dilakukan secara konsisten selama proses inspeksi maupun dalam proses perbaikan hasil pemeriksaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Sosialisasi / Diseminasi berkala yang dilakukan oleh Pusat dan Balai dalam peningkatan pemahaman dan kapasitas dari pelaku usaha.

IKSK 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Tahun 2025

Tabel 49. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,00	99,50	105,85%	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 99,50% dari target tahun 2025 yaitu 94,00%. Sehingga capaian Tahun 2025 sebesar 105,85% dengan kriteria "**Sangat Baik**".

Berdasarkan realisasi per komoditi, pada persentase sarana distribusi kosmetik senilai 101, 28, pada sarana distribusi SK senilai 100, sarana distribusi OBA 101,04, dan sarana distribusi Obat 96,18

Gambar 70. Persentase sarana distribusi sediaan farmasi per komoditi



2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 50. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
2024	-	-	-	-
2025	94,00	99,50	105,85%	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator *Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* merupakan indikator kinerja dengan perhitungan dan manual IKU baru pada periode RENSTRA 2025 - 2029, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi serta capaian kinerja tahun sebelumnya.

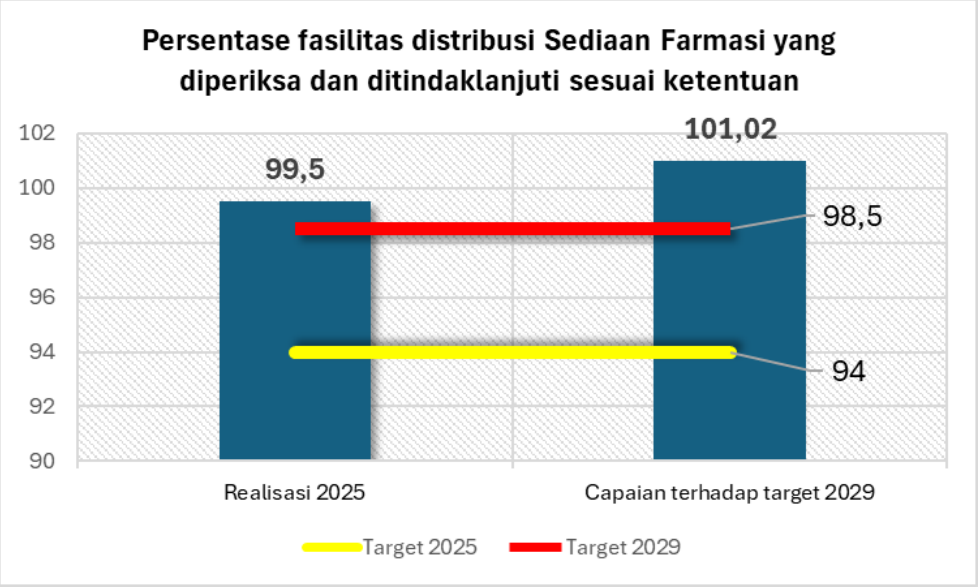
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA 2025 – 2029

Tabel 51. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

INDIKATOR	TARGET RENSTRA (2029) (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,50	99,50	101,02	▲ Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 sebesar 99,50 jika dibandingkan dengan target Tahun 2029 yaitu 98,50, dengan capaian 101,02% masuk ke dalam kriteria **"Tercapai/ Melampaui".**

Gambar 71. Grafik capaian realisasi terhadap target jangka menengah

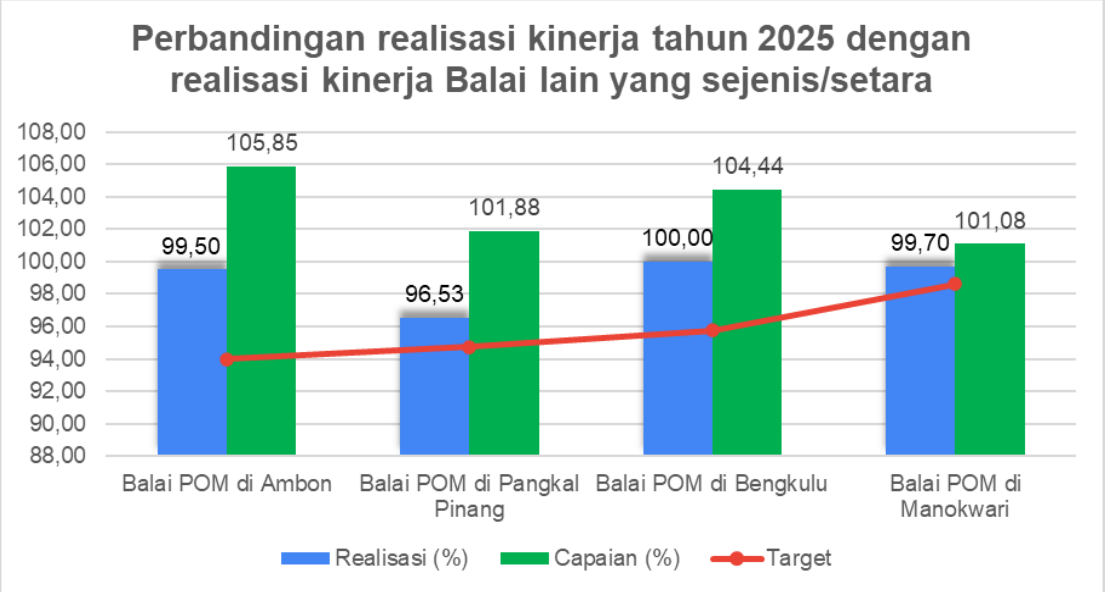


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

Tabel 52. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

UPT	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Balai POM di Ambon	85,00	88,57	104,20%	Sangat Baik
Balai POM di Pangkal Pinang	91,00	94,20	103,52%	Sangat Baik
Balai POM di Bengkulu	85,00	94,29	110,93%	Tidak Dapat Disimpulkan
Balai POM di Manokwari	91,00	100	109,89%	Sangat Baik



Realisasi indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 pada BPOM di Ambon, BPOM di Pangkal Pinang, BPOM di Bengkulu, dan BPOM di Manokwari, seluruhnya memenuhi kriteria capaiannya “Sangat Baik” karena berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor penyebab keberhasilan kinerja, antara lain:

1. Terdapat 275 dari target 268 (102,61%) sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang diperiksa tahun 2025;
2. Terdapat 254 dari target 275 (92,36%) sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di tahun 2025;
3. Adanya standar operasional prosedur (SOP) pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan sehingga menjadikan pelaksanaan pemeriksaan lebih terstruktur.
4. Pemeriksaan dilakukan sesuai rencana tahunan dengan pendekatan berbasis risiko, memprioritaskan fasilitas yang paling berpotensi menyimpang.
5. Kompetensi petugas pemeriksaan yang secara bertahap sesuai dengan yang diharapkan dalam pedoman pengawasan.
6. Penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) untuk mempermudah pengelolaan data, pelaporan, dan tindak lanjut.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, antara lain:

- Bimbingan teknis kepada pelaku usaha dalam rangka pengelolaan DAK NF POM yang sudah dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di wilayah kerja Balai POM di Ambon.
- Peningkatan kompetensi petugas dalam bentuk pelatihan terstruktur sesuai tingkat kesulitan pemeriksaan sarana.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSK 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahun 2025

Tabel 53. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,00	95,10	106,85	Sangat Baik

Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Balai POM Ambon 95,10 Sehingga capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Balai POM Ambon pada Tahun 2025 adalah sebesar 106,85 dengan kriteria "**Sangat Baik**".

Realisasi pada Balai POM di Ambon didasarkan pada beberapa aspek yaitu:

- Pemenuhan target sarana yang diperiksa (Bobot 20%)

  Terdapat 298 jumlah sarana yang diperiksa terhadap 289 Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak

- Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)

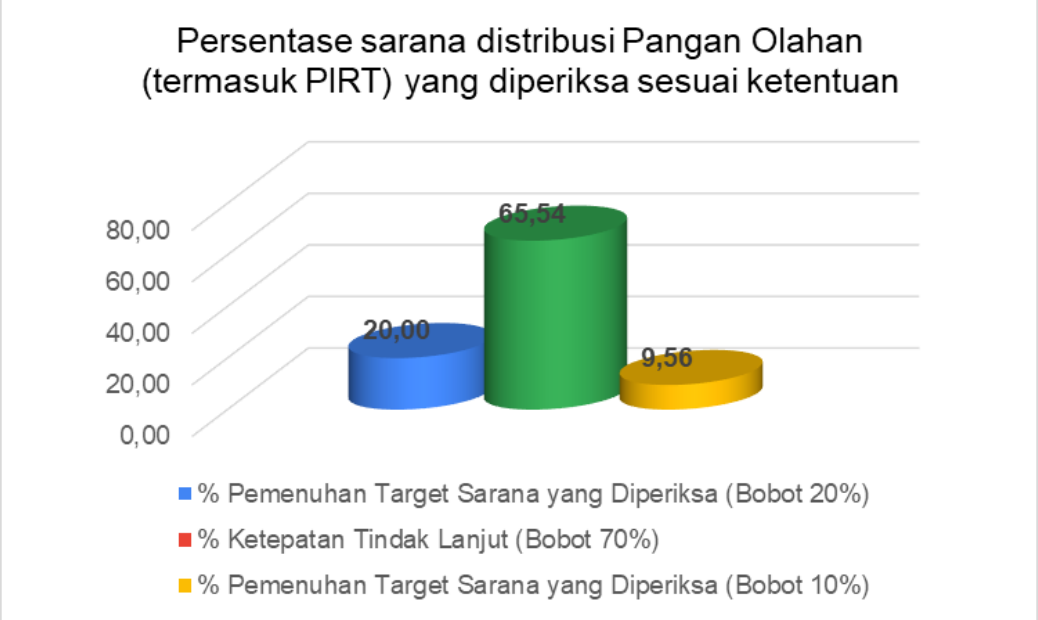
  Terdapat 279 Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan terhadap 298 jumlah sarana yang diperiksa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)

  Terdapat 285 Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu terhadap 298 jumlah sarana yang diperiksa

Gambar 72. Grafik pemenuhan Sarana distribusi pangan olahan tiap aspek



2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 54. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
2024	-	-	-	-
2025	89,00	95,10	106,85	Sangat Baik

Indikator *Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* merupakan indikator kinerja dengan perhitungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan manual IKU baru pada periode RENSTRA 2025 - 2029, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi serta capaian kinerja tahun sebelumnya.

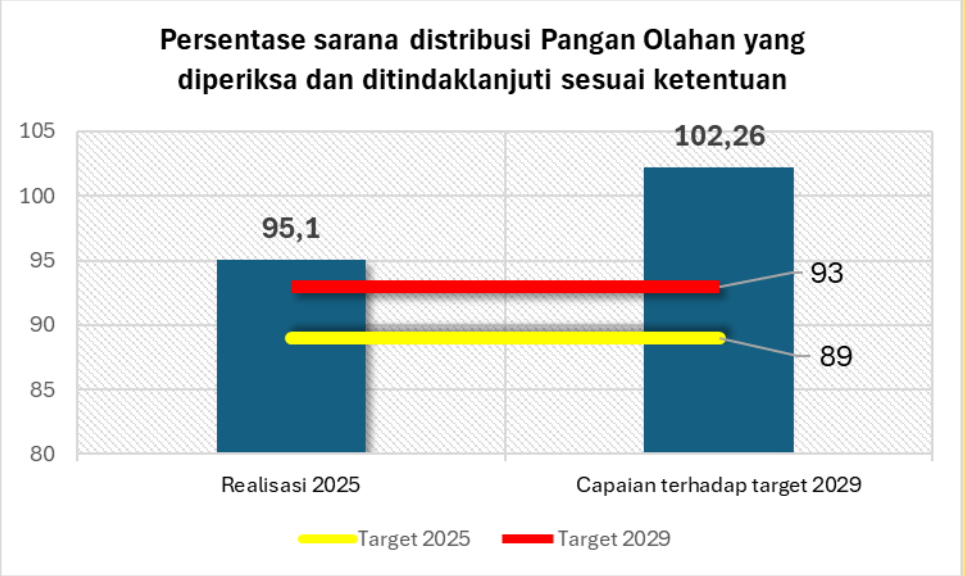
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA 2025 – 2029

Tabel 55. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

INDIKATOR	TARGET RENSTRA (2029) (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,00	95,10	102,26	Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 sebesar 95,10 jika dibandingkan dengan target Tahun 2029 yaitu 93,00 dengan capaian 102,26% masuk ke dalam kriteria **"Tercapai/ Melampaui"**

Gambar 73. Grafik capaian realisasi terhadap target jangka menengah

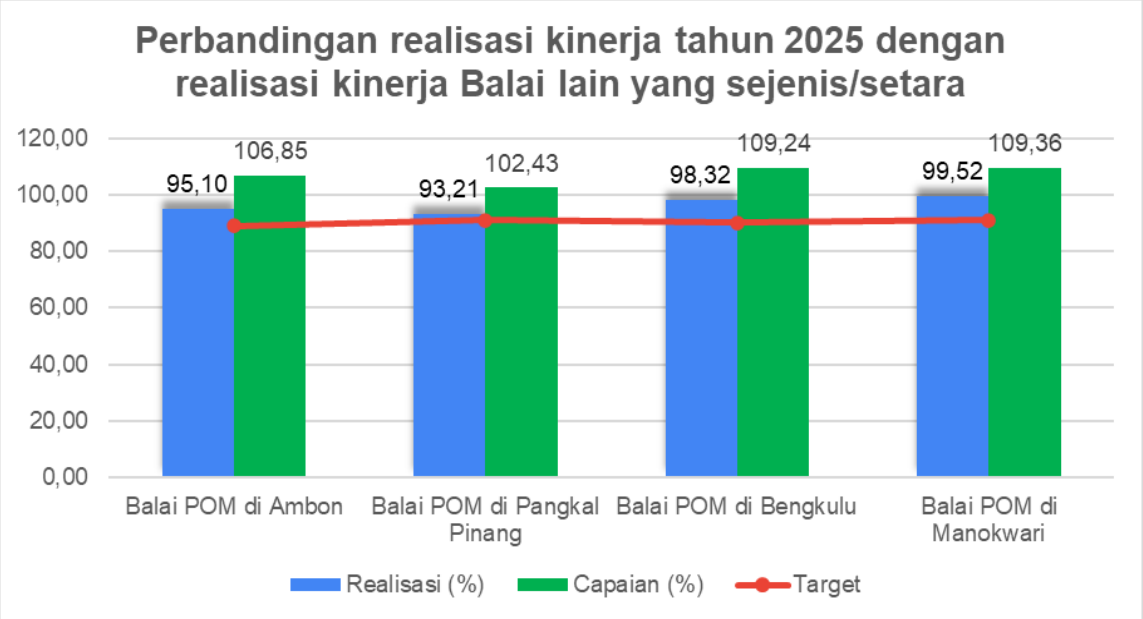


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

Tabel 55. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

UPT	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Balai POM di Ambon	89,00	95,10	106,85%	Sangat Baik
Balai POM di Pangkal Pinang	91,00	93,21	102,43%	Sangat Baik
Balai POM di Bengkulu	90,00	98,32	109,24%	Sangat Baik
Balai POM di Manokwari	91,00	99,52	109,36%	Sangat Baik



Realisasi indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 pada BPOM di Ambon, BPOM di Pangkal Pinang, BPOM di Bengkulu, dan BPOM di Manokwari,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

seluruhnya memenuhi kriteria capaiannya “Sangat Baik” karena berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

5. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

   Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

   - Kesesuaian kualitas pemeriksaan sarana dan ketepatan waktu pelaporan melalui sistem informasi pelaporan terpadu (SIPT)
   - Akurasi pengambilan kesimpulan hasil pemeriksaan sarana yang dilakukan oleh petugas berdasarkan rating sarana dan sesuai dengan pedoman standar yang berlaku
   - Kesesuaian pengkategorian tindak lanjut dan ketepatan waktu sesuai dengan standar yang ditetapkan
   - Pemeriksaan dilakukan sesuai rencana tahunan dengan pendekatan berbasis risiko, memprioritaskan fasilitas yang paling berpotensi menyimpang
   - pemeriksaan sarana distribusi pangan lebih tersetruktur dan telah terlaksana di 9 kab/kota

6. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

   - Sebaran persentase target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dilakukan di 9 kab/kota berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan berdasarkan analisa kajian risiko
   - monitoring dan evaluasi berjenjang dari setiap laporan yang ditetapkan sesuai dengan pedoman tindak lanjut pengawasan pangan
   - monitoring dan evaluasi serta refreshmant kompetensi petugas dalam penetapan kriteria sanksi serta tindaklanjut hasil pemeriksaan
   - konsistensi pelaksanaan evaluasi tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSK 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara perhitungan pada indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah:

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E) / 5

Keterangan:

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan
B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan
C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan
D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan
E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Tahun 2025

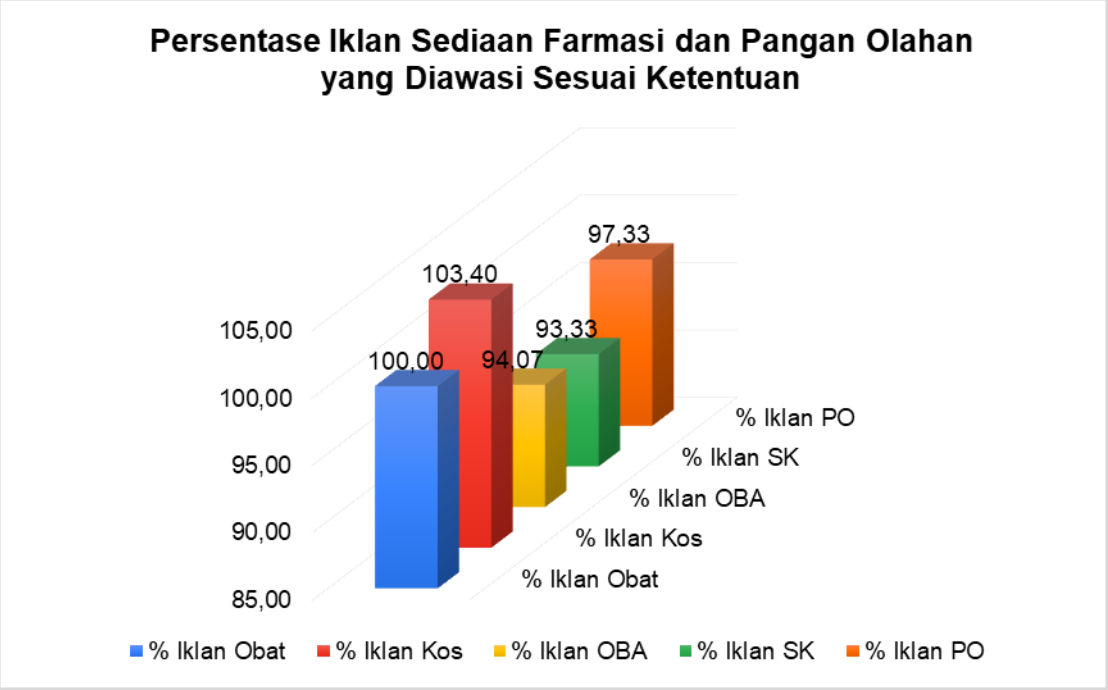
Tabel 56. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,06	97,63	104,91	Sangat Baik

Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan oleh Balai POM Ambon 97,63% Sehingga capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan oleh Balai POM Ambon pada Tahun 2025 adalah sebesar 104,91% dengan kriteria "**Sangat Baik**".

Berdasarkan realisasi per komoditi pada persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, ditampilkan pada grafik berikut:

Gambar 74. Persentase Iklan per komoditi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 57. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
2024	-	-	-	-
2025	93,06	97,63	104,91	Sangat Baik

Indikator *Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan* merupakan indikator kinerja dengan perhitungan dan manual IKU baru pada periode RENSTRA 2025 - 2029, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi serta capaian kinerja tahun sebelumnya.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA 2025 – 2029

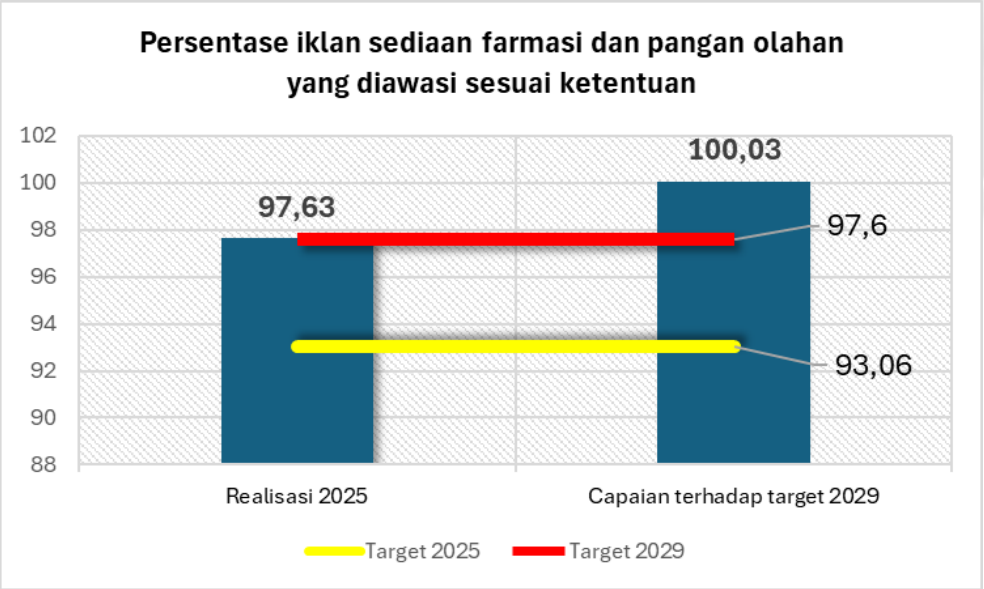
Tabel 58. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

INDIKATOR	TARGET RENSTRA (2029) (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	97,60	97,63	100,03	Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Tahun 2025 sebesar 97,63 jika dibandingkan dengan target Tahun 2029 yaitu 97,60 dengan capaian 100,03% masuk ke dalam kriteria **“Tercapai/ Melampaui”.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 75. Grafik capaian realisasi terhadap target jangka menengah

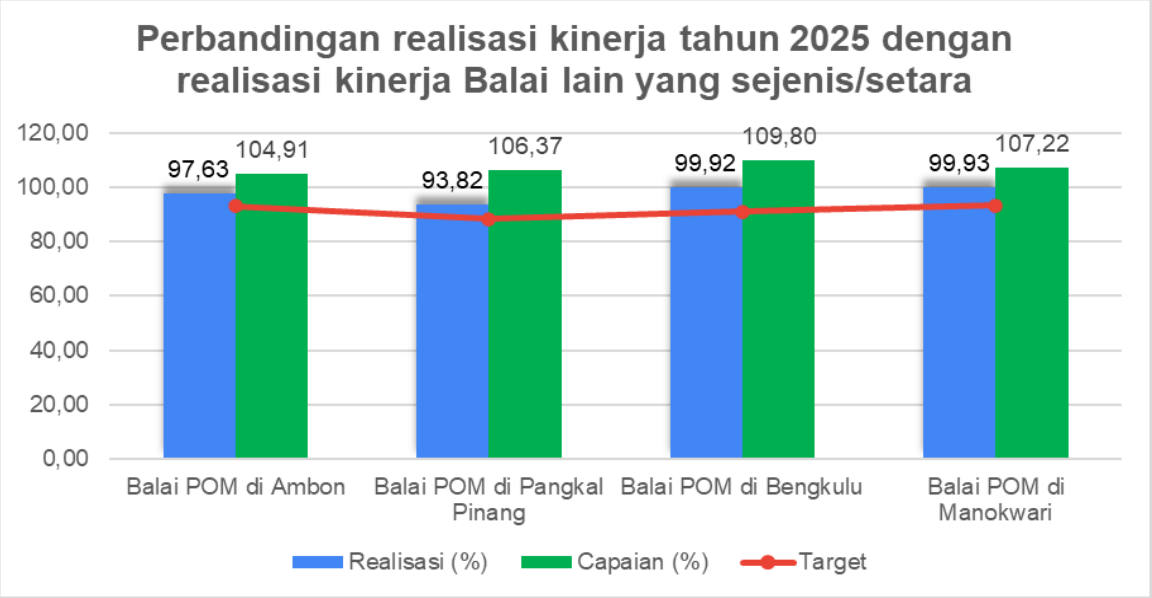


4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

Tabel 59. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

UPT	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Balai POM di Ambon	93,06	97,63	104,91%	Sangat Baik
Balai POM di Pangkal Pinang	88,20	93,82	106,37%	Sangat Baik
Balai POM di Bengkulu	91,00	99,92	109,80%	Sangat Baik
Balai POM di Manokwari	93,20	99,93	107,22%	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Realisasi indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 pada BPOM di Ambon, BPOM di Pangkal Pinang, BPOM di Bengkulu, dan BPOM di Manokwari, seluruhnya memenuhi kriteria capaiannya “Sangat Baik” karena berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pelaksanaan pengawasan iklan di wilayah provinsi maluku telah sesuai juknis dan POA

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

1. Melakukan penyesuaian proporsi jenis media iklan pangan olahan setiap bulan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Mengajukan penyesuaian target persentase pengawasan media iklan tiap komoditi pada tahun 2025
3. konsistensi monitoring dan evaluasi iklan secara berkala

IKSK 12. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan

Pendampingan yang dilakukan meliputi:

1. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
2. Mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
3. Mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM

Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Untuk cara perhitungan pada indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\frac{\textit{Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman}}{\textit{Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT}} \textbf{ X 100\%}$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Tahun 2025

Tabel 60. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman	11,11	11,11	100,00	Baik

Realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman 11,11 Sehingga capaian Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 adalah sebesar 100% dengan kriteria "**Baik**".

Pada tahun 2025, pelaksanaan pendampingan Kab/Kota Pangan aman di wilayah pengawasan Balai POM Ambon dilaksanakan pada 1 Kab/Kota yaitu di kota Ambon dari 9 Kab/Kota di wilayah Maluku. Hal ini sejalan dengan target Balai POM di Ambon pada tahun 2025 yaitu 1 Kab/Kota.

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 61. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
2024	-	-	-	-
2025	11,11	11,11	100,00	Baik

Indikator *Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman* merupakan indikator kinerja dengan perhitungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan manual IKU baru pada periode RENSTRA 2025 - 2029, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi serta capaian kinerja tahun sebelumnya.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA 2025 – 2029

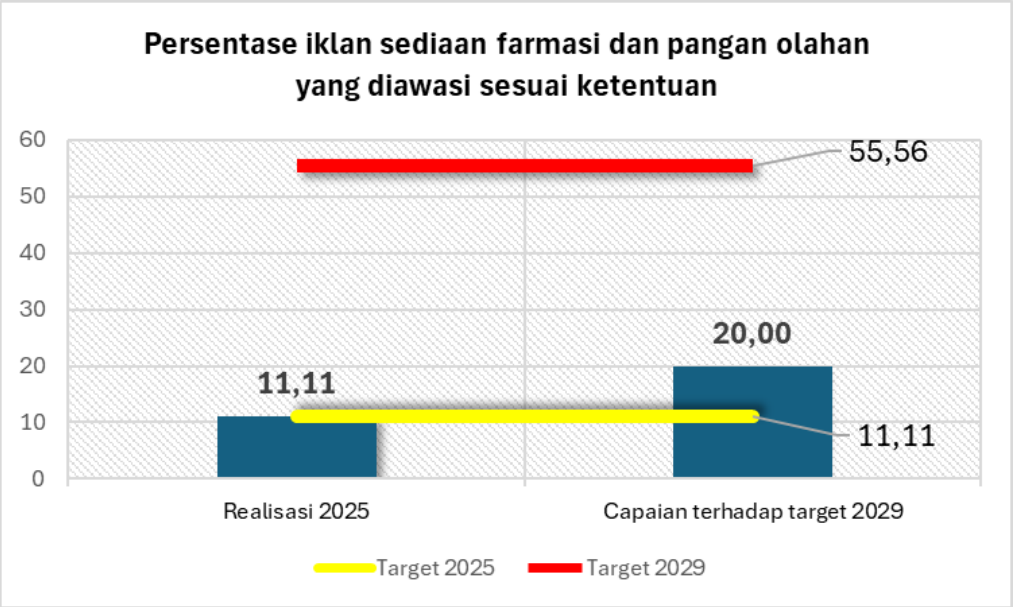
Tabel 62. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

INDIKATOR	TARGET RENSTRA (2029) (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman	55,56	11,11	20,00	Perlu Upaya Keras

Realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan amanq pada Tahun 2025 sebesar 11,11 jika dibandingkan dengan target Tahun 2029 yaitu 55,56, dengan capaian 20,00% masuk ke dalam kriteria **“Perlu Upaya Keras”** hal ini dikarenakan pada tahun 2025 hanya terdapat 1 target kabupaten / kota yang didampingi oleh Balai POM di Ambon pada wilayah Provinsi maluku dibanding target jangka menengah RENSTRA yaitu 5 Kabupaten / Kota, Namun progres pelaksanaan pendampingan pada seluruh target kabupaten / kota tetap dijalankan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 76. Grafik capaian realisasi terhadap target jangka menengah

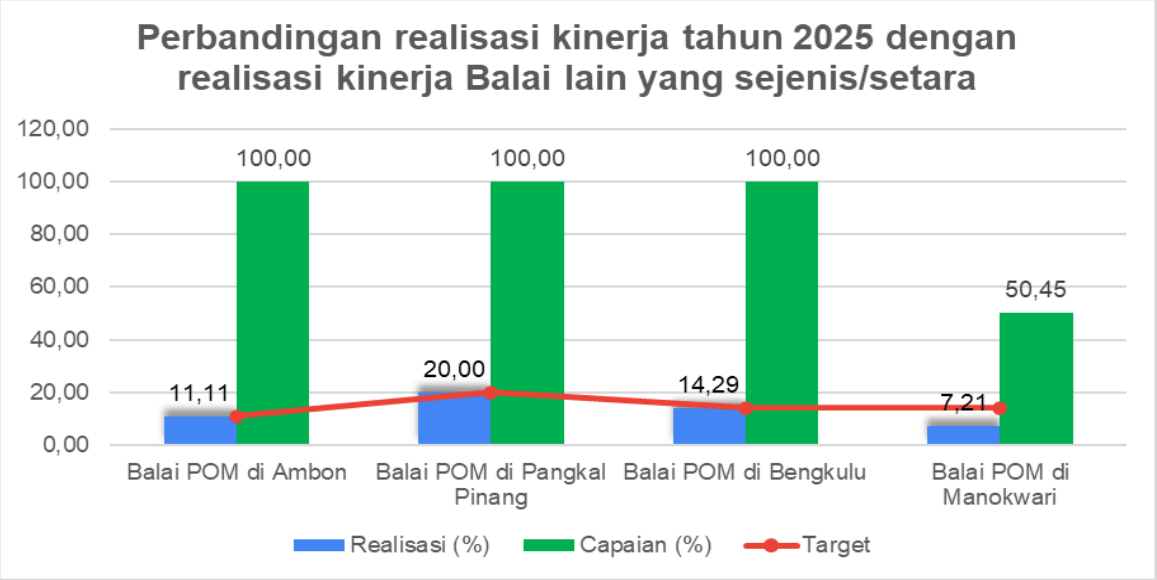


4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

Tabel 63. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

UPT	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Balai POM di Ambon	11,11	11,11	100%	Baik
Balai POM di Pangkal Pinang	20,00	20,00	100%	Baik
Balai POM di Bengkulu	14,29	14,29	100%	Baik
Balai POM di Manokwari	14,29	7,21	50,45%	Kurang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Realisasi indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman Tahun 2025 pada BPOM di Ambon, BPOM di Pangkal Pinang, dan BPOM di Bengkulu telah dilaksanakan sesuai dengan target dengan kriteria capaiannya “Baik”, namun pada Balai POM di Manokwari belum mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 1 kabupaten capaian 50,45% kriteria “Kurang”

5. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

   Pembentukan PIC pada masing – masing kabupaten / kota yang dibentuk oleh Balai POM di Ambon sehingga dilakukan pemantauan terhadap progress masing – masing kabupaten

6. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

   Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder khususnya OPD di masing – masing kabupaten untuk percepatan proses.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSK 13. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik Adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor). Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan

berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Tahun 2025

Tabel 64. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00	91,00	100,00	Baik

Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar oleh Balai POM Ambon 95,83% Sehingga capaian Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar oleh Balai POM Ambon pada Tahun 2025 adalah sebesar 105,31% dengan kriteria "**Sangat Baik**".

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 65. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
2024	-	-	-	-
2025	91,00	91,00	100,00	Baik

Indikator *Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar* merupakan indikator kinerja dengan perhitungan dan manual IKU baru pada periode RENSTRA 2025 - 2029, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi serta capaian kinerja tahun sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

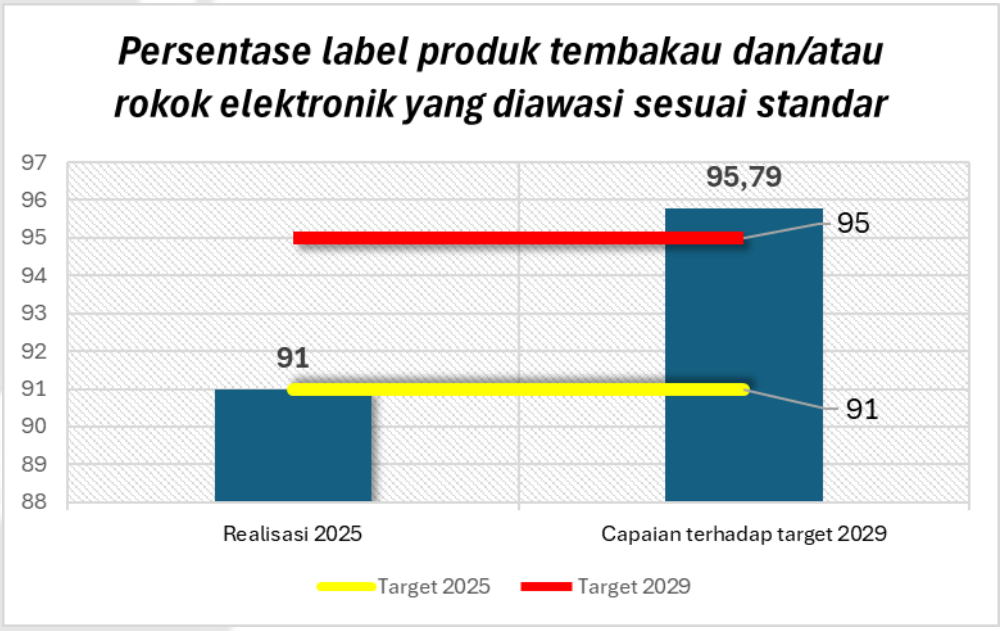
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA 2025 – 2029

Tabel 66. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

INDIKATOR	TARGET RENSTRA (2029) (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	95,00	91,00	95,79	Akan Tercapai

Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada Tahun 2025 sebesar 91,00 jika dibandingkan dengan target Tahun 2029 yaitu 95,00, dengan capaian 95,79% masuk ke dalam kriteria **"Akan Tercapai".**

Gambar 77. Grafik capaian realisasi terhadap target jangka menengah

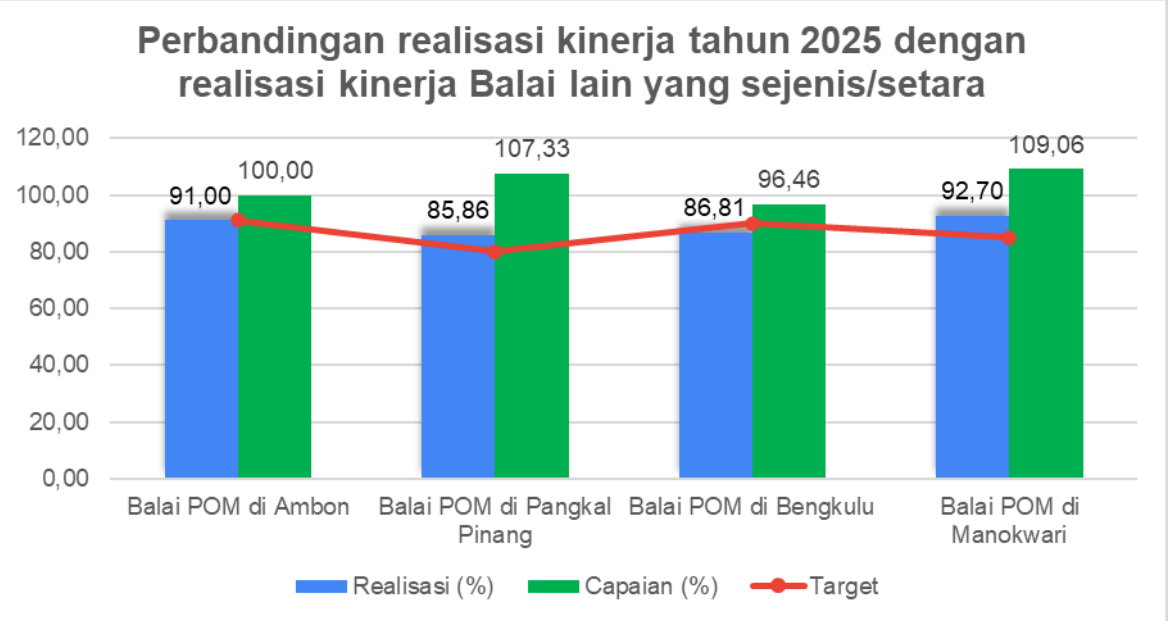


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

Tabel 67. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

UPT	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Balai POM di Ambon	91,00	91,00	100,00%	Baik
Balai POM di Pangkal Pinang	80,00	85,86	107,33%	Sangat Baik
Balai POM di Bengkulu	90,00	86,81	96,46%	Baik
Balai POM di Manokwari	85,00	92,70	109,06%	Sangat Baik



Realisasi indikator kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025 pada BPOM di Ambon, BPOM di Pangkal Pinang, BPOM di Bengkulu, dan BPOM di Manokwari, hanya BPOM di Ambon dan BPOM di Pangkal Pinang yang memenuhi kriteria capaian “Sangat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Baik" karena berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Untuk BPOM di Bengkulu memenuhi kriteria capaian "Baik" karena capaian 90-100%, dan BPOM di Manokwari kriteria capaiannya "Tidak Dapat Disimpulkan" karena melebihi 110%.

5. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

   Faktor penyebab keberhasilan kinerja, antara lain:

   - Terdapat 144 dari target 144 (100%) label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada tahun 2025;
   - Terdapat 132 dari target 144 (91,67%) label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu pada tahun 2025;
   - Tersedianya standar operasional prosedur (SOP Mikro) pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sehingga menjadikan pelaksanaan pengawasan lebih terstruktur;
   - Pengawasan dilakukan sesuai rencana tahunan yang sudah disusun di awal tahun;
   - Kompetensi petugas yang memadai dalam melakukan evaluasi label sesuai ketentuan;
   - Penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) untuk mempermudah pengelolaan data dan pelaporan.

6. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

   Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, antara lain:

   - Peningkatan kompetensi petugas dalam bentuk sosialisasi dan pertemuan (Forum Komunikasi Pengawasan Tembakau dan Rokok Elektronik)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSK 14. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
2) Pelaksanaan Bimtek (B)
3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" yaitu:

Capaian UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).

(A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotic terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.

2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).

(B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).

(C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).

(D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Tahun 2025

Tabel 68. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon	100,00	103,96	103,96%	Sangat Baik

Realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Balai POM di Ambon sebesar 100,95% sehingga capaian Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Balai POM di Ambon pada Tahun 2025 adalah sebesar 100,95% dengan kriteria "**Sangat Baik**".

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 69. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
2024	-	-	-	-
2025	100,00	103,96	103,96%	Sangat Baik

Indikator *Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon* merupakan indikator kinerja dengan perhitungan dan manual IKU baru

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pada periode RENSTRA 2025 - 2029, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi serta capaian kinerja tahun sebelumnya.

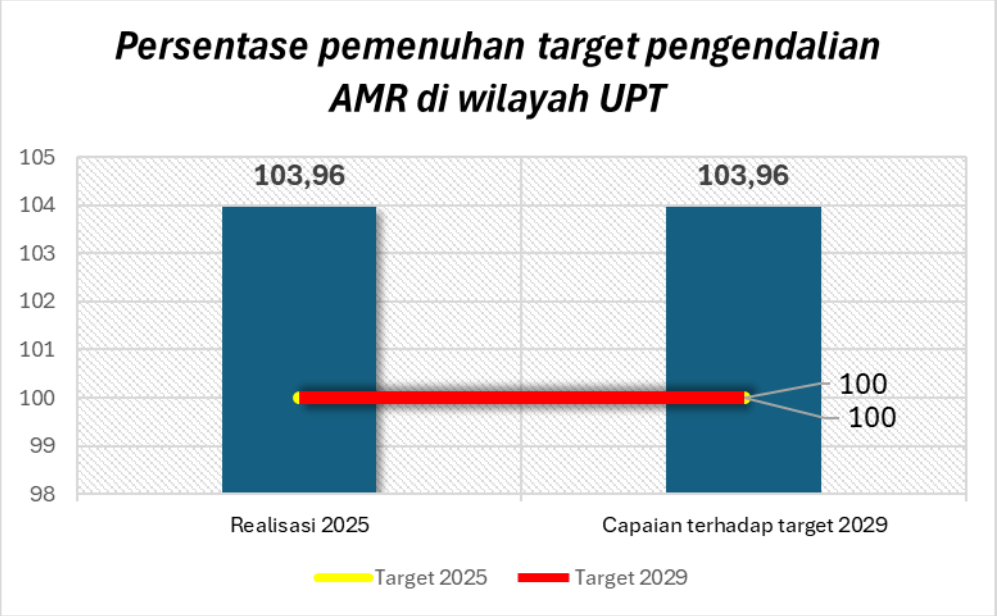
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA 2025 – 2029

Tabel 70. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

INDIKATOR	TARGET RENSTRA (2029) (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon	100,00	103,96	103,96	▲ Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Ambon pada Tahun 2025 sebesar 103,96 jika dibandingkan dengan target Tahun 2029 yaitu 100, dengan capaian 100,00% masuk ke dalam kriteria **"Tercapai/ Melampaui".**

Gambar 78. Grafik capaian realisasi terhadap target jangka menengah

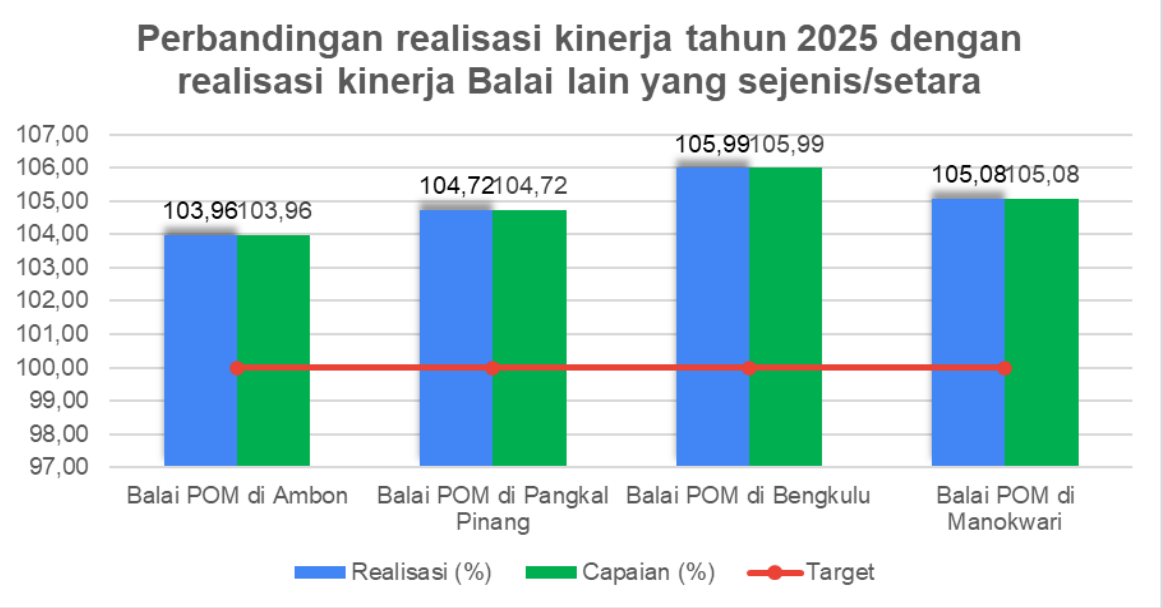


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

Tabel 71. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

UPT	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Balai POM di Ambon	100,00	103,96	103,96%	Sangat Baik
Balai POM di Pangkal Pinang	100,00	104,72	104,72%	Sangat Baik
Balai POM di Bengkulu	100,00	105,99	105,99%	Sangat Baik
Balai POM di Manokwari	100,00	105,08	105,08%	Sangat Baik



Realisasi indikator kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Tahun 2025 pada BPOM di Ambon, BPOM di Pangkal Pinang, BPOM di Bengkulu, dan BPOM di Manokwari, seluruhnya memenuhi kriteria capaian “Sangat Baik” karena berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor penyebab keberhasilan kinerja, antara lain:

- Terdapat 92,68% dari target 80% apotek yang diperiksa menggunakan tools AMR dan tepat dalam pengisian setiap pertanyaan sehingga persentase penggunaan tools AMR sebesar 115,85%;
- Terdapat 1 dari target 1 (100%) bimbingan teknis pengendalian AMR yang dilaksanakan pada tahun 2025 di Kab. Seram Bagian Timur;
- Terdapat 1 dari target 1 (100%) advokasi kepada lintas sektor terkait pengendalian AMR yang dilaksanakan pada tahun 2025 di Kota Tual;
- Terdapat 2 dari target 2 (100%) kegiatan publikasi di media sosial terkait AMR pada Triwulan III dan IV tahun 2025;
- Tersedianya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Lingkungan Badan POM yang diterbitkan di tahun 2025;
- Diterbitkannya Keputusan Kepala Badan POM Nomor 350 Tahun 2025 Tentang Peta Jalan Rencana Aksi Pengendalian Resistensi Antimikroba (Antimicrobial Resistance) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;
- Rencana pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai rencana tahunan yang sudah disusun di awal tahun;
- Kompetensi petugas yang memadai dalam melakukan evaluasi label sesuai ketentuan;
- Penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) untuk mempermudah pengelolaan data dan pelaporan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, antara lain:

- Peningkatan kompetensi petugas dalam bentuk sosialisasi dan pertemuan

IKSK 15. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

- Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.
  Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.
- Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:
  Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.
- Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:
  Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

- Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota: Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
  1. Standar Ruang Lingkup;
  2. Standar Peralatan;
  3. Standar Kompetensi Laboratorium;
  4. Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
  1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
  2. Standar Peralatan;
  3. Standar Kompetensi Laboratorium.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahun 2025

Tabel 72. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,90	74,60	100,95	Sangat Baik

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratoriumi adalah 74,6 % Sehingga capaian pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar 100,95% dengan kriteria "**Sangat Baik**".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 73. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
2024	-	-	-	-
2025	73,90	74,60	100,95	Sangat Baik

Indikator *Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium* merupakan indikator kinerja dengan perhitungan dan manual IKU baru pada periode RENSTRA 2025 - 2029, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi serta capaian kinerja tahun sebelumnya.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA 2025 – 2029

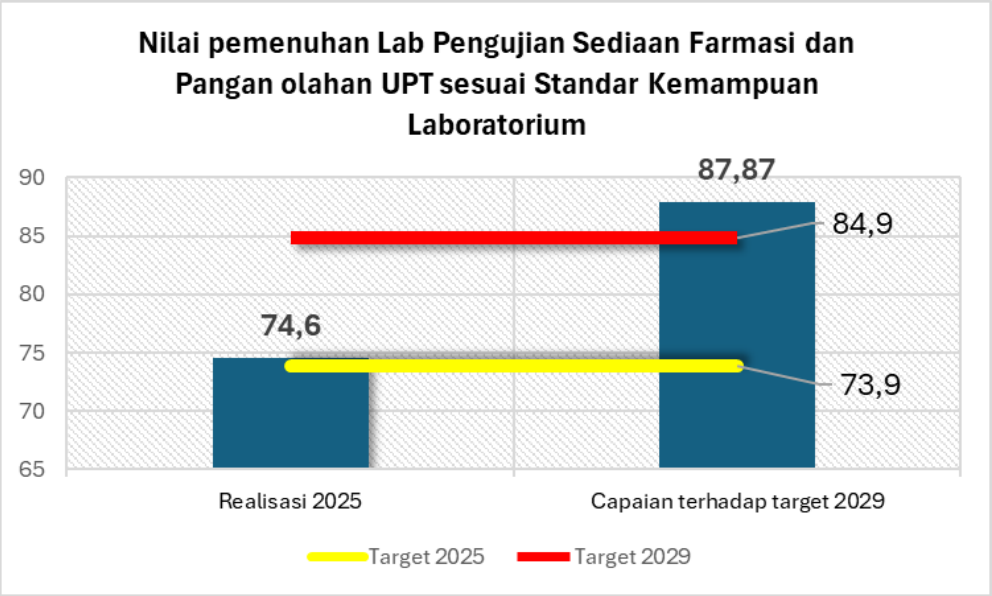
Tabel 74. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

INDIKATOR	TARGET RENSTRA (2029) (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT	84,90	74,60	87,87	Akan Tercapai

Realisasi *Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium* pada Tahun 2025 sebesar 74,60 jika dibandingkan dengan target Tahun 2029 yaitu 84,90, dengan capaian 87,87% masuk ke dalam kriteria **“Akan Tercapai”**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 77. Grafik capaian realisasi terhadap target jangka menengah



4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

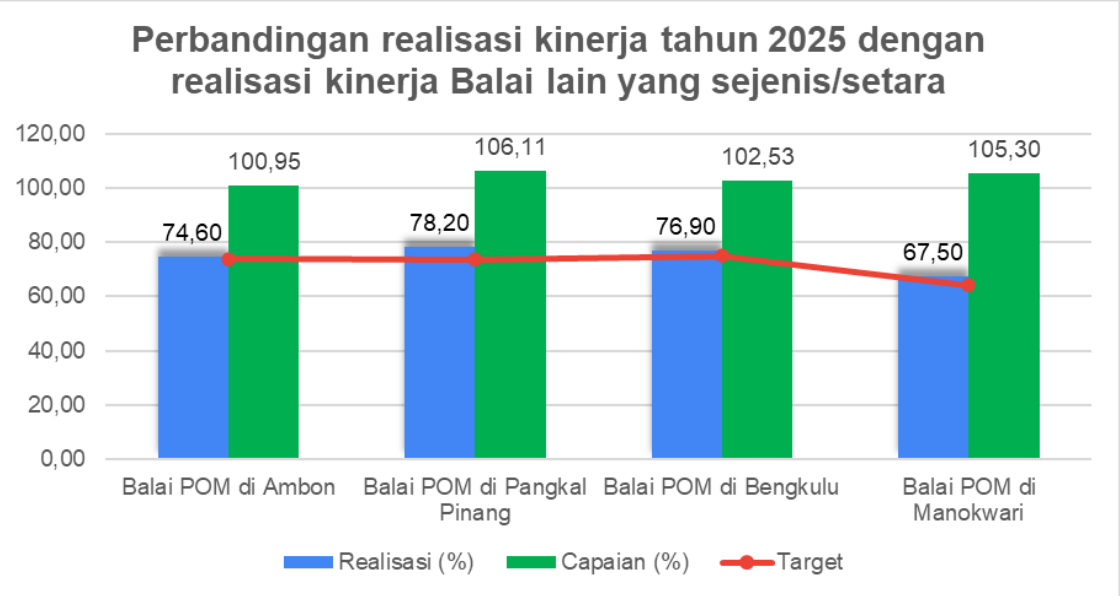
Tabel 75. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

UPT	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Balai POM di Ambon	73,90	74,60	100,95%	Sangat Baik
Balai POM di Pangkal Pinang	73,70	78,20	106,11%	Sangat Baik
Balai POM di Bengkulu	75,00	76,90	102,53%	Sangat Baik
Balai POM di Manokwari	64,10	67,50	105,30%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel capaian kinerja TA 2025, seluruh UPT Balai POM yang tercantum menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan realisasi yang memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Balai POM di Ambon mencatat target sebesar 73,90% dan berhasil merealisasikan 74,60%, dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tingkat capaian 100,95%. Balai POM di Pangkal Pinang menunjukkan kinerja paling menonjol dengan realisasi 78,20% dari target 73,70%, sehingga mencapai capaian sebesar 106,11%. Selanjutnya, Balai POM di Bengkulu mencapai realisasi 76,90% dari target 75,00%, dengan persentase capaian 102,53%. Sementara itu, Balai POM di Manokwari juga melampaui target yang ditetapkan, dengan realisasi 67,50% dari target 64,10% dan capaian sebesar 105,30%. Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan komitmen masing-masing UPT dalam mencapai target kinerja TA 2025. Dari tabel diatas untuk realisasi tertinggi dan persentase capaian tertinggi diraihi oleh Balai POM di Pangkal Pinang.



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Analisis penyebab keberhasilan peningkatan nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai SKL diawali dengan kajian analisis terhadap faktor penyebab rendahnya nilai SKL pada TW I. Selanjutnya, dilaksanakan rapat mutu pada bulan Mei 2025. Hasil rapat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan capaian sekitar 5%, aspek yang perlu diprioritaskan adalah aspek kompetensi, mengingat peningkatan satu aspek kompetensi dapat menaikkan nilai SKL sebesar 2%. Oleh karena itu, dilakukan monitoring pemenuhan aspek kompetensi yang bersumber dari Aspek 1 dan Aspek 2 pada Laboratorium Mikrobiologi serta Aspek 2 pada Laboratorium Kimia Pangan. Strategi ini berhasil dengan baik dapat dilihat nilai SKL di TW 1 sekitar 66,7% (capaian 94%), naik menjadi 73,4% (capaian 100,12%). Selain itu di TW 3 dan TW 4, pelaksanaan rencana veifikasi dan standar ruang lingkup di kawal dengan baik dengan sehingga dapat terlaksana dengan hasil yang memuaskan. Selain program pelatihan teknis laboratorium yang dilakukan secara berkala telah meningkatkan kompetensi sehingga menunjang berhasilnya verifikasi methode yang dilakukan oleh penguji.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang direncanakan pada Triwulan II difokuskan pada peningkatan aspek kompetensi Laboratorium Kimia dan Mikrobiologi serta pelaksanaan monitoring terhadap standar metode analisis (MA) yang telah terverifikasi dan standar ruang lingkup pengujian. Kontribusi aspek peralatan pada tahun berjalan hanya memberikan peningkatan sebesar 0,6% karena BPOM di Ambon hanya memperoleh dua peralatan baru, yaitu *ICP-MS* dan *water purification system*. Adapun pengadaan KCKT dan spektrofotodensitometer dilakukan sebagai penggantian peralatan lama yang telah rusak atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

Dalam rangka pemenuhan aspek kompetensi, kegiatan perencanaan verifikasi dilaksanakan secara bersamaan dengan uji banding. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan personel kompeten dalam pelaksanaan pengujian, sehingga tidak hanya bergantung pada satu orang penguji, tetapi minimal dua orang. Uji banding juga merupakan salah satu parameter Jaminan Mutu Hasil Pengujian karena menggunakan pendekatan statistik untuk membuktikan bahwa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

hasil pengujian yang dilakukan oleh dua penguji tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Untuk mendukung kompetensi personil dalam melaksankan verifikasinya sehingga berhasil dan memenuhi kriteria keberterimaan sesuai dengan kompendia yang berlaku, yaitu Farmakope Indonesia (FI), United States Pharmacopeia (USP), dan AOAC, laboratorium secara rutin melaksanakan kegiatan pelatihan. Perencanaan judul pelatihan didasarkan pada metode dengan tingkat kompleksitas tinggi, sehingga selain meningkatkan kompetensi personel, juga mendukung peningkatan aspek verifikasi metode. Pemilihan judul pelatihan dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa metode tersebut telah ditetapkan dalam standar laboratorium oleh Badan POM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran Kegiatan II

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja

Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Efektivitas KIE di masing – masing wilayah kerja Balai POM di Ambon terdiri dari beberapa indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
3. Jumlah desa pangan aman
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

IKSK 16. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

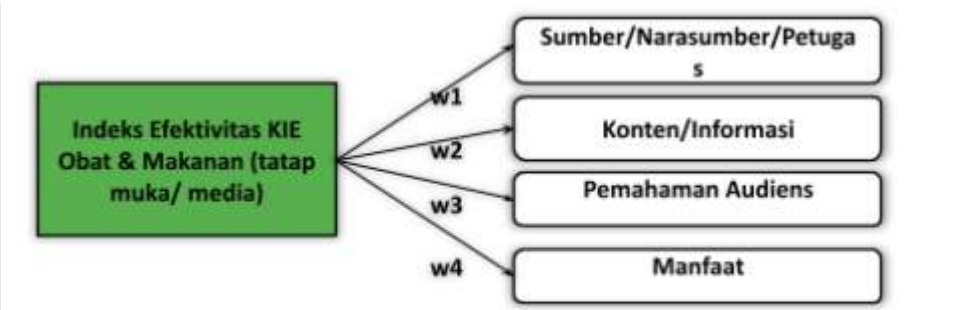
Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

Rumus dan perhitungan efektivitas KIE Adalah sebagai berikut:



Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	(0.25 x X1)+(0.25 x X2)+(0.25 x X3)+(0.25 x X4)

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Tahun 2025

Tabel 76. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Tahunan 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	87,93	91,40	103,95	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja sebesar 91,40. Sehingga capaian Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja pada Tahunan Tahun 2025 adalah sebesar 103,95% dengan kriteria "**Sangat Baik**".

Capaian tahunan 2025, realisasi indikator Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebesar 91,40%, sedangkan capaian selama tahun realisasinya sebesar 91,23%. Capaian tahunan mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan III karena pelaksanaan KIE tatap muka dan KIE media (media sosial/ elektronik/ non elektronik) dengan materi yang dikemas menarik, penyampaian baik dan sesuai dengan kebutuhan audiens serta telah memastikan setiap peserta/responden mengisi survei efektivitas KIE.

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 77. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
2024	97,70	97,70	100,00	Baik
2025	87,93	91,40	103,95	Sangat Baik

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja pada Tahunan Tahun 2025 91,40 dibandingkan target Tahun 2025 yaitu 87,93 dengan capaian 103,95 masuk kedalam kriteria **"Sangat Baik".** Terdapat penurunan target tahun 2025 sesuai dengan renstra 2025-2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

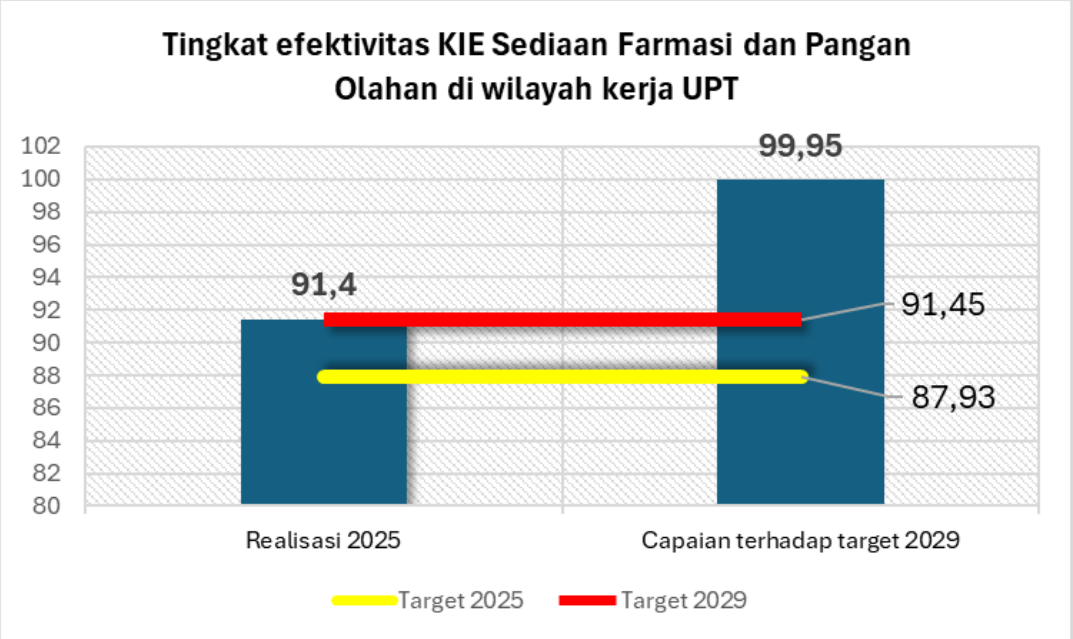
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA 2025 – 2029

Tabel 78. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

INDIKATOR	TARGET RENSTRA (2029) (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	91,45	91,40	99,95	Akan Tercapai

Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 sebesar 91,40 jika dibandingkan dengan target Tahun 2029 yaitu 91,45, dengan capaian 99,95% masuk ke dalam kriteria **"Akan Tercapai"**

Gambar 78. Grafik capaian realisasi terhadap target jangka menengah

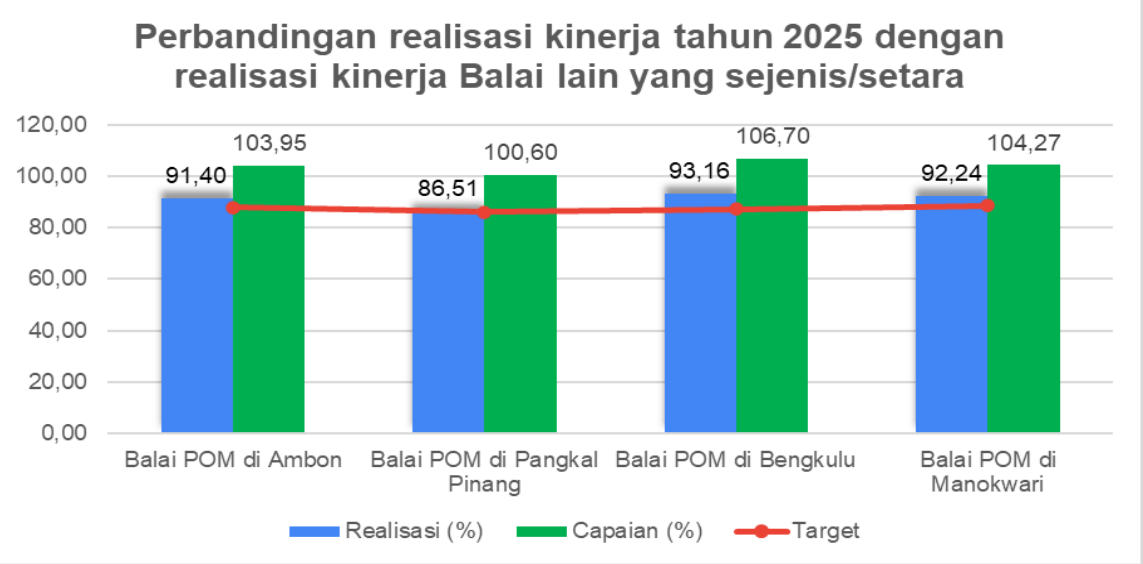


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

Tabel 79. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

UPT	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Balai POM di Ambon	87,93	91,40	103,95%	Sangat Baik
Balai POM di Pangkal Pinang	85,99	86,51	100,60%	Sangat Baik
Balai POM di Bengkulu	87,31	93,16	106,70%	Sangat Baik
Balai POM di Manokwari	88,46	92,24	104,27%	Sangat Baik



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Pelaksanaan KIE tatap muka dan KIE media (media sosial/ elektronik/ non elektronik) dengan materi yang dikemas menarik, penyampaian baik dan sesuai dengan kebutuhan audiens
- Telah memastikan setiap peserta/responden mengisi survei efektivitas KIE.
- Adanya peningkatan jumlah responden KIE media seiring dengan banyaknya permintaan edukasi kepada mahasiswa dari kampus di Maluku.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

- Adanya MoU dengan berbagai kampus yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi terimplementasi dalam kegiatan berupa edukasi kepada mahasiswa dalam bentuk kuliah tamu, kuliah pakar atau dalam rangka pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru serta KKN.
- Optimalisasi eksternalisasi subsite ambon.pom.go.id dan Inovasi Panorama 24 (papan Informasi Obat dan Makanan Online 24 Jam) dan media sosial resmi (instagram, facebook, tiktok, youtube) sebagai media informasi dan publikasi kepada masyarakat.

IKSK 17. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

A. Sekolah Full Intervensi:

- advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
- Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.

B. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Tahun 2025

Tabel 80. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahunan 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	100	Baik

Realisasi *Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan* di wilayah kerja Balai POM di Ambon adalah 10 sekolah Sehingga capaian J*umlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan* pada Tahunan Tahun 2025 adalah sebesar 100 % dengan kriteria “baik”

Realisasi jumlah sekolah dengan pembudayaan keamanan pangan tahunan yakni 100% dan dibandingkan dengan realisasi triwulan III sebesar 95%. Realisasi pada tahunan lebih tinggi karena seluruh sekolah intervensi yakni 10 sekolah telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

memiliki komitmen dalam pembudayaan keamanan pangan yang dibuktikan dengan terbentuknya tim keamanan pangan sekolah, rencana aksi keamanan pangan sekolah dan hasil penilaian sertifikasi di mana semua sekolah mencapai nilai lebih dari 70. Dilakukan pula pengawalan terhadap sekolah intervensi tahun sebelumnya, sehingga seluruh tahapan program sekolah dengan pembudayaan keamanan pangan telah dilaksanakan.

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 81. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
2024	16	16	100	 Baik
2025	10	10	100	 Baik

Realisasi tahunan jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tahun 2024 adalah 16 sekolah dengan % capaian 100% sedangkan realisasi tahunan tahun 2025 adalah 10 sekolah dengan % capaian juga 100%. Perbedaa masuk kedalam kriteria **" Baik".** Terdapat perbedaan / penurunan target tahun 2024 dan 2025 dikarenakan tahun 2025 merupakan tahun efisiensi anggaran sehingga target juga lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

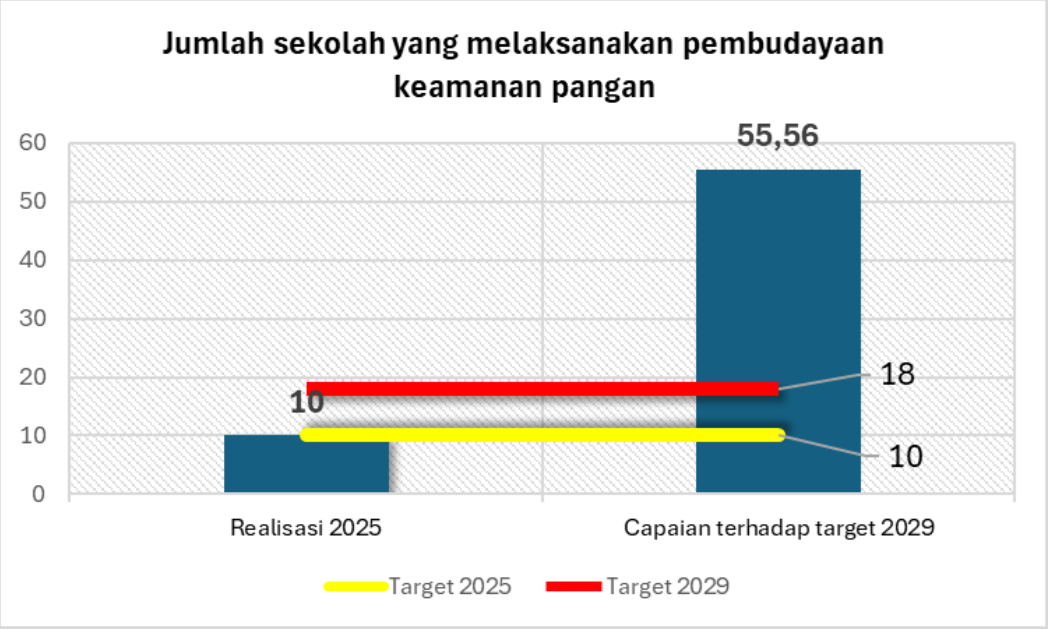
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA 2025 – 2029

Tabel 82. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

INDIKATOR	TARGET RENSTRA (2029) (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	18,00	10,00	55,56	Perlu Upaya Keras

Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Tahun 2025 sebesar 10 sekolah jika dibandingkan dengan target Tahun 2029 yaitu 18 sekolah dengan capaian 55,56% masuk ke dalam kriteria **"Perlu Upaya Keras"**

Gambar 79. Grafik capaian realisasi terhadap target jangka menengah

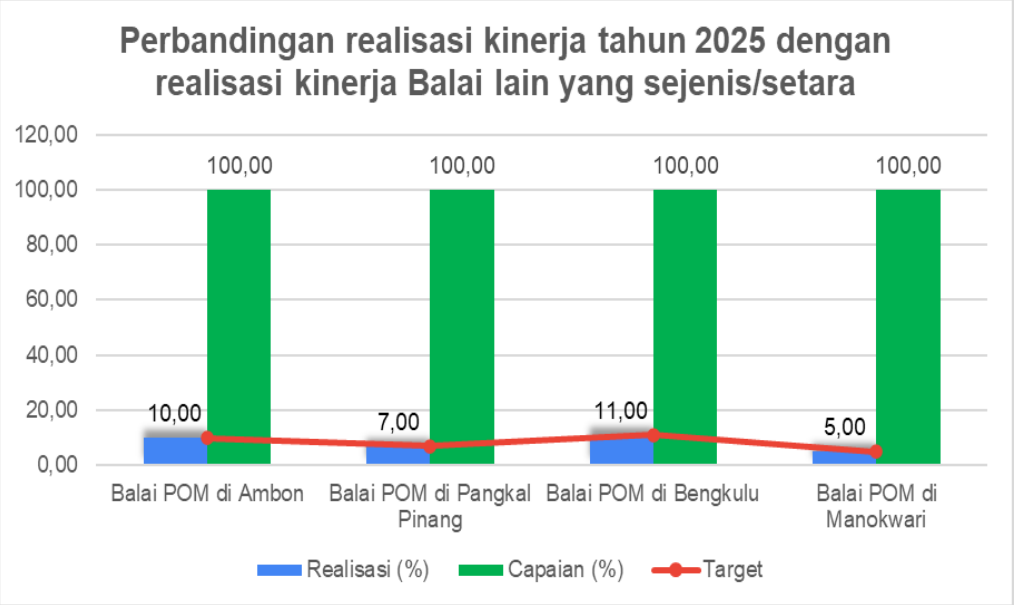


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

Tabel 83. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

UPT	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Balai POM di Ambon	10	10	100%	Baik
Balai POM di Pangkal Pinang	7	7	100%	Baik
Balai POM di Bengkulu	11	11	100%	Baik
Balai POM di Manokwari	5	5	100%	Baik



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Sekolah yang menjadi lokus intervensi merupakan rekomendasi dari Dinas Pendidikan sehingga dari awal sudah terjaring sekolah yang memiliki kepala sekolah yang berkomitmen
- Kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan tertinggi di sekolah bersemangat dan aktif dalam mendorong tim keamanan pangan sekolah untuk melaksanakan program keamanan pangan
- Komunikasi dan koordinasi yang aktif antara PIC Propenas BPOM Ambon dan Tim Keamanan Pangan Sekolah.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah advokasi dan koordinasi yang konsisten dilakukan antara BPOM Ambon dan lintas sektor di daerah sehingga saat melakukan intervensi ke sekolah, para tim kader keamanan pangan memiliki semangat dan komitmen yang besar. Hal lain yang menjadi pendukung keberhasilan program propenas tahun 2025 yakni terbentuknya tim koordinasi pengawasan dan pembinaan obat dan makanan di kabupaten kota, di mana propenas merupakan salah satu rencana aksinya, sehingga program ini mendapat perhatian besar dari pemerintah daerah.

IKSK 18. Jumlah desa pangan aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- kader keamanan pangan desa yang aktif
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Tahun 2025

Tabel 84. Jumlah Desa Pangan Aman Tahunan 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Jumlah Desa Pangan Aman	3	3	100	Baik

Realisasi *Jumlah Desa Pangan Aman* di wilayah kerja Balai POM di Ambon adalah 3 desa Sehingga capaian *Jumlah Desa Pangan Aman* pada Tahunan Tahun 2025 adalah sebesar 100 % dengan kriteria “baik”

Realisasi jumlah desa pangan aman tahunan yakni 100% dan dibandingkan dengan realisasi triwulan III sebesar 90%. Realisasi pada tahunan lebih tinggi karena seluruh desa intervensi telah melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan di desanya melalui pembentukan kader desa dan komunitas desa. Dilakukan pula pengawalan terhadap desa intervensi tahun sebelumnya, sehingga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

semua tahapan program gerakan keamanan pangan desa telah dilaksanakan semuanya.

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 85. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
2024	6	6	100	Baik
2025	3	3	100	Baik

Realisasi tahunan jumlah desa pangan aman tahun 2024 adalah 6 desa dengan % capaian 100% sedangkan realisasi tahunan tahun 2025 adalah 3 desa dengan % capaian juga 100% masuk kedalam kriteria " Tercapai". Perbedaan target tahun 2024 dan 2025 dikarenakan tahun 2025 merupakan tahun efisiensi anggaran sehingga target juga lebih rendah dibanding tahun sebelumnya

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA 2025 – 2029

Tabel 86. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

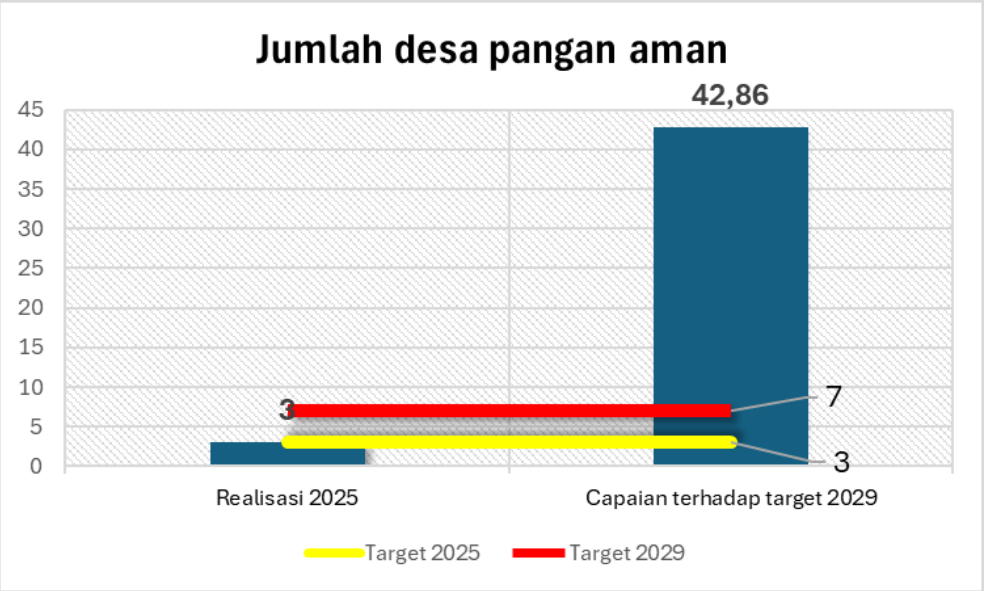
INDIKATOR	TARGET RENSTRA (2029) (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Jumlah Desa Pangan Aman	7	3	42,86	Perlu Upaya Keras

Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Tahun 2025 sebesar 3 Desajika dibandingkan dengan target Tahun 2029

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yaitu 7 sekolah dengan capaian 42,86% masuk ke dalam kriteria **"Perlu Upaya Keras"**

Gambar 80. Grafik capaian realisasi terhadap target jangka menengah

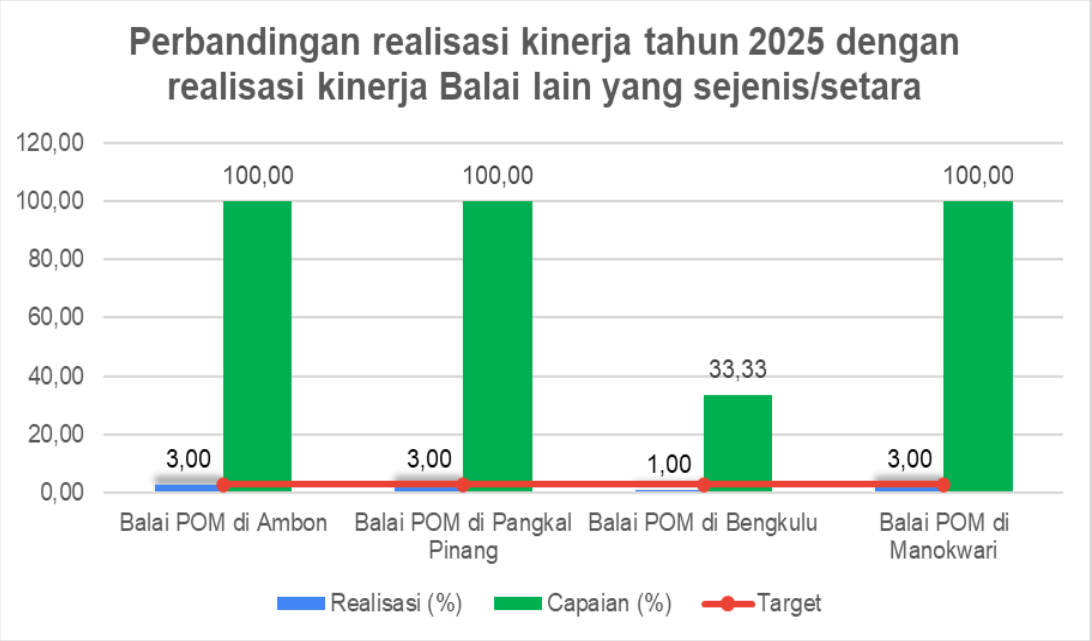


4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

Tabel 87. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

UPT	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Balai POM di Ambon	3	3	100%	Baik
Balai POM di Pangkal Pinang	3	3	100%	Baik
Balai POM di Bengkulu	3	1	33,33%	Kurang
Balai POM di Manokwari	3	3	100%	Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



5. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Keberhasilan Program Desa Pangan Aman dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya

- Desa yang menjadi lokus intervensi merupakan rekomendasi dari Dinas PMD sehingga dari awal sudah terjaring desa yang memiliki perangkat desa yang aktif dan berkomitmen untuk melaksanakan program keamanan pangan
- Tim keamanan pangan desa sebagai pemegang kebijakan tertinggi di desa bersemangat dan aktif dalam mendorong tim keamanan pangan desa untuk melaksanakan program keamanan pangan
- SK Kader dan SK komunitas di desa dibuat oleh Kepala Desa tepat waktu sehingga tidak menghambat program keamanan pangan desa
- Kader dan Komunitas Desa merupakan orang- orang terpilih yang memiliki semangat dan kompetensi dalam melaksanakan kegiatan keamanan pangan di desa
- Komunikasi dan koordinasi yang aktif antara PIC Propenas BPOM Ambon dan Tim Keamanan Pangan Desa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah advokasi dan koordinasi yang konsisten dilakukan antara BPOM Ambon dan lintas sektor di daerah sehingga saat melakukan intervensi ke desa, para tim keamanan pangan desa memiliki semangat dan komitmen yang besar. Hal lain yang menjadi pendukung keberhasilan program propenas tahun 2025 yakni terbentuknya tim koordinasi pengawasan dan pembinaan obat dan makanan di kabupaten kota, di mana propenas merupakan salah satu rencana aksinya, sehingga program ini mendapat perhatian besar dari pemerintah daerah.

IKSK 19. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Perhitungan realisasi pasar pangan aman berbasis komunitas berdasarkan tahapan intervensi pada tabel berikut:

No	Tahapan	Skor	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	Maet - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20%	Mei- Juli
5	Pengawalan	10-%	Februari - Juli
	Total Skor	**100%**	

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Tahun 2025

Tabel 88. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahunan 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100	Baik

Realisasi *Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas* di wilayah kerja Balai POM di Ambon 1 Sehingga capaian *Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas* pada Tahunan Tahun 2025 adalah sebesar 100 % dengan kriteria “baik”.

Realisasi jumlah desa pangan aman tahunan yakni 100% dan dibandingkan dengan realisasi triwulan III sebesar 90%. Realisasi pada tahunan lebih tinggi karena petugas pasar intervensi telah melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan di pasarnya melalui penyuluhan komunitas pasar dan monev keamanan pangan melalui penyebaran informasi keamanan pangan pasar lewat media elektronik maupun secara tatap muka.. Dilakukan pula pengawalan terhadap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pasar intervensi tahun sebelumnya, sehingga semua tahapan program pasar aman berbasis komunitas telah dilaksanakan semuanya.

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 89. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
2024	2	2	100	Baik
2025	1	1	100	Baik

Realisasi Jumlah Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayah BPOM Ambon pada Tahunan Tahun 2024 adalah 100 % dibandingkan target Tahun 2025 yaitu 100%, dengan capaian 100 % masuk kedalam kriteria **"Baik".** Perbedaan target tahun 2024 dan 2025 dikarenakan tahun 2025 merupakan tahun efisiensi anggaran sehingga target juga lebih rendah dibanding tahun sebelumnya

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA 2025 – 2029

Tabel 90. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

INDIKATOR	TARGET RENSTRA (2029) (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	2	1	50,00	Perlu Upaya Keras

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada Tahun 2025 sebesar 1 Pasar jika dibandingkan dengan target Tahun 2029 yaitu 2 sekolah dengan capaian 50,00% masuk ke dalam kriteria **"Perlu Upaya Keras"**

Gambar 81. Grafik capaian realisasi terhadap target jangka menengah

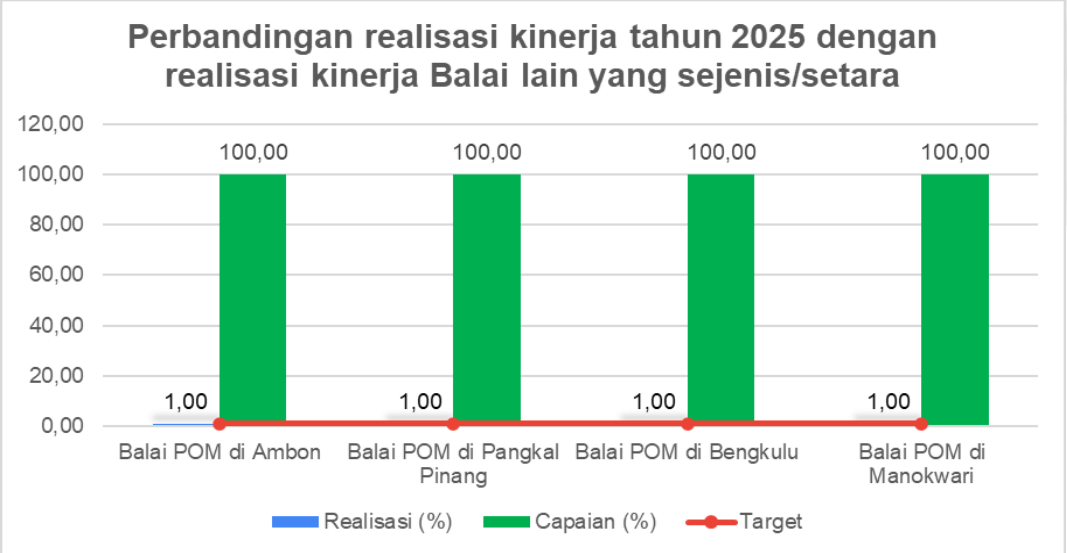


4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

Tabel 91. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

UPT	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Balai POM di Ambon	1	1	100%	Baik
Balai POM di Pangkal Pinang	1	1	100%	Baik
Balai POM di Bengkulu	1	1	100%	Baik
Balai POM di Manokwari	1	1	100%	Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



5. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

   Keberhasilan Pasar Aman Berbasis Komunitas dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya

   - Pasar yang menjadi lokus intervensi merupakan rekomendasi dari Dinas Perindag dan merupakan pasar pemenang lomba pangan segar aman tingkat nasional
   - Kepala pasar dan petugas pasar memiliki semangat dan komitmen dalam melaksanakan tahapan dan program keamanan pangan di pasar
   - Komunikasi dan koordinasi yang aktif antara PIC Propenas BPOM Ambon dan Tim Keamanan Pangan Sekolah

6. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

   Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah advokasi dan koordinasi yang konsisten dilakukan antara BPOM Ambon dan lintas sektor di daerah sehingga saat melakukan intervensi ke pasar, para petugas pasar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

memiliki semangat dan komitmen yang besar. Hal lain yang menjadi pendukung keberhasilan program propenas tahun 2025 yakni terbentuknya tim koordinasi pengawasan dan pembinaan obat dan makanan di kabupaten kota, di mana propenas merupakan salah satu rencana aksinya, sehingga program ini mendapat perhatian besar dari pemerintah daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran Kegiatan III

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu terdiri dari 1 indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

5. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

IKSK 20. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
   a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
   b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
   a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
      - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
      - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Pada triwulan III tahun 2025 terdapat perubahan pada manual IKU sehingga terdapat perubahan terhadap cara hitung pemenuhan target tahunan (B12) dan target bulanan (B1 - B11). Perhitungan target tahunan (B-12) sebagai berikut : Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMK yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) dari tahun 2025 sd tahun berjalan / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100%. Perhitungan target bulanan (B1 - B11) sebagai berikut : Jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan.

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 17,57% untuk Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan. Pelaksanaan pendampingan UMKM berdasarkan tahapan pendampingan yang secara umum dimulai dari tahapan pelaksanaan KIE, penetapan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

target, pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi pendampingan, penerbitan sertifikat cara produksi yang baik, dan pelaporan.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahun 2025

Tabel 92. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	17,57	17,57	100	Baik

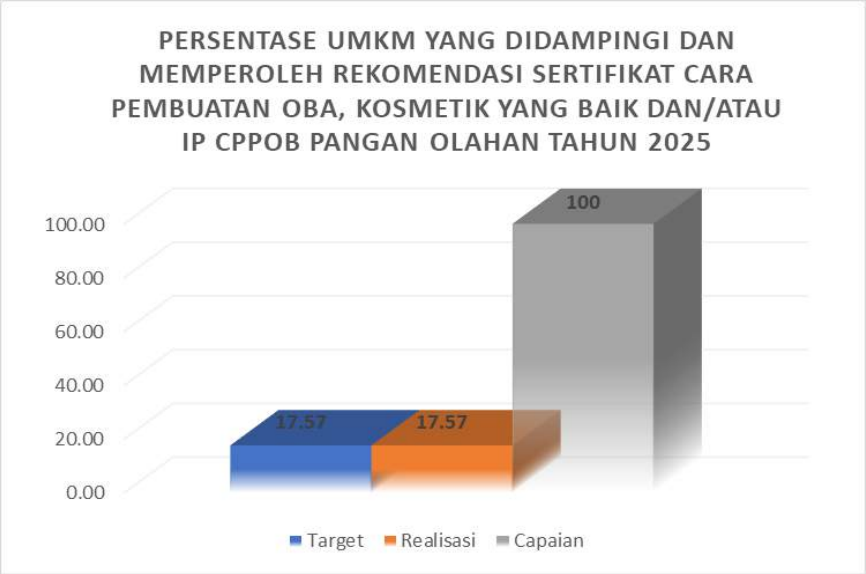
Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada tahun 2025 sebesar 17,57% terhadap target 17,57% dengan capaian 100,00% dengan kriteria capaian "**Baik**". Rincian realisasi pendampingan UMKM yang dilakukan sampai tahun 2025 untuk pangan olahan terdapat 8 UMKM yang telah terbit sertifikat Izin Penerapan CPPOB terhadap target 8 UMKM sesuai tahapan pendampingan UMKM pangan olahan, sedangkan untuk obat bahan alam adalah 4 UMKM telah terbit sertifikat CPOTB bertahap (2 UMKM CPOTB Bertahap Tahap I dan 2 lainnya CPOTB bertahap tahap II) dari 4 UMKM yang ditargetkan, serta kosmetik terdapat 1 UMKM yang telah difasilitasi dalam pendampingan dan proses pengajuan SPA CPKB dari 1 UMKM yang ditargetkan.

Berdasarkan data realisasi dan capaian persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan per triwulan, terdapat peningkatan secara berkesinambungan terhadap realisasi dan capaian pendampingan UMKM, yaitu realisasi pada triwulan I sebesar 20,77%, meningkat pada triwulan II sebesar 57,67%, pada triwulan III meningkat sebesar 68,46% dan tahun 2025 tercapai 100,00%, dengan rincian 8 UMKM memperoleh sertifikat IP CPPOB, 4 UMKM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

memperoleh sertifikat CPOTB bertahap, dan 1 UMKM memperoleh sertifkat SPA CPKB sehingga total 13 UMKM.

Gambar 82. Grafik Capaian persentase UMKM yang didampingi tahun 2025



2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 93. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
2024	-	-	-	
2025	17,57	17,57	100	Baik

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada Tahunan Tahun 2025 merupakan indikator kinerja dengan perhitungan dan manual IKU baru pada periode RENSTRA 2025 - 2029, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi serta capaian kinerja tahun sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

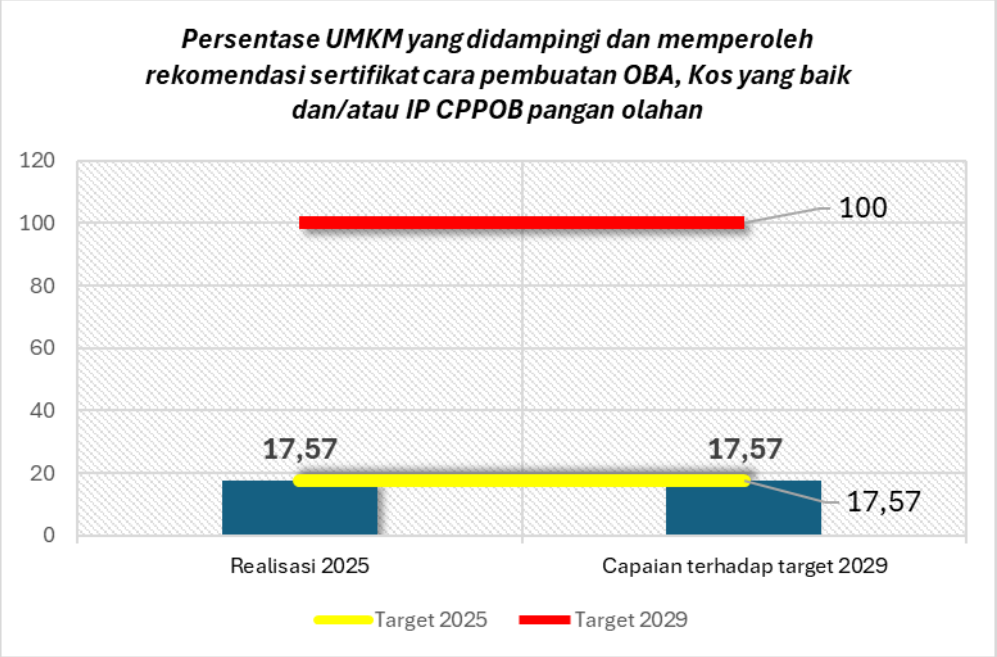
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA 2025 – 2029

Tabel 94. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

INDIKATOR	TARGET RENSTRA (2029) (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100	17,57	17,57	▼ Perlu Upaya Keras

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada Tahun 2025 sebesar 17,57 jika dibandingkan dengan target Tahun 2029 yaitu 100 persen dengan capaian 17,57 masuk ke dalam kriteria **"Perlu Upaya Keras"**

Gambar 83. Grafik capaian realisasi terhadap target jangka menengah

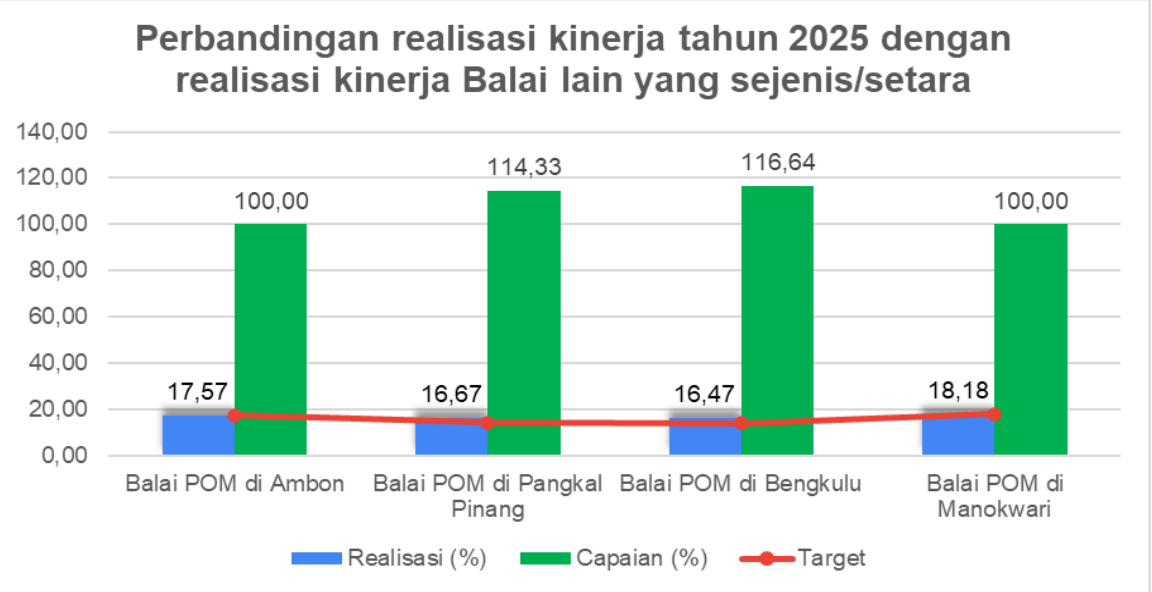


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

Tabel 95. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

UPT	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Balai POM di Ambon	17,57	17,57	100%	Baik
Balai POM di Pangkal Pinang	14,58	16,67	114,33%	Tidak Dapat Disimpulkan
Balai POM di Bengkulu	14,12	16,47	116,64%	Tidak Dapat Disimpulkan
Balai POM di Manokwari	18,18	18,18	100%	Baik



Pada indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan secara umum telah tercapai. Pada Balai POM di Ambon dan Balai POM di Manokwari realisasi sudah sesuai dengan target capaian 100% dengan kategori "Baik". Sedangkan untuk Balai POM di Pangkal Pinang dan Balai POM di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bengkulu capaian selama tahun 2025 menjadi “Tidak dapat disimpulkan” karena meleibihi 110%

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Terealisasinya jumlah UMKM yang didampingi sesuai target pendampingan tahun 2025, yaitu 13 UMKM, yang terdiri dari 8 UMKM pangan olahan, 4 UMKM obat bahan alam, dan 1 UMKM kosmetik;
- Proses seleksi UMKM yang ditetapkan sebagai target pendampingan sesuai dengan kriteria UMKM target, yang sebagian telah melakukan konsultasi sejak tahun sebelumnya;
- Pelaksanaan tahapan pendampingan UMKM sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada pedoman pendampingan UMKM;
- Peningkatan komitmen bersama antara petugas dan pelaku usaha dalam proses perizinan berusaha, sertifikasi dan registrasi.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah :

a. Penerbitan berbagai peraturan yang menaungi usaha mikro dan kecil yang memberikan kemudahan dalam perizinan termasuk diantaranya komitmen CPPOB bagi pangan risiko menengah rendah dan rendah;
b. Inovasi Pesta Kenari Pro UMKM yang didalamnya terdapat 12 layanan pendampingan UMKM sehingga memberikan kemudahan dalam proses penerbitan izin, fasilitasi cara produksi yang baik, penyiapan dokumen GMP, Pelatihan pembuatan produk, desain rumah produksi, serta akses pemasaran;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Kegiatan Sosialisasi / bimbingan teknis / pembinaan dan desk yang dilakukan secara konsisten oleh BPOM di Ambon dan berbagai lintas sektor terkait dalam memfasilitasi pelaku Usaha UMKM sehingga meningkatkan kapasitas, pemahaman, dan komitmen dalam pelaksanaan praktek CPPOB.

IKSK 21. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebesar 40%;
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

= ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%))

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahun 2025

Tabel 96. Persentase Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75,00	77,50	103,33	Sangat Baik

Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT pada tahun 2025 sebesar 17,57% terhadap target 17,57% dengan capaian 100,00% dengan kriteria capaian "**Baik**".

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 97. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
2024	-	-	-	
2025	75,00	77,50	103,33	Sangat Baik

Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Tahun 2025 merupakan indikator kinerja dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

perhitungan dan manual IKU baru pada periode RENSTRA 2025 - 2029, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi serta capaian kinerja tahun sebelumnya.

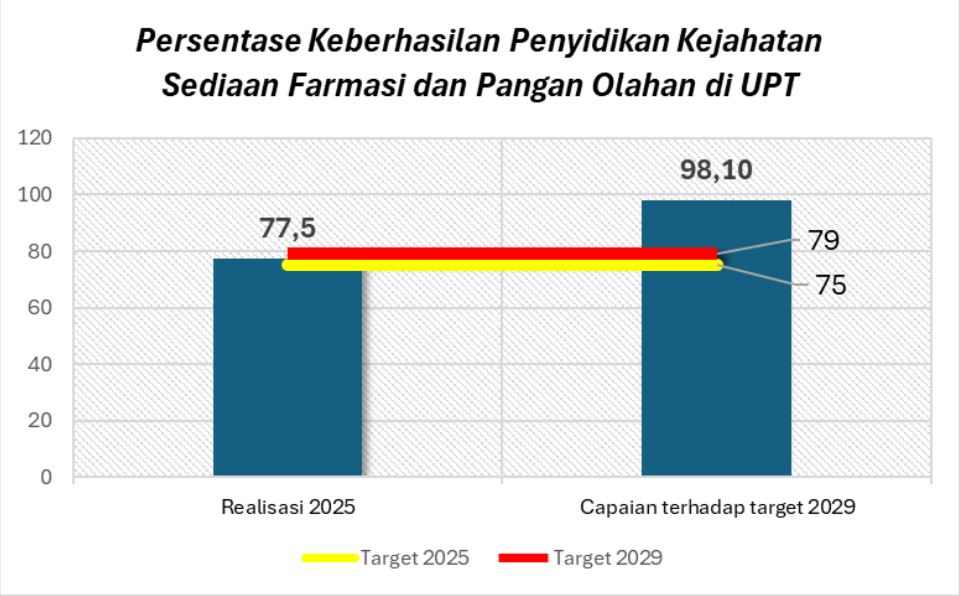
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA 2025 – 2029

Tabel 98. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

INDIKATOR	TARGET RENSTRA (2029) (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	79,00	77,50	98,10	Akan Tercapai

Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT pada Tahun 2025 sebesar 77,50 jika dibandingkan dengan target Tahun 2029 yaitu 79 persen dengan capaian 98,10 masuk ke dalam kriteria **"Akan tercapai".**

Gambar 84. Grafik capaian realisasi terhadap target jangka menengah

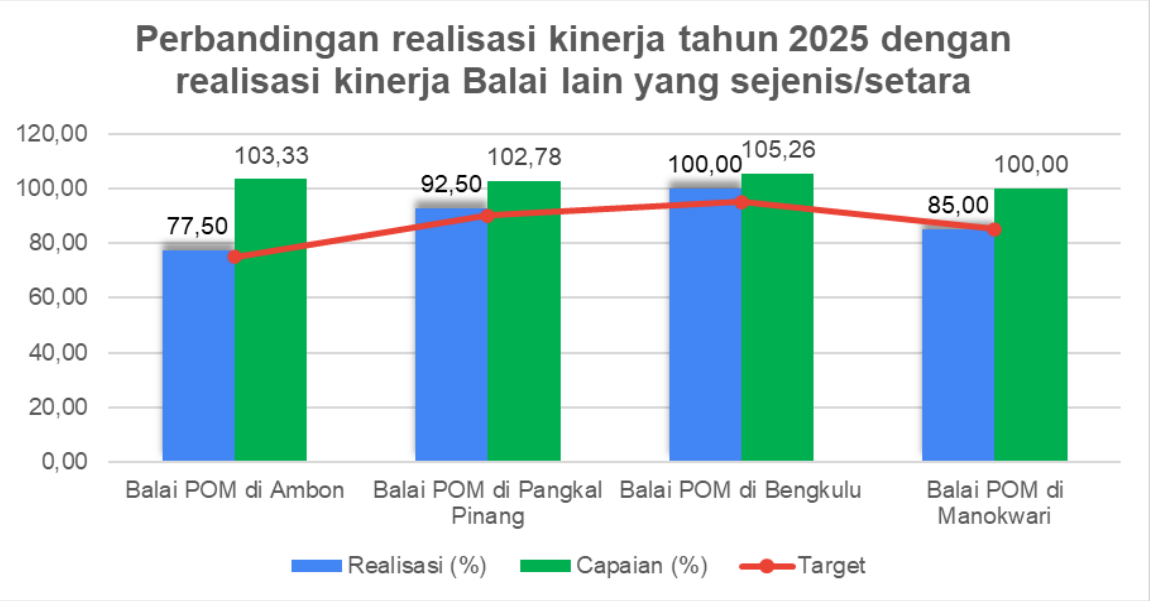


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

Tabel 99. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

UPT	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Balai POM di Ambon	75,00	77,50	103,33%	Sangat Baik
Balai POM di Pangkal Pinang	90,00	92,50	102,78%	Sangat Baik
Balai POM di Bengkulu	95,00	100,00	105,26%	Sangat Baik
Balai POM di Manokwari	85,00	85,00	100,00%	Baik



Pada indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT secara umum telah tercapai. Pada Balai POM di Ambon, Balai POM di Pangkal Pinang, dan Balai POM di Bengkulu capain dengan kriteria “Sangat Baik”, sedangkan untuk Balai POM di Manokwari dengan kriteria capaian “Baik”.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

   Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

   - Perkara carryover 2024 sebanyak 2 perkara berdasarkan mekanisme gelar dan meminta arahan dan pendapat dari Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan perkara tersebut dinyatakan SP3 dan telah dilaporkan pada laporan kemajuan penyidikan.
   - Terjalinnya koordinasi yang baik antara Aparat Penegak Hukum pada lokus terjadinya tindak pidana antara lain Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Aru, Kepolisian Resor Kepualauan Aru dan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon mempercepat penyelesaian berkas perkara yang ditangani oleh penyidik BPOM di Ambon.
   - Perkara Tahun 2025 sebanyak 2 perkara dengan jumlah berkas 3 berkas telah sampai pada Tahap II yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aru dan telah terbit putusan pengadilan terhadap perkara tersebut.
   - Pelaporan dilakukan secara konsisten dan tepat waktu menggunakan Aplikasi Dashbord Penindakan.

6. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

   - Koordinasi dan dukungan yang aktif dari Korwas PPNS POLDA Maluku dan Polres Kepulauan Aru dalam pemberian bantuan teknis maupun taktis.
   - Melaksanakan koordinasi dengan Jaksa peneliti berkas perkara guna mempercepat proses penanganan berkas perkara hingga tahap II.
   - Layanan konsultasi hukum yang diberikan oleh Direktorat Penyidikan dalam penanganan perkara untuk mendukung penyelesaian berkas perkara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Peningkatan kompetensi petugas pada fungsi penindakan sehingga menemukan dan mengelola proses penyidikan agar dapat berjalan lancar.\

IKSK 22. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
    1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.
    2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahun 2025

Tabel 100. Persentase Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	99,00	110,00	Sangat Baik

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada tahun 2025 sebesar 17,57% terhadap target 17,57% dengan capaian 100,00% dengan kriteria capaian "**Baik**".

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 101. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
2024	-	-	-	
2025	90,00	99,00	110,00	Sangat Baik

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025 merupakan indikator kinerja dengan perhitungan dan manual IKU baru pada periode RENSTRA 2025 - 2029, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi serta capaian kinerja tahun sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

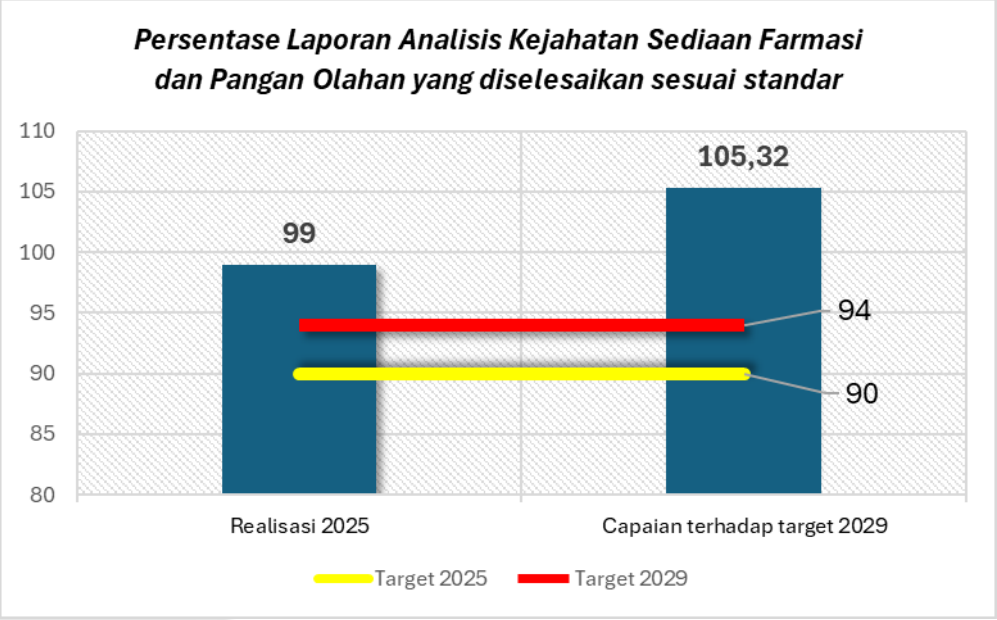
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA 2025 – 2029

Tabel 102. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

INDIKATOR	TARGET RENSTRA (2029) (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94,00	99,00	105,32	▲ Tercapai / Melampaui

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada Tahun 2025 sebesar 99,00 jika dibandingkan dengan target Tahun 2029 yaitu 94 persen dengan capaian 105,32 masuk ke dalam kriteria **"Tercapai / Melampaui"**

Gambar 85. Grafik capaian realisasi terhadap target jangka menengah

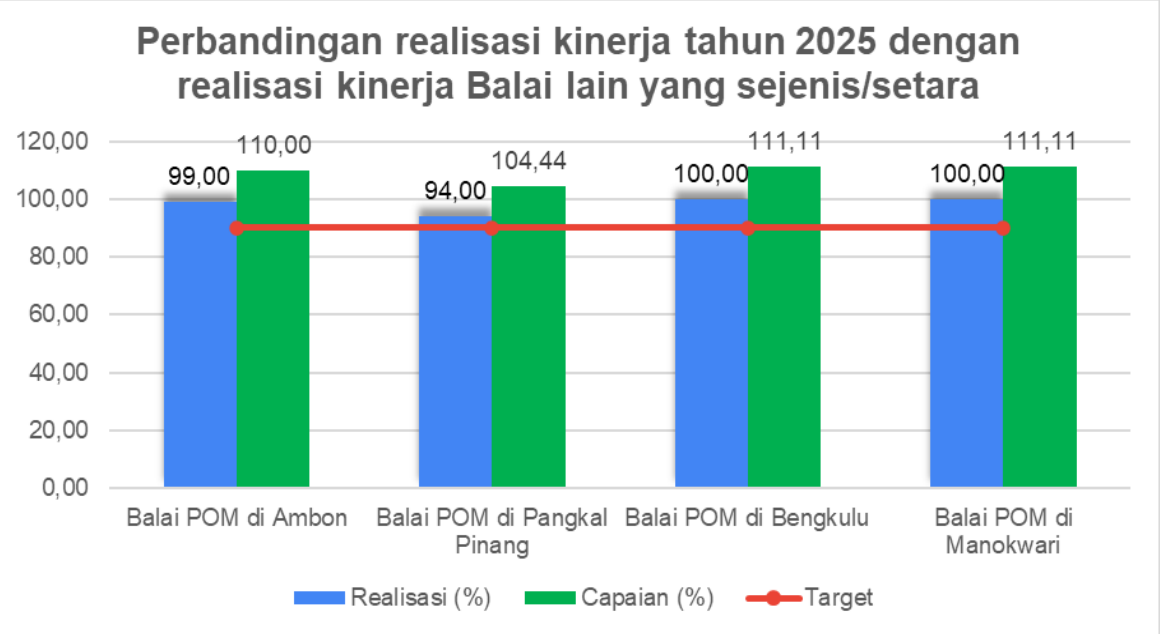


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

Tabel 103. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

UPT	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Balai POM di Ambon	90,00	99,90	110,00%	Sangat Baik
Balai POM di Pangkal Pinang	90,00	94,00	104,44%	Sangat Baik
Balai POM di Bengkulu	90,00	100,00	111,11%	Tidak Dapat Disimpulkan
Balai POM di Manokwari	90,00	100,00	111,11%	Tidak Dapat Disimpulkan



Pada indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar secara umum telah tercapai. Pada Balai POM di Ambon dan Balai POM di Pangkal Pinang capain dengan kriteria “Sangat Baik”, namun untuk Balai POM di Bengkulu dan Balai POM di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Manokwari dengan kriteria capaian “Tidak dapat disimpulkan” karena capaian melebihi 110%.

5. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

   Adapun penyebab keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

   - Laporan kegiatan Patroli Siber telah dilaporkan secara tepat waktu setiap bulan pada aplikasi https://inawebcrawler.id/ sebelum tanggal 25 tiap bulan berjalan dan secara paralel disampaikan surat pengantar melalui aplikasi Srikandi dan berdasarkan hasil evaluasi dari Direktorat Siber Obat dan Makanan bahwa kegiatan Siber Balai POM di Ambon berupa laporan patroli siber dan profiling dilakukan secara tepat waktu dengan persentase 100% dan diberi nilai 50%.
   - Laporan kegiatan Cegah Tangkal secara rutin telah dilaporkan secara tepat waktu setiap bulan pada Aplikasi Dashboard Penindakan.
   - Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan telah dilaksanakan dan dilaporkan secara *real time* berdasarkan tanggal pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah memenuhi syarat berdasarkan evaluasi dari Direktorat Cegah Tangkal penilaian terhadap tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan sebesar 25%.
   - Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan yang sebelumnya telah dilakukan penilaian oleh Kepala Balai POM di Ambon dilaksanakan sesuai format yang disampaikan kepada Direktorat Cegah Tangkal secara tepat waktu dengan nilai sebesar 24%.

6. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

   Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

   - Pelaporan kegiatan patroli siber telah dilakukan menggunakan aplikasi https://inawebcrawler.id/ dengan cara menginput link atau tautan media sosial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

atau marketplace yang akan direkomendasikan untuk dilakukan take down, sehingga memudahkan petugas dalam hal pelaporannya.

- Laporan kegiatan cegah tangkal dilakukan dengan menggunakan aplikasi dashboard penindakan, sehingga pelaporan dapat dilakukan secara realtime.
- Pengumpulan bahan dan keterangan guna mendukung proses pembuatan laporan Analis Kerawanan kejahatan telah dilaksanakan sehingga pengerjaan laporan Analisis dapat dilakukan tepat waktu.

- Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi dari Direktorat Cegah Tangkal Obat dan Makanan dilakukan dengan menginput pada bit.ly dan pelaporannya dapat dilakukan secara real time.
- Terdapat layanan konsultasi terhadap tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh Direktorat Cegah Tangkal Obat dan Makanan sehingga jika terdapat tindak lanjut yang tidak sesuai maka dapat diperbaiki dengan segera.

IKSK 23. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2) Profesionalitas SDM (25%);
3) Sarana Prasarana (18%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Untuk formula dan perhitungan indikator ini Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03. Kategori nilai Adalah sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahun 2025

Tabel 104. Indeks Pelayanan Publik UPT

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,65	4,89	105,16	Sangat Baik

Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT pada tahun 2025 sebesar 17,57% terhadap target 17,57% dengan capaian 100,00% dengan kriteria capaian "**Baik**".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 105. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
2024	4,65	4,84	106,37	Sangat Baik
2025	4,55	4,89	105,16	Sangat Baik

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA 2025 – 2029

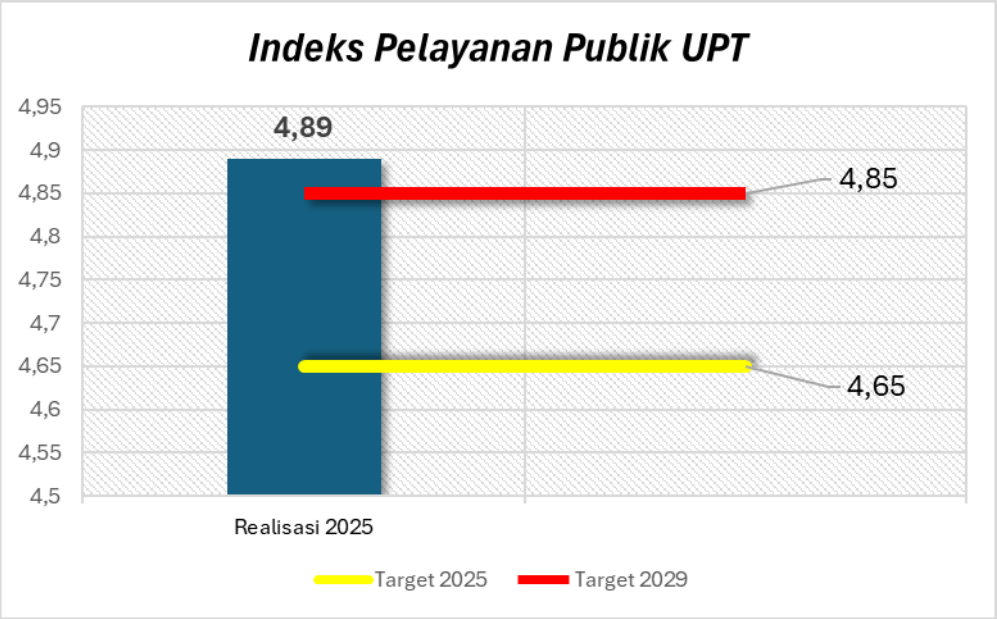
Tabel 106. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

INDIKATOR	TARGET RENSTRA (2029) (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,85	4,89	100,82	Tercapai / Melampaui

Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT pada Tahun 2025 sebesar 4,89 jika dibandingkan dengan target Tahun 2029 yaitu 4,85 persen dengan capaian 100,82 masuk ke dalam kriteria **"Tercapai / Melampaui"**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 86. Grafik capaian realisasi terhadap target jangka menengah

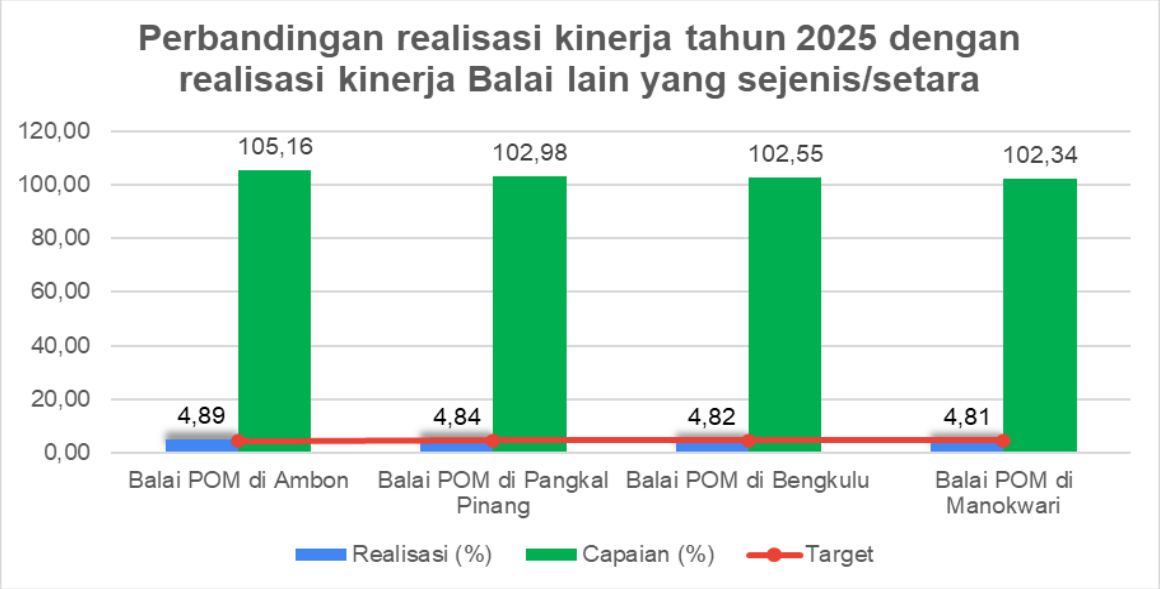


4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

Tabel 107. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

UPT	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Balai POM di Ambon	4,65	4,89	105,16%	Sangat Baik
Balai POM di Pangkal Pinang	4,70	4,84	102,98%	Sangat Baik
Balai POM di Bengkulu	4,70	4,82	102,55%	Sangat Baik
Balai POM di Manokwari	4,70	4,81	102,34%	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Pada indikator Indeks Pelayanan Publik UPT secara umum telah tercapai. Pada Balai POM di Ambon, Balai POM di Pangkal Pinang, Balai POM di Bengkulu, dan Balai POM di Manokwari capain dengan kriteria “Sangat Baik”.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Terdapat 3 aspek yang belum dicapai secara maksimal dengan ricncian:

1. Aspek Kebijakan Pelayanan (4,86): Memperhatikan penulisan penanggalan dokumen agar tidak terdapat kesalahan penulisan pada laporan
2. Aspek Profesionalisme SDM (5): Maksimal
3. Aspek Sarana Prasarana (5): Maksimal
4. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik (4,7): Pemutakhiran informasi setiap hari pada subsite sehingga masyarakat atau pengguna layanan bisa mendapat update informasi terbaru setiap harinya
5. Aspek Konsultasi dan Pengaduan (5): Maksimal
6. Aspek Inovasi (4,5): mengikutsertakan inovasi pelayanan publik dalam berbagai tingkat kompetisi inovasi sehingga meningkatkan peluang untuk memperoleh prestasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Aspek Kebijakan Pelayanan:
   a. Forum Konsultasi Publik dalam rangka proses penyusunan dan perubahan Standar Pelayanan seluruh jenis layanan dengan melibatkan unsur masyarakat, akademisi, instansi terkait, organisasi masyarakat sipil, dan media massa.
   b. Maklumat pelayanan telah didokuntasikan dan di publikasikan sehingga dapat diakses publik.
2. Aspek Profesionalisme SDM: adanya Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana atau Budaya Pelayanan, motivasi kerja yaitu mekanisme yang dibangun unit kerja untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan,tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan yang berprestasi berupa kinerja, kehadiran, Kerjasama, inovatif.kreatif, penampilan, dan tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal serta tersedia pelaksana layanan yang menerapkan budaya layanan.
3. Aspek Sarana Prasarana: Pemenuhan sarana prasarana meliputi parkir, ruang tunggu nyaman, toilet, beserta fasilitas pendukungnya serta tersedia sarana prasarana ramah kelompok rentan
4. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik:
   a. Sistem informasi pelayanan publik yang telah online/website dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional
   b. telah menginput layanan yang ditetapkan ke dalam sistem informasi pelayanan publik nasional.
   c. Subsite Balai POM di Ambon (ambon.pom.go.id) mudah diakses, kompatibel, merupakan kanal digital resmi pemerintah (domain.go.id) dan navigasi yang mudah dipahami.
5. Aspek Konsultasi dan Pengaduan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Sarana dan petugas lengkap konsultasi dan pengaduan meliputi media sosial, e-mail, surat, telepon, tatap muka, tempat khusus, dan petugas khusus dan FAQ (Frequently Answer Qusetions).
b. sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas

6. Aspek Inovasi: Keikutsertaan inovasi BPOM di Ambon dalam KOIN dan Sinovik namun belum menjadi juara.

IKSK 24. Nilai Pembangunan ZI

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

self-assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

Adapun hasil evaluasi ZI untuk Balai POM di Ambon berdasarkan penilaian inspektorat adalah **87,26** dengan rincian sebagai berikut:

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
A.	**Komponen Pengungkit**		60,00				
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	3,11	3,67	6,78	**MS**
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	2,47	2,67	5,14	**MS**
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	3,75	3,50	7,25	**MS**
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	3,58	3,78	7,36	**MS**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	6,19	6,88	13,07	**MS**
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,42	3,76	8,18	**MS**
TOTAL PENGUNGKIT						**47,78**	
B.	**Komponen Hasil**		40,00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			22,33	
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			17,33	**MS**
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			5,00	**MS**
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50			17,15	
		Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			17,15	**MS**
TOTAL HASIL						**39,48**	
NILAI PMPZI						**87,26**	

Secara ringkas hasil evaluasi terhadap Pembangunan zona Integritas pada Balai POM di Ambon adalah sebagai berikut:

- Unit kerja telah menyusun dasar hukum pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM melalui SK Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas, SK Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi, dan SK Mekanisme Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas. Adapun SK Mekanisme Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI ditandatangani secara elektronik pada 10 April 2025 sehingga tidak mendukung SK Tim Pelaksana RB yang ditandatangani secara elektronik pada tanggal 6 Februari 2025;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Rencana pembangunan ZI disusun dengan menetapkan target-target prioritas, namun target yang ditetapkan belum sepenuhnya relevan dengan tujuan pembangunan WBK dan masih sebatas pemenuhan target kinerja unit pada IKU (Indikator Kinerja Utama) seperti pada nilai pembangunan ZI, nilai SAKIP dan nilai IPP. Selain itu, belum terlihat adanya penetapan target terhadap peningkatan indeks BerAKHLAK;
- Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan ZI dengan melibatkan pimpinan unit, namun pelaksanaannya belum terdokumentasi secara lengkap dan berkala, termasuk pada pelaksanaan pemantauan rencana aksi tindak lanjutnya;

Pada Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,92 (syarat 3,2) dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,96 (syarat 3,6) di atas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB. Dan Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 5,00 (syarat 2,5) di atas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Tahun 2025

Tabel 108. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM di BPOM Ambon Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	86	87,26	101,47	Sangat Baik

Realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM pada tahun 2025 sebesar 87,26% terhadap target 86% dengan capaian 101,47% dengan kriteria capaian "**Sangat Baik**".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 109. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
2024	92,26	84,93	92,06	Cukup
2025	86,00	87,26	101,47	Sangat Baik

Pada indikator nilai Pembangunan ZI, terdapat peningkatan realisasi dari tahun 2024 senilai 84,93% dengan kriteria capaian “Cukup” dibandingkan tahun 2025 senilai 87,26% dengan kriteria capaian “Sangat Baik”. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan nilai di komponen pengungkit (pada tahun 2024 dari 47,27 menjadi 47,78) dan komponen hasil (pada tahun 2024 dari 37,66 menjadi 39,48).

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA 2025 – 2029

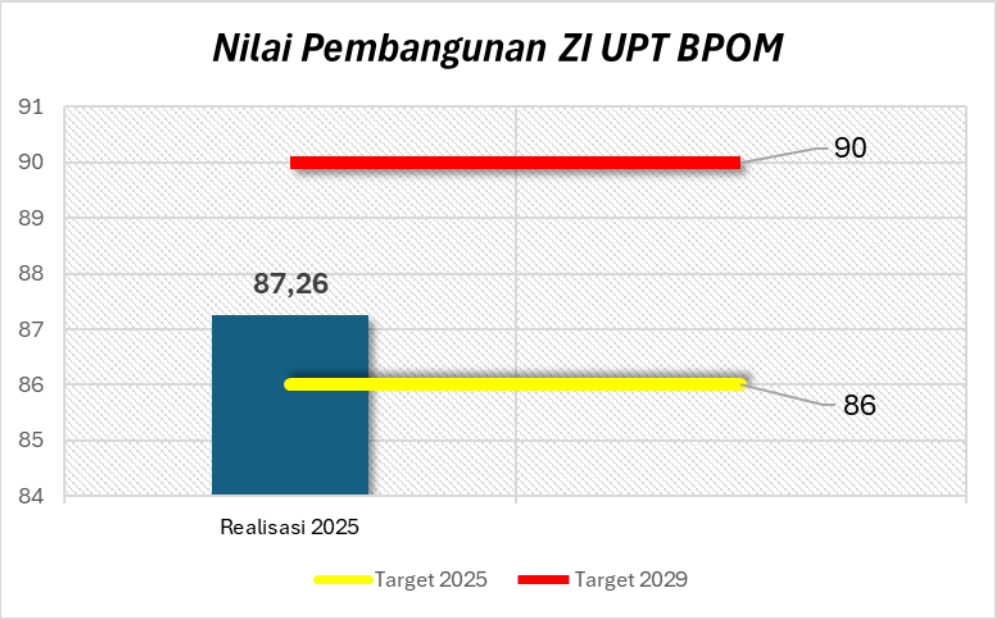
Tabel 110. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

INDIKATOR	TARGET RENSTRA (2029) (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90	87,26	96,96	Akan Tercapai

Realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM pada Tahun 2025 sebesar 87,26 jika dibandingkan dengan target Tahun 2029 yaitu 90 persen dengan capaian 96,96 masuk ke dalam kriteria **“Akan Tercapai”.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 87. Grafik capaian realisasi terhadap target jangka menengah

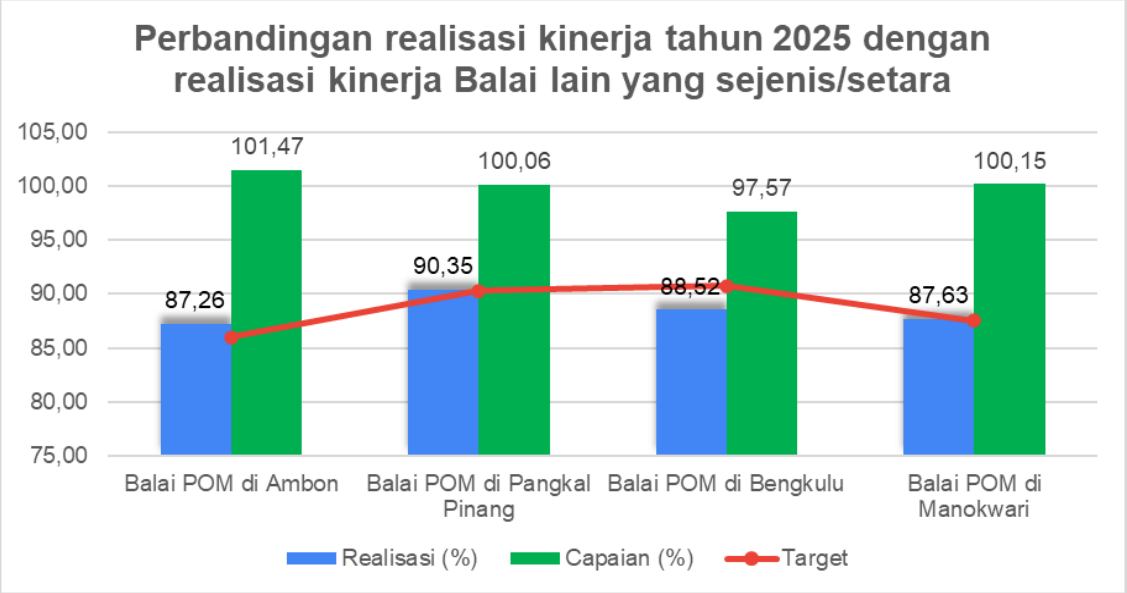


4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

Tabel 111. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

UPT	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Balai POM di Ambon	86,00	87,26	101,47%	Sangat Baik
Balai POM di Pangkal Pinang	90,30	90,35	100,06%	Sangat Baik
Balai POM di Bengkulu	90,72	88,52	97,57%	Baik
Balai POM di Manokwari	87,50	87,63	100,15%	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Pada indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM secara umum telah tercapai. Pada Balai POM di Ambon, Balai POM di Pangkal Pinang, dan Balai POM di Manokwari tahun 2025 dapat memenuhi target dengan kriteria capaian “Sangat Baik”, namun pada Balai POM di Bengkulu belum dapat memenuhi target 2025 dengan kriteria capaian “Baik”.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan ZI telah dijadwalkan dilaksanakan setiap bulan dan dilaksanaan dengan konsisten;
- Data dukung monev renja bulanan yang diupload secara berkala sebagai data dukung
- Pimpinan telah berperan sebagai role model, serta pelaksanaan monev secara bersama;
- Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada Balai POM di Ambon sebesar 87,26

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Pelaksanaan monev secara berkala dan konsisten dengan melibatkan pimpinan
- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- Penguatan agen perubahan

IKSK 25. Nilai AKIP UPT

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja Internal;
5. Capaian Kinerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bobot masing – masing komponen Adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	**100**

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	**Sangat Memuaskan** Telah terwujud good governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (Reform).
2	A	> 80 - 90	**Memuaskan** Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	> 70 - 80	**Sangat Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	> 60 - 70	**Baik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	> 50 - 60	**Cukup (Memadai)** Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	> 30 - 50	**Kurang** Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0 - 30	**Sangat Kurang** Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh kesimpulan rata-rata nilai SAKIP Tahun 2025 adalah sebesar 78,48, jika dibandingkan dengan rata-rata hasil evaluasi Tahun 2024 dengan rata-rata nilai sebesar 78,96 disimpulkan bahwa rata-rata nilai hasil evaluasi mengalami penurunan sebesar 0,48. Penyebab utama menurunnya nilai hasil evaluasi Tahun 2025 dikarenakan menurunnya capaian kinerja output dan outcome pada sebagian besar Satker di Lingkungan BPOM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada tahun 2025, berdasarkan penilaian dari Inspektorat, untuk realisasi Nilai AKIP Balai POM di Ambon sebesar **78,77** dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai		Keterangan (Kenaikan/Penurunan Nilai)
			2024	2025	
1.	Perencanaan Kinerja	24	18,48	20,16	+1,68
2.	Pengukuran Kinerja	24	17,76	18,00	+0,24
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,48	9,72	+0,24
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	15,20	15,20	0,00
5.	Capaian Kinerja	20	16,87	15,69	-1,18
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**77,79**	**78,77**	**+0,98**
Predikat			**BB**	**BB**	**Tetap**

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Tahun 2025

Tabel 112. Nilai AKIP UPT BPOM di BPOM Ambon Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai AKIP UPT	79,50	78,77	99,08	Baik

Realisasi Nilai AKIP UPT Balai POM di Ambon pada tahun 2025 berdasarkan hasil penilaian inspektorat sebesar 78,77% terhadap target 79,50% sehingga capaian 99,08% dengan kriteria capaian "**Baik**". Berdasarkan target yang ditetapkan, realisasi nilai AKIP Balai POM di Ambon masih belum mencapai (-0,73 poin) dan berdasarkan realisasi tersebut, Balai POM di Ambon pada tahun 2025 mendapat predikat **BB.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 113. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
2024	80,93	77,78	96,11	Cukup
2025	79,50	78,77	99,08	Baik

Pada indikator nilai AKIP UPT, terdapat peningkatan realisasi dari tahun 2024 senilai 77,78% dengan kriteria capaian “Cukup” dibandingkan tahun 2025 senilai 78,77% dengan kriteria capaian “Baik”. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan nilai di komponen perencanaan kinerja (pada tahun 2024 dari 18,48 menjadi 20,16), pada komponen pengukuran kinerja (pada tahun 2024 dari 17,76 menjadi 18,00), dan komponen pelaporan kinerja (pada tahun 2024 dari 9,48 menjadi 9,72), namun terjadi penurunan pada komponen capaian kinerja (pada tahun 2024 dari 16,87 menjadi 15,69)

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA 2025 – 2029

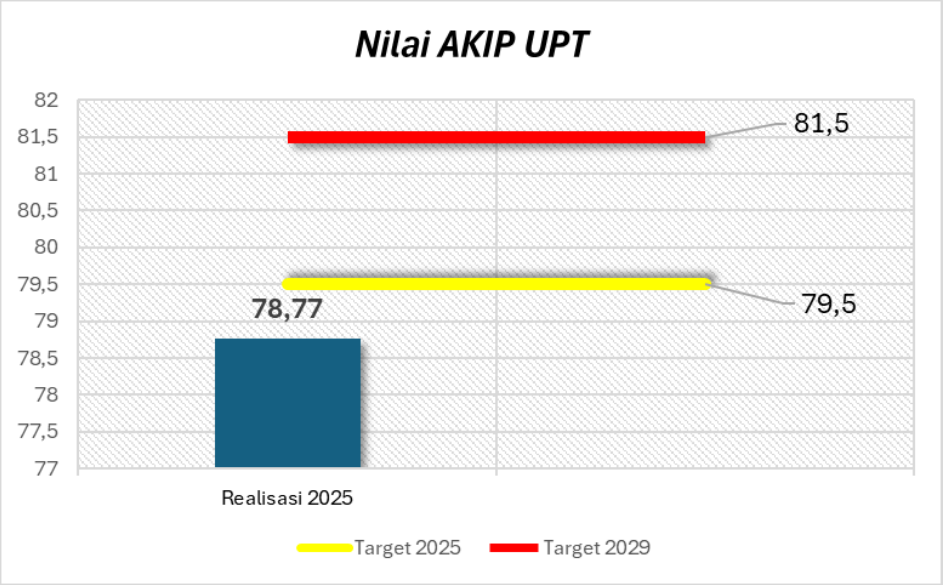
Tabel 114. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

INDIKATOR	TARGET RENSTRA (2029) (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai AKIP UPT	81,50	78,77	96,65	Akan Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi Nilai AKIP UPT Balai POM di Ambon pada Tahun 2025 sebesar 78,77 jika dibandingkan dengan target Tahun 2029 yaitu 81,50 persen dengan capaian 96,65 masuk ke dalam kriteria **"Akan Tercapai".**

Gambar 88. Grafik capaian realisasi terhadap target jangka menengah

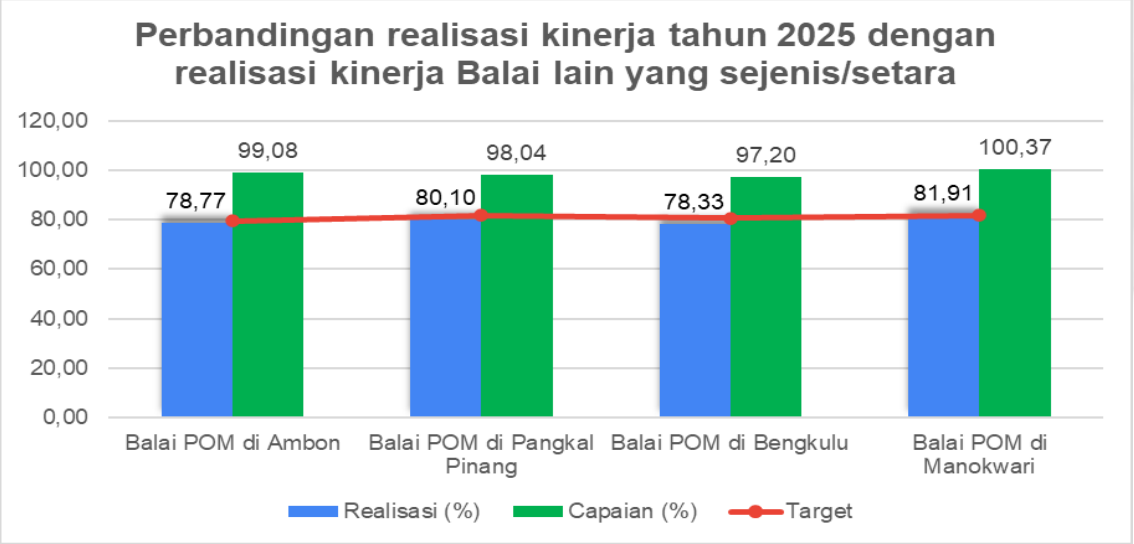


4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

Tabel 115. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

UPT	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Balai POM di Ambon	79,50	78,77	99,08%	Baik
Balai POM di Pangkal Pinang	81,70	80,10	98,04%	Baik
Balai POM di Bengkulu	80,59	78,33	97,20%	Baik
Balai POM di Manokwari	81,61	81,91	100,37%	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Pada indikator Nilai AKIP UPT secara umum tidak mencapai target. Pada Balai POM di Ambon, Balai POM di Pangkal Pinang, dan Balai POM di bengkulu tahun 2025 tidak dapat memenuhi target namun capaian masik dalam kategori “Baik”, sedangkan pada Balai POM di Manokwari dapat memenuhi target tahun 2025 dengan kategori “Sangat Baik”. Berdasarkan predikat AKIP, 2 Balai yaitu Balai POM di Ambon dan Bengkulu mendapatkan predikat “BB”, sedangkan 2 Balai lain yaitu Balai POM di Pangkal Pinang dan Balai POM di Manokwari dengan predikat “A”

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun penyebab indikator tidak mencapai target berdasarkan penilaian tiap komponen adalah:

A. Perencanaan Kinerja: Nilai 20,16 dari bobot maksimal 24,00 (< 3,84)
   - Penyusunan perubahan target kinerja pada tahun berjalan belum secara konsisten dilengkapi dengan kertas kerja sebagai dasar usulan perubahan

B. Pengukuran Kinerja: Nilai 18,00 dari bobot maksimal 24,00 (< 6)
   - Tindak lanjut rekomendasi terhadap capaian masing – masing indikator belum berkesinambungan antar bulan / triwulan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Pelaksanaan monev kinerja secara bulanan telah dilaksanakan namun belum terdokumentasi secara konsisten

C. Pelaporan Kinerja: Nilai 9,72 dari bobot maksimal 9,48 (< 0,24)
   - Terdapat perbedaan nilai capaian antar laporan / pelaporan kinerja belum terintegrasi
   - Penyusunan pelaporan kinerja telah dilakukan namun belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman impelementasi SAKIP

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal: Nilai 15,20 dari bobot maksimal 20 (< 4,80)
   - Integrasi penyusunan akuntabilitas kinerja belum maksimal

E. Capaian Kinerja: Nilai 15,69 dari bobot maksimal 20 (< 4,31)
   - Penilaian capaian kinerja membandingkan antara capaian tahun 2024 dengan 2025 dan terdapat penurunan pada kinerja yang dilaporkan (Outcome). Pada tahun 2025, terdapat 2 IKU yang belum memenuhi target yaitu:
     1. Nilai AKIP UPT, Realisasi 78,77 dengan target 79,5 (Capaian 99,08%). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, Predikat Nilai AKIP UPT memiliki pengaruh besar terhadap NKO. Tahun 2025, Balai POM di Ambon mendapat predikat “BB” pada pelaksanaan SAKIP sehingga pada penilaian kinerja organisasi (NKO) terdapat pengurangan poin sebanyak 10% pada masing – masing indikator. Sehingga pada NKO yang awalnya 103,02% dengan predikat “Istimewa” mendapat pengurangan menjadi 93,01% dengan predikat “Baik”
     2. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, Realisasi 2,91 dengan target 3,05 (capaian 95,41%). Indikator ini merupakan hasil penilaian oleh inspektorat, pada indikator ini terdapat selera risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan, serta telah dilakukan penilaian risiko, namun berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat kelemahan dalam penyusunan dokumen manajemen risiko

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Hal-hal yang perlu ditingkatkan agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini pada tahun mendatang berdasarkan masing – masing komponen adalah:

A. Perencanaan Kinerja

- Penyusunan kertas kerja pada masing – masing indikator dan kertas kerja perubahan target (Jika ada) di dokumentasikan secara konsisten agar mudah tertelusur
- Pelaksanaan dialog kinerja dalam penentuan sasaran kinerja dan target pada masing – masing indikator di penanggung jawab tiap fungsi

B. Pengukuran Kinerja

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja di dokumentasikan secara konsisten setiap bulan agar dapat tertelusur
- Memastikan tindak lanjut rekomendasi pada indikator dilaksanakan dan berkelanjutan agar dapat di monitoring

C. Pelaporan Kinerja

- Penyusunan laporan kinerja dengan berpedoman pada pedoman implementasi SAKIP yang berlaku

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

- Pemanfaatan layanan Bacarita do sebagai salah satu inovasi dalam pengumpulan dokumen secara terintegrasi sehingga memudahkan dalam pencarian dokumen.

IKSK 26. Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Kinerja Anggaran =
(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi NIlai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Tahun 2025

Tabel 116. Nilai Kinerja Anggaran UPT di BPOM Ambon Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	5	100	Baik

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai POM di Ambon pada tahun 2025 yang dikonversi menjadi indeks adalah 5 terhadap target 5 sehingga capaian 100% dengan kriteria capaian "**Baik**".

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 117. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
2024	-	-	-	-
2025	79,50	78,77	99,08	Baik

Pada tahun 2025, Indikator Nilai Kinerja Anggaran dihitung dan dikonversi menjadi indeks sehingga belum dapat dilakukan perbandingan terhadap tahun sebelumnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

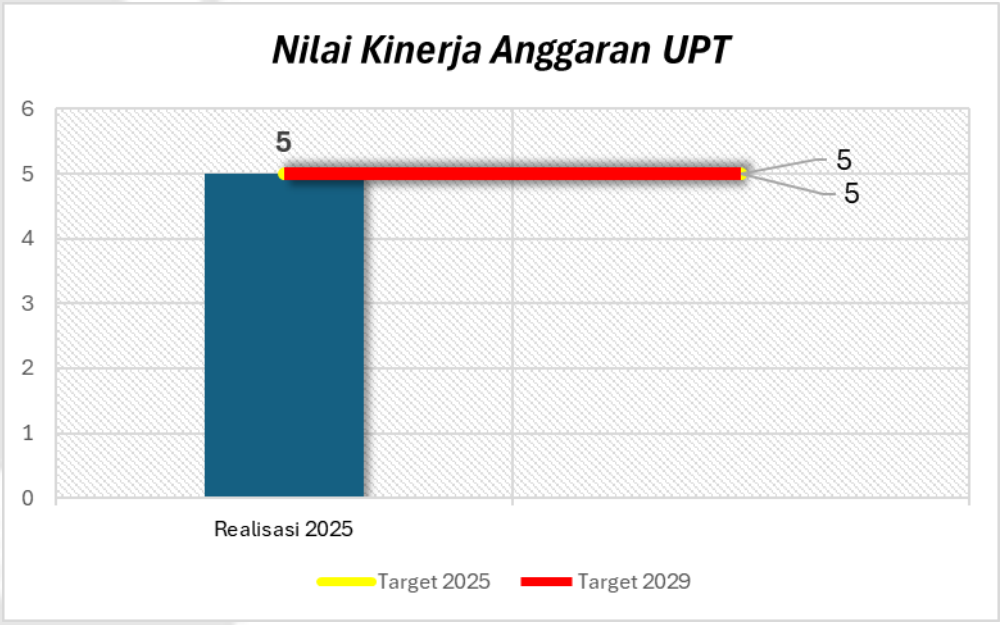
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA 2025 – 2029

Tabel 118. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

INDIKATOR	TARGET RENSTRA (2029) (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	5	100	▲ Tercapai / Melampaui

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai POM di Ambon pada Tahun 2025 sebesar 5 jika dibandingkan dengan target Tahun 2029 yaitu 5 dengan capaian 100 masuk ke dalam kriteria **"Tercapai / Melampaui"**

Gambar 89. Grafik capaian realisasi terhadap target jangka menengah

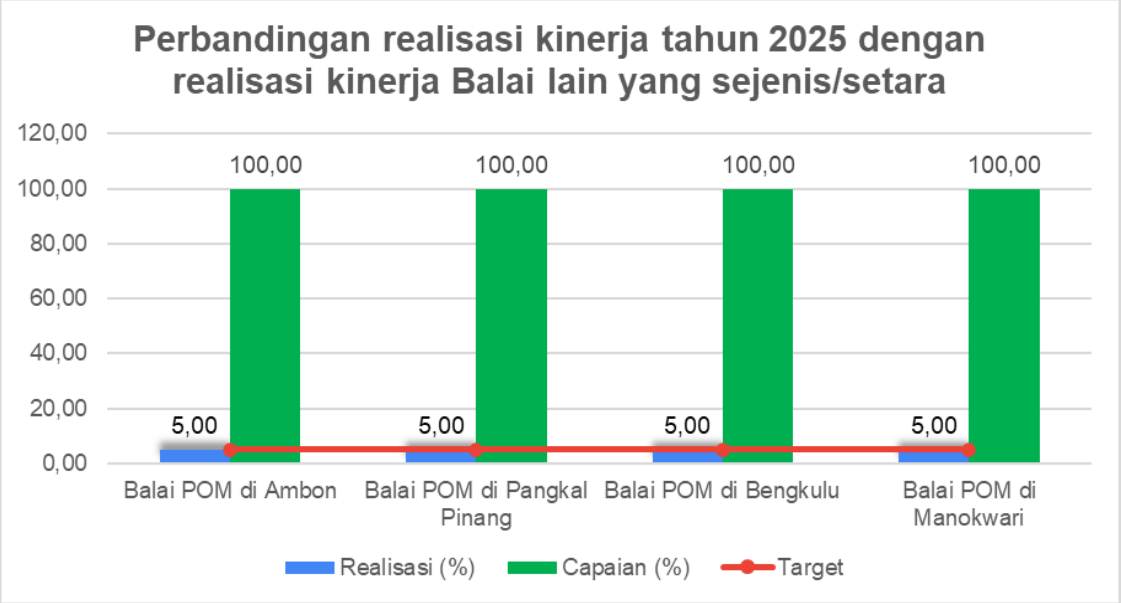


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

Tabel 119. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

UPT	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Balai POM di Ambon	5	5	100%	Baik
Balai POM di Pangkal Pinang	5	5	100%	Baik
Balai POM di Bengkulu	5	5	100%	Baik
Balai POM di Manokwari	5	5	100%	Baik



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

BPOM di Ambon telah mengawal kesesuaian RPD Terhadap Output

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Hal-hal yang perlu ditingkatkan agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini pada tahun mendatang adalah:

- Peningkatan kompetensi petugas perencana dan pengumpul data dalam penginputan data agar sesuai dengan timeline
- Monitoring dan evaluasi secara continue terhadap update data kinerja setiap bulan
- Desk data secara rutin
- Mengoptimalkan tim evaluasi kinerja yang ada agar konsisten memantau pencapaian kinerja

IKSK 27. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan / sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manjemen risiko tergantung pada individu perorangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di sluruh area bisnis. Mengunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manejemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

- Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
- Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
- Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Tahun 2025

Tabel 120. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM di BPOM Ambon Tahun 2025

INDIKATOR	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,05	2,91	95,41	Baik

Realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT Balai POM di Ambon pada tahun 2025 sebesar 2,91 terhadap target 3,05 sehingga capaian 95,41% dengan kriteria capaian "**Baik**".

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tabel 121. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
2024	-	-	-	-
2025	3,05	2,91	95,41	Baik

Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM merupakan indikator kinerja dengan perhitungan baru pada periode RENSTRA 2025 - 2029, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi serta capaian kinerja tahun sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

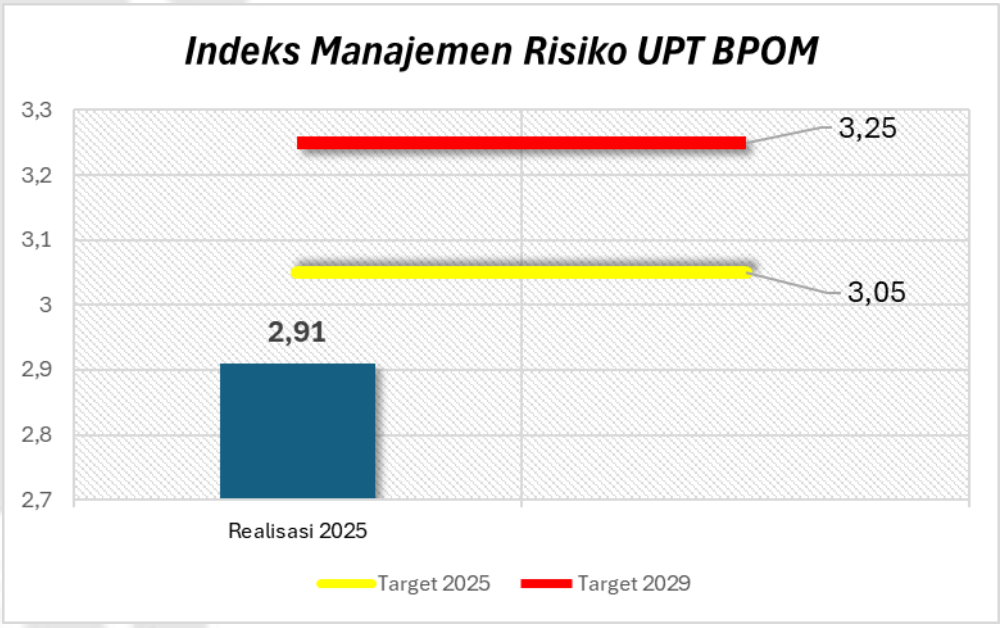
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah RENSTRA 2025 – 2029

Tabel 122. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah

INDIKATOR	TARGET RENSTRA (2029) (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,25	2,91	89,54	Akan Tercapai

Realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT pada Tahun 2025 sebesar 2,91 jika dibandingkan dengan target Tahun 2029 yaitu 3,25 dengan capaian 89,54 masuk ke dalam kriteria **"Akan Tercapai"**

Gambar 90. Grafik capaian realisasi terhadap target jangka menengah

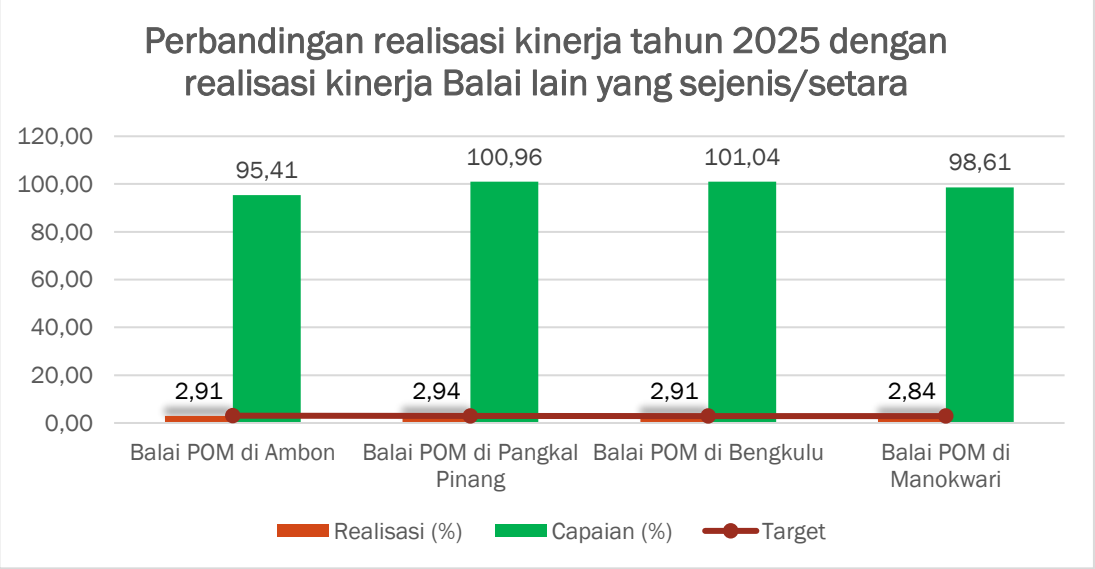


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

Tabel 123. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara

UPT	TARGET TA. 2025 (%)	REALISASI TA. 2025 (%)	% CAPAIAN	KRITERIA
Balai POM di Ambon	3,05	2,91	95,41	Baik
Balai POM di Pangkal Pinang	2,91	2,94	100,96	Sangat Baik
Balai POM di Bengkulu	2,88	2,91	101,04	Sangat Baik
Balai POM di Manokwari	2,88	2,84	98,61	Baik



Realisasi Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM pada 2 Balai yaitu Balai POM di Ambon dan Balai POM di Manokwari tahun 2025 belum mencapai target dengan kriteria “Baik”, Sedangkan 2 Balai lainnya yaitu Balai POM di Bengkulu dan Balai POM di Pangkal Pinang sudah melebihi target dengan kriteria capaian “Sangat Baik”.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

- Belum seluruh pegawai memiliki pemahaman yang memadai terkait manajemen risiko.
- Proses identifikasi risiko telah dilakukan dengan melibatkan seluruh fungsi, namun belum terdapat bukti terdokumentasi yang memadai bahwa pimpinan unit kerja telah memberikan masukan/arahan terkait implementasi manajemen risiko di unit kerjanya.
- Selera risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan, serta telah dilakukan penilaian risiko, namun berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat kelemahan dalam penyusunan dokumen manajemen risiko, antara lain:
    1) Penentuan level risiko inheren untuk seluruh risiko kecuali risiko baru pada Semester II tahun 2025 masih berdasarkan hasil level risiko residual Semester I tahun 2025
    2) Terdapat ketidaksesuaian hasil pengujian aktivitas pengendalian eksisting dengan penurunan level risiko, hasil penilaian kelemahan pengendalian adalah kelemahan signifikan dengan simpulan efektivitas pengendalian tidak efektif, namun pengendalian eksisting tersebut mampu menurunkan level risiko residual dibawah level selera risiko (≥16), misalnya pada kode risiko S-05.
    3) Terdapat ketidaksesuaian pemilihan Kategori Risiko yakni bukan berdasarkan penyebabnya, misalnya pada kode risiko R-01.
    4) Terdapat aktivitas pengendalian saat ini (existing control) yang tidak selaras dengan risk event/penyebab/akibat, misalnya pada kode risiko U-05.
- Telah terdapat rencana tindak pengendalian (RTP) untuk risiko residual dengan level risiko (≥16), namun deskripsi tindakan mitigasi masih sama dengan aktivitas pengendalian saat ini (existing control), misalnya pada kode risiko O-115.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Terdapat rekomendasi kepada Balai POM di Ambon agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

a. Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan terkait manajemen risiko melalui pelatihan/ sertifikasi/ refreshment/ workshop/ awareness manajemen risiko untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.
b. Pimpinan unit kerja selaku pemilik risiko agar meningkatkan komitmen dan keterlibatan dalam proses pengelolaan manajemen risiko diantaranya Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). dibuktikan dengan memberikan masukan/arahan yang terdokumentasi secara memadai atas implementasi manajemen risiko di unit kerjanya.
c. Melakukan tinjauan kembali terhadap identifikasi dan analisa risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM dengan memperhatikan catatan kelemahan. Merumuskan tindakan mitigasi pada RTP yang berbeda dari pengendalian eksisting, sehingga dapat efektif menurunkan level risiko residual. dibuktikan dengan memberikan masukan/arahan yang terdokumentasi secara memadai atas implementasi manajemen risiko di unit kerjanya.
d. Merumuskan tindakan mitigasi pada RTP yang berbeda dari pengendalian eksisting, sehingga dapat efektif menurunkan level risiko residual.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Hal-hal yang perlu ditingkatkan agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini pada tahun mendatang adalah:

- Melaksanakan penyusunan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan terkait manajemen risiko melalui pelatihan/ sertifikasi/

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

refreshment/ workshop/ awareness manajemen risiko sesuai GAP dan rencana pengembangan BPOM di Ambon tahun 2026-2029 dan mengevaluasinya.

- Membuat dokumentasi/ notulen terinci pada rapat manajemen risiko termasuk arahan atau rekomendasi pimpinan secara elektronik.
- Meninjau kembali atas seluruh identifikasi dan analisa resiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM

Beberapa poin hal yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja :

- Mempertimbangkan isue internal dan eksternal serta faktor yang berhubungan dengan capaian target kinerja dalam identifikasi resiko
- Melaksanakan seluruh tahapan manajemen resiko
- Melakukan berbagai upaya peningkatan kompetensi melalui sosialisasi, workshop manajemen resiko dalam meningkatkan pemahaman resiko yang menjadi tanggungjawabnya
- Telah melakukan integrasi manajemen kinerja dan manajemen resiko melalui cascading resiko dan tagging resiko pada setiap RHK
- Pimpinan/ Kepala Balai berperan aktif dalam menggunakan manajemen resiko dalam mengambil Keputusan.

3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dalam rangka melaksanakan peningkatan kinerja dan implementasi SAKIP, Balai POM di Ambon senantiasa memanfaatkan informasi-informasi hasil evaluasi kinerja maupun anggaran dari laporan sebelumnya untuk dapat melakukan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi kendala-kendala maupun permasalahan yang akan dihadapi. Pemanfaatan informasi tersebut meliputi:

1. Berdasarkan Laporan kinerja Interim Triwulan III 2025, Terdapat 3 Indikator yang baru dilaksanakan pada pertengahan tahun 2025 (September) yaitu indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Terdapat perubahan target pada beberapa indikator selama tahun 2025 (Agustus 2025) yaitu pada Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang sebelumnya 85% menjadi 89,5%, Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang sebelumnya 80% menjadi 91%, Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang sebelumnya 85% menjadi 91%, Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang sebelumnya 87% menjadi 91%, Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang sebelumnya 80% menjadi 89%, dan Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan yang sebelumnya 88,66% menjadi 93,06%. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian breakdown target indikator UPT mengacu pada hasil kesepakatan desk pemutakhiran target yang telah dilaksanakan pada 25-26 Juni 2025 karena adanya penyesuaian Informasi kinerja baik Sasaran, Indikator, Target, dan Cascading Kinerja sebagaimana Rancangan Renstra BPOM 2025-2029.
3. Pemanfaatan informasi pada Laporan Kinerja Interim Triwulan II, dan Triwulan III menunjukkan bahwa capaian IKU Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tercapai yaitu pada TW II sebesar 107,73% dengan predikat “Sangat Baik” dan pada TW III sebesar 108,64% dengan predikat “Sangat Baik”. Hal ini secara konsisten dicapai karena beberapa kegiatan diantaranya adanya pemetaan risiko sediaan farmasi berbasis data sehingga pengambilan sampel lebih terfokus pada sediaan yang berisiko tinggi, Kepatuhan terhadap jadwal dan target sampling oleh petugas di lapangan menunjukkan adanya disiplin pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, Pelatihan rutin dan peningkatan kapasitas SDM, sehingga petugas memahami regulasi terbaru serta mampu melakukan pengambilan dan pengujian sampel dengan akurat, dan pelaporan secara tepat waktu.
4. Target pada indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan indeks tahunan sebesar 102,69% dengan kriteria “Sangat baik”. Berdasarkan informasi pada laporan kinerja pada triwulan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sebelumnya beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu Kegiatan KIE Farmakovigilans telah dilaksanakan dengan melibatkan narasumber kompeten dari Direktorat KMEI, dan pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan peserta KIE Farmakovigilans sebagai penanggung jawab pelaporan ESO/KTD secara berkelanjutan melalui media komunikasi yang ada (WA grup) agar melaporkan setiap kasus yang terjadi melalui e-Meso.

5. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan I – III 2025, didapatkan informasi bahwa pada indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, dan Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah dilaksanakan dengan maksimal pada Balai POM di Ambon. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target yang ditetapkan pada tahun 2025 dengan predikat “Sangat Baik”. Beberapa kegiatan yang dapat dimaksimalkan antara lain pada fungsi pemeriksaan konsisten melaksanakan sampling berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai dengan ketentuan pedoman sampling. Waktu pelaksanaan sampling di Tahun 2025 rata-rata selama 5 (lima) hari kerja. Sebaran lokasi pengambilan sampel telah dilakukan pada 9 (sembilan) kabupaten/kota sehingga sampel lebih representatif dan dapat memberikan gambaran kinerja organisasi yang sesungguhnya, Tim KLB-KP telah mengikuti bimbingan teknis penanganan KLB-KP sehingga memiliki kompetensi yang baik dalam melaksanakan investigasi epidemiologi dan dapat menentukan dugaan agen penyebab dengan lebih cepat, Rutin melakukan koordinasi dan monitoring proses perencanaan, pengambilan, pemeriksaan, pengujian, pelaporan dan tindak lanjut sampel pangan PIRT sesuai dengan ketentuan Pedoman Sampling, dan kegiatan pendukung lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.4 Realisasi Anggaran

E. Realisasi Kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran) ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 124. Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Indikator	VOLUME			ANGGARAN				
		T	R	%	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	% (Pagu Awal)	% (Pagu Akhir)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,5	97,77	109,24	612.459.000	610.265.800	599.391.373	97,87	98,22
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	26,7	102,69	41.000.000	18.430.000	16.013.940	39,06	86,89
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	97,70	107,36	96.020.800	96.020.800	95.594.713	99,56	99,56
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	100,00	100,00	127.423.800	127.423.800	126.993.613	99,66	99,66
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	91,11	100,12	127.423.800	127.423.800	126.993.612	99,66	99,66

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	VOLUME			ANGGARAN				
		T	R	%	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	% (Pagu Awal)	% (Pagu Akhir)
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,00	92,99	109,40	84.950.800	73.223.000	72.245.104	85,04	98,66
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	98,00	107,69	16.995.600	16.192.600	16.106.049	94,77	99,47
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	88,57	104,20	16.995.600	16.192.600	16.106.049	94,77	99,47
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,00	99,50	105,85	416.139.500	392.605.700	387.924.719	93,22	98,81
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,00	95,10	106,85	367.094.000	366.827.800	362.836.068	98,84	98,91

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	VOLUME			ANGGARAN				
		T	R	%	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	% (Pagu Awal)	% (Pagu Akhir)
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,06	97,63	104,91	174.735.500	191.203.100	189.414.430	108,40	99,06
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00	91,00	100,00	16.161.000	18.354.200	18.293.675	113,20	99,67
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	103,96	103,96	80.468.000	67.134.200	66.170.096	82,23	98,56
14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	11,11	11,11	100,00	73.877.600	73.877.600	73.730.105	99,80	99,80
15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,90	74,60	100,95	12.055.726.000	7.131.173.000	7.125.532.383	59,10	99,92
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di	87,93	91,40	103,95	207.750.000	113.780.000	110.774.920	53,32	97,36

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	VOLUME			ANGGARAN				
		T	R	%	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	% (Pagu Awal)	% (Pagu Akhir)
	wilayah kerja UPT								
17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	100,00	537.064.000	109.022.000	104.179.888	19,40	95,56
18	Jumlah desa pangan aman	3	3	100,00	544.308.000	72.350.000	71.850.400	13,20	99,31
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00	152.085.000	9.850.000	5.905.390	3,88	59,95
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	17,57	17,57	100,00	50.925.000	29.312.000	25.952.930	50,96	88,54
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75,00	77,50	103,33	400.110.000	384.321.000	384.237.622	96,03	99,98

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Indikator	VOLUME			ANGGARAN				
		T	R	%	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	% (Pagu Awal)	% (Pagu Akhir)
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	99,00	110,00	94.383.000	20.000.000	19.989.600	21,18	99,95
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,65	4,89	105,16	118.507.000	118.507.000	111.110.802	93,76	93,76
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	86	87,26	101,47	2.179.396.000	1.913.115.250	1.911.777.055	87,72	99,93
25	Nilai AKIP UPT	79,5	78,77	99,08	2.168.936.000	1.955.281.250	1.953.644.753	90,07	99,92
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	5	100,00	2.180.626.000	1.908.253.250	1.906.916.055	87,45%	99,93
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,05	2,91	95,41	2.279.026.000	1.918.593.250	1.916.989.020	84,11%	99,92

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan

Tabel 125. Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		ANGGARAN				
				Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	% (Pagu Awal)	% (Pagu Akhir)
a	b		c	d	e	f	(f/d x 100)	(f/e x 100)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	612.459.000	610.265.800	599.391.373	97,87	98,22
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	41.000.000	18.430.000	16.013.940	39,06	86,89
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.020.800	96.020.800	95.594.713	99,56	99,56
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	127.423.800	127.423.800	126.993.613	99,66	99,66
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	127.423.800	127.423.800	126.993.612	99,66	99,66

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		ANGGARAN				
				Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	% (Pagu Awal)	% (Pagu Akhir)
a	b		c	d	e	f	(f/d x 100)	(f/e x 100)
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84.950.800	73.223.000	72.245.104	85,04	98,66
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	16.995.600	16.192.600	16.106.049	94,77	99,47
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	16.995.600	16.192.600	16.106.049	94,77	99,47
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	416.139.500	392.605.700	387.924.719	93,22	98,81
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	367.094.000	366.827.800	362.836.068	98,84	98,91

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		ANGGARAN				
				Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	% (Pagu Awal)	% (Pagu Akhir)
a	b		c	d	e	f	(f/d x 100)	(f/e x 100)
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	174.735.500	191.203.100	189.414.430	108,40	99,06
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	16.161.000	18.354.200	18.293.675	113,20	99,67
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	80.468.000	67.134.200	66.170.096	82,23	98,56
		14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	73.877.600	73.877.600	73.730.105	99,80	99,80
		15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	12.055.726.000	7.131.173.000	7.125.532.383	59,10	99,92
		TOTAL		**14.307.471.000**	**9.326.348.000**	**9.293.345.929**	**91,01**	**98,42**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		ANGGARAN				
				Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	% (Pagu Awal)	% (Pagu Akhir)
a	b		c	d	e	f	(f/d x 100)	(f/e x 100)
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	207.750.000	113.780.000	110.774.920	53,32	97,36
		17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	537.064.000	109.022.000	104.179.888	19,40	95,56
		18	Jumlah desa pangan aman	544.308.000	72.350.000	71.850.400	13,20	99,31
		19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	152.085.000	9.850.000	5.905.390	3,88	59,95
		TOTAL		**1.441.207.000**	**305.002.000**	**292.710.598**	**22,45**	**88,05**
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	50.925.000	29.312.000	25.952.930	50,96	88,54
		TOTAL		**50.925.000**	**29.312.000**	**25.952.930**	**50,96**	**88,54**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		ANGGARAN				
				Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	% (Pagu Awal)	% (Pagu Akhir)
a	b		c	d	e	f	(f/d x 100)	(f/e x 100)
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	400.110.000	384.321.000	384.237.622	96,03	99,98
		TOTAL		**400.110.000**	**384.321.000**	**384.237.622**	**96,03**	**99,98**
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94.383.000	20.000.000	19.989.600	21,18	99,95
		TOTAL		**94.383.000**	**20.000.000**	**19.989.600**	**21,18**	**99,95**
6	Layanan Publik UPT yang prima	23	Indeks Pelayanan Publik UPT	118.507.000	118.507.000	111.110.802	93,76	93,76
		TOTAL		**118.507.000**	**118.507.000**	**111.110.802**	**93,76**	**93,76**
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	2.179.396.000	1.913.115.250	1.911.777.055	87,72	99,93
		25	Nilai AKIP UPT	2.168.936.000	1.955.281.250	1.953.644.753	90,07	99,92
		26	Nilai Kinerja Anggaran UPT	2.180.626.000	1.908.253.250	1.906.916.055	87,45	99,93
		27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.279.026.000	1.918.593.250	1.916.989.020	84,11	99,92
		TOTAL		**8.807.984.000**	**7.695.243.000**	**7.689.326.883**	**87,34**	**99,92**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi anggaran terendah pada sasaran kegiatan "Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT" dengan persentase realisasi anggaran sebesar 88,05%. Sedangkan realisasi anggaran tertinggi pasa sasaran kegiatan "Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT" dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,98%.

Realisasi Anggaran per Kegiatan

Tabel 126. Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan

No	Program / Kegiatan / Output	VOLUME			ANGGARAN				
		T	R	%	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	% (Pagu Awal)	% (Pagu Akhir)
1	**AEA.001** Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100,00	94.383.000	20.000.000	19.989.600	21,18	99,95
2	**BAH.001** Keputusan/ Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	160	383	100,00	118.507.000	118.507.000	111.110.802	93,76	93,76
3	**BDC.001** Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	331	331	103,63	150.181.000	84.900.000	84.176.970	56,05	99,15

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Program / Kegiatan / Output	VOLUME			ANGGARAN				
		T	R	%	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	% (Pagu Awal)	% (Pagu Akhir)
4	**BKB.001** Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100,00	226.000.000	84.030.000	83.462.663	36,93	99,32
5	**BMB.001** Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	21	21	109,52	57.569.000	28.880.000	26.597.950	46,20	92,10
6	**CAB.001** Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	11	11	100,00	200.000.000	1.075.000	1.075.000	0,54	100,00
7	**CAN.001** Perangkat pengolah data dan komunikasi	8	8	100,00	80.000.000	0	0	0,00	0,00
8	**PDD.001** Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	1	100,00	1.378.248.000	1.378.248.000	1.372.619.943	99,59	99,59

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Program / Kegiatan / Output	VOLUME			ANGGARAN				
		T	R	%	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	% (Pagu Awal)	% (Pagu Akhir)
9	**QCD.U48** Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Ambon	2	2	100,00	400.110.000	384.321.000	384.237.622	96,03	99,98
10	**QDB.001** Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	100,00	537.064.000	109.022.000	104.179.888	19,40	95,56
11	**QDB.002** Desa Pangan Aman	3	3	100,00	544.308.000	72.350.000	71.850.400	13,20	99,31
12	**QDB.003** Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100,00	152.085.000	9.850.000	5.905.390	3,88	59,95
13	**QDC.001** Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	100,00	41.000.000	18.430.000	16.013.940	39,06	86,89
14	**QDG.001** UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	13	13	100,00	50.925.000	29.312.000	25.952.930	50,96	88,54

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Program / Kegiatan / Output	VOLUME			ANGGARAN				
		T	R	%	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	% (Pagu Awal)	% (Pagu Akhir)
15	**QIA.001** Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	342	342	107,89	424.746.000	424.746.000	423.312.043	99,66	99,66
16	**QIA.002** Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	933	933	100,21	628.620.000	628.620.000	617.685.048	98,26	98,26
17	**QIC.001** Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	49	49	100,00	38.474.000	38.474.000	38.287.105	99,51	99,51
18	**QIC.004** Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	689	689	108,85	1.118.905.000	1.084.905.000	1.072.515.410	95,85	98,86
19	**RAB.001** Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	25	25	100,00	10.677.478.000	5.752.925.000	5.752.912.440	53,88	100,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Program / Kegiatan / Output	VOLUME			ANGGARAN				
		T	R	%	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	% (Pagu Awal)	% (Pagu Akhir)
20	**EBA.956** Layanan BMN	1	1	100,00	8.000.000	8.000.000	6.278.500	78,48	78,48
21	**EBA.994** Layanan Perkantoran	1	1	100,00	8.293.984.000	7.602.138.000	7.598.510.720	91,61	99,95

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa terdapat 2 (Dua) kegiatan yang anggarannya terealisasi 100% yaitu pada rincian output Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (CAB.001) dengan capaian realisasi volume 100%, dan Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (RAB.001) dengan capaian realisasi volume 100%. Sedangkan realisasi anggaran yang terendah sebesar 59,95% yaitu pada rincian output Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (QDB.003) dengan capaian realisasi volume 100%

Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

$$\mathbf{IE} = \frac{\%\ Capaian Output}{\%\ \mathbf{Capaianinput}} \mathbf{IE} = \frac{100\ \%}{100\%} = 1$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Ambon tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 127. Tingkat Efisiensi Kegiatan

No	PROGRAM / KEGIATAN		IE	TE	KATEGORI
1	AEA001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	1,00	0,00	EFISIEN
2	BAH001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	1,07	0,07	EFISIEN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	PROGRAM / KEGIATAN		IE	TE	KATEGORI
3	BDC001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	1,05	0,05	EFISIEN
4	BKB001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1,01	0,01	EFISIEN
5	BMB001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	1,19	0,19	EFISIEN
6	CAB001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,00	0,00	EFISIEN
7	CAN001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	0,00	-1,00	EFISIEN
8	PDD001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1,00	0,00	EFISIEN
9	QCDU48	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di BPOM Ambon	1,00	0,00	EFISIEN
10	QDB001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	1,05	0,05	EFISIEN
11	QDB002	Desa Pangan Aman	1,01	0,01	EFISIEN
12	QDB003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1,67	0,67	EFISIEN
13	QDC001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	1,15	0,15	EFISIEN
14	QDG001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	1,13	0,13	EFISIEN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	PROGRAM / KEGIATAN		IE	TE	KATEGORI
15	QIA001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1,08	0,08	EFISIEN
16	QIA002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1,02	0,02	EFISIEN
17	QIC001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1,00	0,00	EFISIEN
18	QIC004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1,10	0,10	EFISIEN
19	RAB001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1,00	0,00	EFISIEN
20	EBA956	Layanan BMN	1,27	0,27	EFISIEN
21	EBA994	Layanan Perkantoran	1,00	0,00	EFISIEN

Pada tahun 2025 Balai POM di Ambon melaksanakan 21 (dua puluh satu) kegiatan / Program untuk mendukung pencapaian 7 sasaran kegiatan dengan hasil semua kegiatan **Efisien**. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 hingga 0,67. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah tingkat efisiensinya. Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, Balai POM di Ambon mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Tabel 128. Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Kegiatan

No	SASARAN KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	104,22	98,42	1,06	0,06	EFISIEN
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100,99	88,05	1,20	0,20	EFISIEN
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100,00	88,54	1,13	0,13	EFISIEN
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	103,33	99,98	1,03	0,03	EFISIEN
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	110,00	99,95	1,10	0,10	EFISIEN
6	Layanan Publik UPT yang prima	105,16	93,76	1,12	0,12	EFISIEN
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	98,99	99,92	0,99	0,01	EFISIEN

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan pertama “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sebesar Rp9.293.345.929 atau 52,16% dari keseluruhan realisasi anggaran. Sasaran kegiatan ini memiliki tingkat penggunaan anggaran tertinggi karena sebagian besar pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan ada pada sasaran ini. Tahun 2025, Anggaran pada sasaran ini digunakan untuk kegiatan rutin fungsi pemeriksaan berupa pelaksanaan sampling sediaan farmasi dan pangan olahan, pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi dan distirbusi rutin, pengawasan iklan, label rokok dan pemenuhan AMR, serta pemenuhan Kabupaten/Kota Pangan aman. Untuk fungsi pengujian, anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan selama tahun 2025, serta pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pendukung laboratorium sebagai pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium. Kegiatan - kegiatan tersebut telah memberikan dampak terhadap peningkatan efektivitas kinerja, ditunjukkan dengan tercapainya semua target indikator pada sasaran kegiatan ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran kegiatan pertama adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

2. Pada sasaran kegiatan kedua yaitu “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp292.710.598 atau 1,64% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan fungsi infokom berupa pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait sediaan farmasi dan pangan olahan pada masyarakat serta lintas sektor melalui berbagai media, dan pelaksanaan kegiatan Propenas yaitu sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, desa pangan aman, serta pasar pangan aman berbasis komunitas. Kegiatan - kegiatan tersebut telah memberikan dampak terhadap peningkatan efektivitas kinerja, ditunjukkan dengan tercapainya semua target indikator pada sasaran kegiatan ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kedua adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
3. Pada sasaran kegiatan ketiga yaitu “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp25.952.930 atau 0,15% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM di wilayah pengawasan Balai POM di Ambon baik itu sediaan farmasi atau pangan olahan untuk pemenuhan standar. Kegiatan - kegiatan tersebut telah memberikan dampak terhadap peningkatan efektivitas kinerja, ditunjukkan dengan tercapainya target indikator pada sasaran kegiatan ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan ketiga adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

4. Pada sasaran kegiatan keempat yaitu “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp384.237.622 atau 2,16% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan fungsi Penindakan pada kegiatan investigasi, penindakan, pemberkasan, koordinasi, serta peningkatan kompetensi penyidik di Balai POM di Ambon. Kegiatan - kegiatan tersebut telah memberikan dampak terhadap peningkatan efektivitas kinerja, ditunjukkan dengan tercapainya target indikator pada sasaran kegiatan ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan ketiga adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
5. Pada sasaran kegiatan kelima yaitu “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp19.989.600 atau 0,11% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan fungsi Penindakan pada kegiatan cegah tangkal dan deteksi kerawanan kejahatan serta penyusunan laporan di Balai POM di Ambon. Kegiatan - kegiatan tersebut telah memberikan dampak terhadap peningkatan efektivitas kinerja, ditunjukkan dengan tercapainya target indikator pada sasaran kegiatan ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan ketiga adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
6. Pada sasaran kegiatan keenam yaitu “Layanan Publik UPT yang prima”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp111.110.802 atau 0,62% dari keseluruhan realisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

anggaran. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan fungsi Infokom pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik serta pelaksanaan sertifikasi sebagai bagian dari layanan publik. Kegiatan - kegiatan tersebut telah memberikan dampak terhadap peningkatan efektivitas kinerja, ditunjukkan dengan tercapainya target indikator pada sasaran kegiatan ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan ketiga adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

7. Pada sasaran kegiatan ketujuh yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp7.689.326.883 atau 43,16% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan pada program dukungan manajemen berupa kegiatan operasional kantor seperti pembayaran gaji, pemeliharaan kantor dan layanan operasional lainnya serta kegiatan peningkatan kompetensi pegawai. Kegiatan - kegiatan tersebut telah memberikan dampak namun tidak maksimal terhadap peningkatan efektivitas kinerja, ditunjukkan dengan tidak tercapainya 2 target indikator pada sasaran kegiatan ini (Nilai AKIP UPT dan Indkes Manajemen Risiko). Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan ketiga adalah efisien karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



BAB IV
PENUTUP







BADAN POM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV PENUTUP

Tahun 2025 merupakan tahun awal dari periode Rencana Strategis 2025-2029, Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Ambon sebagai media pertanggung jawaban atas capaian kinerja Balai POM di Ambon pada Tahun 2025, atas segala permasalahan dan kendala yang dihadapi serta strategi pemecahannya untuk membuat langkah-langkah dan/atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Berdasarkan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja yang dilakukan, secara garis besar diperoleh capaian kinerja Balai POM di Ambon pada Tahun 2025 sebagai berikut:

- Secara keseluruhan BPOM di Ambon akan berkomitmen mengawal capaian pada tahun 2025 agar dapat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya
- Diperoleh nilai NKO total sebesar 93,01%, Dengan kategori **"Baik"**.

Pada Tahun 2025 telah dilakukan penilaian pada sasaran kegiatan untuk mengetahui keberhasilan kinerja. Nilai capaian keberhasilan tiap sasaran kegiatan Balai POM di Ambon Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran "Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT" mencapai NPS sebesar 104,22% dengan kriteria **"Sangat Baik"**.
2. Pada Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran "Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT" mencapai NPS sebesar 100,99% dengan kriteria **"Sangat Baik**".
3. Pada Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran "Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu" mencapai NPS sebesar 100,00% dengan kriteria "**Baik"**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Pada Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran **"**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT" mencapai NPS sebesar 103,33% dengan kriteria "**Sangat Baik**".
5. Pada Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran "Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT" mencapai NPS sebesar 110% dengan kriteria "**Sangat Baik**".
6. Pada Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran "Layanan Publik UPT yang prima" mencapai NPS sebesar 105,16% dengan kriteria "**Sangat Baik**".
7. Pada Tahun 2025 Balai POM di Ambon telah melaksanakan sasaran "Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal" mencapai NPS sebesar 98,99% dengan kriteria "**Baik**".

SARAN

Secara keseluruhan penilaian Sasaran Strategis yang telah dilakukan menunjukkan hasil capaian Nilai kinerja Organisasi sebesar 93,01% dengan predikat "**Baik**". Oleh karena itu perlunya konsistensi monitoring dan perbaikan secara berkala untuk memaksimalkan pencapaian kinerja BPOM Ambon.

Berdasarkan hasil evaluasi laporan kinerja Tahun 2025 Balai POM di Ambon sebagai upaya peningkatan kinerja terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

A. Hal yang Harus diperbaiki :

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan ZI yang dilaksanakan setiap bulan secara konsisten
2. Meningkatkan kecepatan upload Data dukung monev renja Pembangunan ZI bulanan secara berkala
3. Meningkatkan pengawasan kearsipan mencakup aspek penciptaan, pengelolaan, pemeliharaan dan penyusutan termasuk sumber daya manusia, prasarana dan sarana kearsipan secara berkala terkait kesesuaian pengelolaan arsip pada Balai POM di Ambon

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Meningkatkan komunikasi aktif melalui WA grup BPOM di Ambon dan sarana pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan KIE Farmakovigilans untuk melaporkan KTD/ESO yang terjadi serta kendala yang ditemui dalam rangka pelaporan.
5. Meningkatkan pelaksanaan KIE tatap muka dan KIE media (media sosial/ elektronik/ non elektronik) dengan materi yang dikemas menarik, penyampaian baik dan sesuai dengan kebutuhan audiens.
6. Meningkatkan optimalisasi eksternalisasi subsite ambon.pom.go.id dan Inovasi Panorama 24 (papan Informasi Obat dan Makanan Online 24 Jam) dan media sosial resmi (instagram, facebook, tiktok, youtube) sebagai media informasi dan publikasi kepada masyarakat.
7. Menjalin koordinasi yang baik antara Aparat Penegak Hukum pada lokus terjadinya tindak pidana dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan.
8. Meningkatkan kegiatan patroli siber yaitu profilling dan crawling terhadap tautan-tautan yang diketahui menjual produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang melanggar hukum direkomendasikan untuk dilakukan take down.
9. Meningkatkan kesesuaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon.
10. Menyiapkan pendokumentasian secara memadai yang menunjukkan keterlibatan pimpinan Unit Kepala BPOM Ambon dalam proses pengelolaan dan implementasi manajemen risiko.
11. Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan terkait manajemen risiko untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.
12. Meningkatkan penyusunan kertas kerja pada masing – masing indikator dan kertas kerja perubahan target secara konsisten dan komprehensif sehingga alur penetapan / perubahan target dapat lebih tertelusur
13. Menyediakan data dukung dalam implementasi SAKIP baik dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas yang terintegrasi dengan baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Rencana Tindak Lanjut

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan ZI yang dilaksanakan setiap bulan secara konsisten.
2. Melakukan upload Data dukung monev renja Pembangunan ZI bulanan secara berkala sesuai dengan timeline yang telah ditentukan.
3. Melaksanakan pengawasan kearsipan mencakup aspek penciptaan, pengelolaan, pemeliharaan dan penyusutan termasuk sumber daya manusia, prasarana dan sarana kearsipan secara berkala terkait kesesuaian pengelolaan arsip pada Balai POM di Ambon.
4. Melakukan komunikasi aktif melalui WA grup BPOM di Ambon dan sarana pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan KIE Farmakovigilans untuk melaporkan KTD/ESO yang terjadi serta kendala yang ditemui dalam rangka pelaporan.
5. Melaksanakan KIE tatap muka dan KIE media (media sosial/ elektronik/ non elektronik) dengan materi yang dikemas menarik, penyampaian baik dan sesuai dengan kebutuhan audiens.
6. Optimalisasi eksternalisasi subsite ambon.pom.go.id dan Inovasi Panorama 24 (papan Informasi Obat dan Makanan Online 24 Jam) dan media sosial resmi (instagram, facebook, tiktok, youtube) sebagai media informasi dan publikasi kepada masyarakat.
7. Melaksanakan koordinasi yang baik antara Aparat Penegak Hukum pada lokus terjadinya tindak pidana dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan.
8. Melaksanakan kegiatan patroli siber yaitu profilling dan crawling terhadap tautan-tautan yang diketahui menjual produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang melanggar hukum direkomendasikan untuk dilakukan take down.
9. Melaksanakan kesesuaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon.
10. Pemanfaatan layanan Bacarita do sebagai salah satu inovasi dalam pengumpulan dokumen secara terintegrasi sehingga memudahkan dalam pencarian dokumen.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

BADAN POM

LAMPIRAN

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI AMBON
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: TAMRAN ISMAIL
Jabatan	: Kepala Balai POM di Ambon

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan POM RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai POM di Ambon	Kepala Badan POM RI
TAMRAN ISMAIL	**TARUNA IKRAR**

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI AMBON

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.5 %
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 %
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 %
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 %
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85 %
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 %
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94 %
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93.06 %
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91 %
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 %
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.9 %
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	11.11 %
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.93 %
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10
		03 - Jumlah desa pangan aman	3
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	17.57 %
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 %
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.65
7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	86 %
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	79.5 %
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.05

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 25,220,587,000 (Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	16,918,603,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	8,301,984,000

Ambon, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Ambon

TAMRAN ISMAIL

Pihak Kedua
Kepala Badan POM RI

TARUNA IKRAR

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI AMBON
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	89	0	85	85	85	85	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	612,459,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - Penyusunan Perencanaan Sampling	1,000,000	1,000,000
2.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	B - Pengadaan Sampel	161,610,000	145,449,000
9.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - Pengujian Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetika, Suplemen Kesehatan	466,010,000	466,010,000

02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO													26	41,000,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QDC.001 - Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	A - KIE FARMAKOVIGILANS	41,000,000	41,000,000

03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	96,020,800

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	314,030,000	62,806,000
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel	110,716,000	33,214,800

04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	127,423,800

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel	110,716,000	33,214,800
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	314,030,000	94,209,000

05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	127,423,800

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel	110,716,000	33,214,800
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	314,030,000	94,209,000

06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	84,950,800

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan oleh Petugas Balai (dalam Kota) di Prop. Maluku	3,354,000	670,800
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - Konsultasi/Koordinasi/Monitoring dan Evaluasi kegiatan pengawasan obat dan Makanan serta Perjalanan Pimpinan	638,160,000	63,816,000
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan oleh Petugas Balai (Luar Kota) di Prop Maluku	19,060,000	3,812,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - Forum komunikasi Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan di Propinsi Maluku	166,520,000	16,652,000

07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	91	91	91	91	91	16,995,600

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan oleh Petugas Balai (dalam Kota) di Prop. Maluku	3,354,000	1,341,600
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan oleh Petugas Balai (Luar Kota) di Prop Maluku	19,060,000	7,624,000
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - Bimbingan Teknis / FGD / Sosialisasi Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Petugas Pemeriksaan Sarana	16,060,000	8,030,000

08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	16,995,600

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan oleh Petugas Balai (dalam Kota) di Prop. Maluku	3,354,000	1,341,600
2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan oleh Petugas Balai (Luar Kota) di Prop Maluku	19,060,000	7,624,000
3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - Bimbingan Teknis / FGD / Sosialisasi Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Petugas Pemeriksaan Sarana	16,060,000	8,030,000

09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	416,139,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Hari Raya (Luar Kota)	36,160,000	10,848,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Hari Raya (Dalam Kota)	9,600,000	2,880,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - Perkuatan Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, Makanan dan Rokok	12,000,000	3,600,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - Konsultasi/Koordinasi/Monitoring dan Evaluasi kegiatan pengawasan obat dan Makanan serta Perjalanan Pimpinan	638,160,000	255,264,000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan oleh Petugas Balai (luar Kota) di Prop Maluku	229,589,000	68,876,700
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - Forum komunikasi Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan di Propinsi Maluku	166,520,000	66,608,000
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Oleh Petugas Balai (dalam Kota) di Prop Maluku	26,876,000	8,062,800

10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	89	89	89	89	89	367,094,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Oleh Petugas Balai (dalam Kota) di Prop Maluku	26,876,000	10,750,400
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan oleh Petugas Balai (luar Kota) di Prop Maluku	229,589,000	91,835,600
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - Forum komunikasi Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan di Propinsi Maluku	166,520,000	49,956,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - Konsultasi/Koordinasi/Monitoring dan Evaluasi kegiatan pengawasan obat dan Makanan serta Perjalanan Pimpinan	638,160,000	191,448,000
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - Perkuatan Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, Makanan dan Rokok	12,000,000	4,800,000
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Hari Raya (Dalam Kota)	9,600,000	3,840,000
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Hari Raya (Luar Kota)	36,160,000	14,464,000

11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.66	88.66	88.66	88.66	88.66	88.66	88.66	93.06	93.06	93.06	93.06	93.06	174,735,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - Konsultasi/Koordinasi/Monitoring dan Evaluasi kegiatan pengawasan obat dan Makanan serta Perjalanan Pimpinan	638,160,000	63,816,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - Forum komunikasi Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan di Propinsi Maluku	166,520,000	16,652,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Oleh Petugas Balai (dalam Kota) di Prop Maluku	26,876,000	8,062,800

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Hari Raya (Luar Kota)	36,160,000	10,848,000
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Hari Raya (Dalam Kota)	9,600,000	2,880,000
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan oleh Petugas Balai (luar Kota) di Prop Maluku	229,589,000	68,876,700
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - Perkuatan Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, Makanan dan Rokok	12,000,000	3,600,000

12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								91	91	91	91	91	16,161,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	B - Pengadaan Sampel	161,610,000	16,161,000

13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	80,468,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - Forum komunikasi Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan di Propinsi Maluku	166,520,000	16,652,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - Konsultasi/Koordinasi/Monitoring dan Evaluasi kegiatan pengawasan obat dan Makanan serta Perjalanan Pimpinan	638,160,000	63,816,000

14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	0	70.99	70.99	70.99	71.85	71.85	71.85	73.04	73.04	73.04	73.9	12,055,726,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	A - OPERASIONAL DAN PENGELOLAAN LABORATORIUM	1,053,048,000	1,053,048,000
2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A - Konsultasi dan Sertifikasi SMK3 Berbasis ISO	67,290,000	67,290,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	sesuai Standar Kemampuan Laboratorium				
5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	H - Diklat Refreshment Audit Internal ISO 17025 2017 Pengujian Kimia dan Mikrobiologi (luring)	23,760,000	23,760,000
7.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	A - Pemenuhan / Peremajaan Alat Laboratorium	10,677,478,000	10,677,478,000
8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	B - REKALIBRASI ALAT LABORATORIUM	76,050,000	76,050,000
9.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	G - Pelatihan Teknis Internal Pengujian Kimia Obat, OBA, SK, OK, Kosmetik, Pangan dan Mikrobiologi Molekuler di BPOM Ambon secara luring dengan narsum eksternal	68,800,000	68,800,000
10.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	C - Surveillance Laboratorium / Koordinasi / Konsultasi / Monev / Peningkatan Kompetensi laboratorium	89,300,000	89,300,000

		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												11.11	73,877,600

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengujian laboratorium sampel makanan	A - Pengujian Laboratorium Sampel Makanan	314,030,000	62,806,000
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Pengadaan Sampel	110,716,000	11,071,600

2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	0	0	87.93	87.93	87.93	87.93	87.93	87.93	87.93	87.93	87.93	87.93	207,750,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	B - Forum Komunikasi Publik dan Pelaksanaan Inovasi Kata BPOM On the Spot	28,775,000	28,775,000
2.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	B - TALKSHOW, PAMERAN, SOSIALISASI DI MEDIA	36,750,000	36,750,000
3.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A - OPERASIONAL SIKER	20,819,000	20,819,000
5.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	A - Komunikasi informasi dan Edukasi Masyarakat mengenai Pegawasan Obat dan Makanan	121,406,000	121,406,000

		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0	45	70	70	95	95	95	100	100	10	537,064,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	A - Advokasi dan Monev Terpadu PJAS, GKPD dan Pasar Aman	172,533,000	172,533,000
2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	C - Koordinasi / Evaluasi dan Monitoring dalam rangka Pengawasan PJAS	109,150,000	109,150,000
3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	F - Forum Konsultasi Pelayanan Publik	27,125,000	27,125,000
4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	A - Sosialisasi Keamanan Pangan Kader Sekolah	5,497,000	5,497,000
5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	B - Bimtek Keamanan Pangan Kader Sekolah	58,450,000	58,450,000
6.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	C - Monitoring Evaluasi Pemberdayaan Kader dan Sertifikasi Level 1 Keamanan Pangan Sekolah	10,620,000	10,620,000
7.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	D - Penilaian Kantin Sekolah Dalam Rangka Sertifikasi Kantin Sertifikat Level 2 Keamanan Pangan	2,000,000	2,000,000
8.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	B - Peralatan dan pendukung lainnya	36,000,000	36,000,000
9.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	E - Sampling dan Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka Monev PJAS	76,989,000	76,989,000
10.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	G - Inovasi SAPA REPOST	8,700,000	8,700,000
11.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	H - Inovasi Mobil Terosa	23,200,000	23,200,000
12.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS	I - Inovasi Kata BPOM On the Spot	6,800,000	6,800,000

03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	0	50	50	70	90	90	90	100	100	3	544,308,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	B - Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa	50,155,000	50,155,000
2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	B - Koordinasi / Evaluasi dan Monitoring dalam rangka Pengawasan Desa	204,890,000	204,890,000
3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	C - Bimtek Komunitas Desa dan Pelaku Usaha Pangan Desa	72,630,000	72,630,000
4.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	A - Pengawalan Desa PAMAN	9,973,000	9,973,000
5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	A - ADVOKASI KELEMBAGAAN DESA	33,600,000	33,600,000
6.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	A - Lomba Desa PAMAN	450,000	450,000
7.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	B - Intensifikasi pengawasan Keamanan Pangan Desa	16,950,000	16,950,000
8.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	A - Fasilitasi Keamanan Pangan Komunitas Desa dan Pelaku Usaha Pangan Desa	22,100,000	22,100,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
9.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	D - Inovasi PAMAN BARONDA	32,600,000	32,600,000
10.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	C - Koordinasi Kegiatan Pengawasan Desa Pangan Aman dan Kompetensi Petugas	100,960,000	100,960,000

		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	0	25	50	70	90	90	90	100	100	1	152,085,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	A - KOORDINASI LINTAS SEKTOR PASAR AMAN DARI BB	150,000	150,000
2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	052 - Pengadaan peralatan pendukung	A - Pengadaan Peralatan Pendukung	16,000,000	16,000,000
3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	B - Penyuluhan Komunitas pasar dan Kampanye Pasar	12,280,000	12,280,000
4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi	A - Pengawalan Keamanan Pangan Pasar Intervensi Sebelumnya	74,820,000	74,820,000
5.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi	B - Pelatihan Fasilitator Bagi Petugas Pasar	20,405,000	20,405,000
6.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	A - BIMTEK PETUGAS PASAR DAN PENYULUHAN SERTA INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN PASAR	28,430,000	28,430,000

3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	15	25	40	50	55	60	65	65	75	85	17.57	50,925,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	A - Bimtek Pendampingan UMKM	31,510,000	31,510,000
2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	052 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	A - Forum Koordinasi dalam Rangka Mapping UMKM	19,415,000	19,415,000

4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	5	10	15	20	30	40	62.5	70	75	75	75	400,110,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	051 - Operasi Intelijen	A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	936,000	936,000
2.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	055 - Pemberkasan	A - Pemberkasan	139,376,000	139,376,000
3.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT	051 - Operasi Intelijen	C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	3,200,000	3,200,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	DAN MAKANAN DI BPOM AMBON				
4.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP	936,000	936,000
5.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	054 - Operasi Penindakan	A - Operasi Penindakan	71,416,000	71,416,000
6.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	055 - Pemberkasan	B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	22,856,000	22,856,000
7.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	055 - Pemberkasan	C - Gelar Perkara	3,860,000	3,860,000
8.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	055 - Pemberkasan	D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	11,592,000	11,592,000
9.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	054 - Operasi Penindakan	B - Penangkapan dan Penahanan	5,040,000	5,040,000
10.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmatlitrik	1,872,000	1,872,000
11.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	B - Pelaksanaan Wasmatlitrik	6,400,000	6,400,000
16.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	051 - Operasi Intelijen	B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	69,470,000	69,470,000
17.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan	A - Gelar Kasus dan Pelaporan	936,000	936,000
18.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	C - Koordinasi/Evaluasi/Monitoring dalam rangka Kegiatan Pengawasan dan Penindakan Obat dan Makanan	18,120,000	18,120,000
19.	DR.3165.QCD.U48 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	055 - Pemberkasan	E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	44,100,000	44,100,000

5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	94,383,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	D - Pelatihan Pelantikan PPNS Badan POM	21,440,000	21,440,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	E - Pembentukan Petugas Penggalangan	7,930,000	7,930,000
3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	A - Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme dan Koordinasi ICJS Pada Kejahatan Obat dan Makanan di Prov. Maluku	32,633,000	32,633,000
10.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	B - Pembentukan Petugas Intelijen BPOM dan Pembentukan Petugas Intelijen Lanjutan BPOM	16,220,000	16,220,000
11.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	C - Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	8,000,000	8,000,000
12.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	A - Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM	8,160,000	8,160,000

6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.65	118,507,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	A - Pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi (Pesta Kenari Pro UMKM)	65,040,000	65,040,000
2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	B - Peningkatan kompetensi petugas sertifikasi	19,840,000	19,840,000
4.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A - Pemeriksaan sampel pihak ketiga	33,627,000	33,627,000

7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												86	2,179,396,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - Pengadaan CASN TA 2025	10,418,000	2,604,500
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2025	7,830,000	7,830,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM) 2025	7,670,000	7,670,000
4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - Evaluasi dan Visitasi Satker Pusat Eselon 1 dan eksternal	18,400,000	18,400,000
5.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Alat pengolah data dan komunikasi	80,000,000	20,000,000
6.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	200,000,000	50,000,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - Pembinaan dan Peningkatan Jasmani dan Rohani Pegawai	90,650,000	22,662,500
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Balai	104,160,000	26,040,000
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4,711,708,000	1,177,927,000
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	228,984,000	57,246,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - Perawatan Peralatan Kantor	369,200,000	92,300,000
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - Keperluan Sehari-Hari Perkantoran	220,340,000	55,085,000
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - LANGGANAN DAYA DAN JASA	633,072,000	158,268,000
14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - Perawatan Gedung dan Halaman Kantor	307,776,000	76,944,000
15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN	1,557,676,000	389,419,000
16.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - PENATAUSAHAAN BMN	8,000,000	2,000,000
17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - SEWA RUMAH DINAS	60,000,000	15,000,000

	02 - Nilai AKIP UPT BPOM													79.5	2,168,936,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - Pembinaan dan Peningkatan Jasmani dan Rohani Pegawai	90,650,000	22,662,500
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4,711,708,000	1,177,927,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	23,440,000	23,440,000
4.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Alat pengolah data dan komunikasi	80,000,000	20,000,000
5.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	200,000,000	50,000,000
6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Balai	104,160,000	26,040,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	228,984,000	57,246,000
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - Perawatan Peralatan Kantor	369,200,000	92,300,000
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - Keperluan Sehari-Hari Perkantoran	220,340,000	55,085,000
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN	1,557,676,000	389,419,000
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - SEWA RUMAH DINAS	60,000,000	15,000,000
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - Pengadaan CASN TA 2025	10,418,000	2,604,500
13.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - PENATAUSAHAAN BMN	8,000,000	2,000,000
14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - Perawatan Gedung dan Halaman Kantor	307,776,000	76,944,000
15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - LANGGANAN DAYA DAN JASA	633,072,000	158,268,000

	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM													5	2,180,626,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4,711,708,000	1,177,927,000
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - SEWA RUMAH DINAS	60,000,000	15,000,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - Pengadaan CASN TA 2025	10,418,000	2,604,500
4.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Alat pengolah data dan komunikasi	80,000,000	20,000,000
5.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	200,000,000	50,000,000
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	E - Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM	28,120,000	28,120,000
7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	F - Forum Koordinasi Analis Anggaran BPOM	7,010,000	7,010,000
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - Pembinaan dan Peningkatan Jasmani dan Rohani Pegawai	90,650,000	22,662,500
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Balai	104,160,000	26,040,000
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	228,984,000	57,246,000
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - Perawatan Peralatan Kantor	369,200,000	92,300,000
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - Keperluan Sehari-Hari Perkantoran	220,340,000	55,085,000
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - LANGGANAN DAYA DAN JASA	633,072,000	158,268,000
14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - Perawatan Gedung dan Halaman Kantor	307,776,000	76,944,000
15.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - PENATAUSAHAAN BMN	8,000,000	2,000,000
16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN	1,557,676,000	389,419,000

04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM														3.05	2,279,026,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - Pembinaan dan Peningkatan Jasmani dan Rohani Pegawai	90,650,000	22,662,500
2.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Alat pengolah data dan komunikasi	80,000,000	20,000,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - Bimbingan Teknis / Pelatihan / Rapat Nasional / Konsultasi dan Koordinasi dalam rangka Peningkatan Kompetensi Petugas BPOM Ambon	110,590,000	110,590,000
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - Pengadaan CASN TA 2025	10,418,000	2,604,500
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I - SEWA RUMAH DINAS	60,000,000	15,000,000
6.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - PENATAUSAHAAN BMN	8,000,000	2,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - Perawatan Gedung dan Halaman Kantor	307,776,000	76,944,000
8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN	1,557,676,000	389,419,000
9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - LANGGANAN DAYA DAN JASA	633,072,000	158,268,000
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - Keperluan Sehari-Hari Perkantoran	220,340,000	55,085,000
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - Perawatan Peralatan Kantor	369,200,000	92,300,000
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	228,984,000	57,246,000
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4,711,708,000	1,177,927,000
14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Balai	104,160,000	26,040,000
15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	D - SURVEILAN QMS ISO 9001:2015 dan Audit Internal	22,940,000	22,940,000
16.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	200,000,000	50,000,000

Total	25,220,587,000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Ambon, 29 Agustus 2025

Kepala Balai POM di Ambon



TAMRAN ISMAIL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:9185-1803-3242-5540

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 063.01.2.432948/2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(063)	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2. Unit Organisasi	:	(01)	Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. Provinsi	:	(21)	MALUKU
4. Kode/Nama Satker	:	(432948)	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON
Sebesar	:	Rp. 26.935.263.000	(DUA PULUH ENAM MILIAR SEMBILAN RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA DUA RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

07 KESEHATAN

07.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	25.712.335.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	1.222.928.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN A M B O N (061) Rp. 26.935.263.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.2.432948/2025

DS:9185-1803-3242-5540

Satker : (432948) BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON

DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp.	17.918.603.000
DR.3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp.	17.918.603.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	9.016.660.000
WA.6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp.	9.016.660.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.2.432948/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:9185-1803-3242-5540

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (21) MALUKU
Kode/Nama Satker : (432948) BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON

Program	:	063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	17.918.603.000
Kegiatan	:	3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	17.918.603.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
		2. 01	Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	
		3. 01	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang diilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
		4. 01	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	
		5. 01	Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
		6. 01	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
		7. 02	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
		8. 02	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
		9. 02	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah kerja UPT	
		10. 02	Persentase laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai Good Laboratory Practise	
		11. 02	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
		12. 03	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	
		13. 03	Jumlah desa pangan aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
		14. 03	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
		15. 03	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
		16. 04	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
		17. 04	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
		18. 04	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
		19. 05	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	
		20. 05	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing -masing wilayah kerja UPT BPOM	
		21. 06	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
		22. 07	Persentase UMKM yang memenuhi standar	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.2.432948/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:9185-1803-3242-5540

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (21) MALUKU
Kode/Nama Satker : (432948) BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON

Klasifikasi Rincian Output	1	:	3165.AEA	Koordinasi	14,00	kegiatan	94.383.000
Rincian Output		:	01 AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14.00	kegiatan	94.383.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	3165.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	160,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	118.507.000
Rincian Output		:	01 BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	160.00	dokumen	118.507.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	3165.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	331,00	Orang	150.181.000
Rincian Output		:	01 BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	331.00	Orang	150.181.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	3165.BKB	Pemantauan produk	1,00	laporan	226.000.000
Rincian Output		:	01 BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1.00	laporan	226.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	3165.BMB	Komunikasi Publik	21,00	layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	57.569.000
Rincian Output		:	01 BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	21.00	kegiatan	57.569.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	3165.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	11,00	Paket, Unit	200.000.000
Rincian Output		:	01 CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	11.00	Unit	200.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	3165.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	8,00	Unit	80.000.000
Rincian Output		:	01 CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	8.00	Unit	80.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.2.432948/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:9185-1803-3242-5540

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (21) MALUKU
Kode/Nama Satker : (432948) BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON

Klasifikasi Rincian Output 8 :	3165.PDD	Standarisasi Lembaga			1,00	Lembaga, Unit Kerja	1.378.248.000
Rincian Output :	01	PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	(PN)	1.00	Lembaga	1.378.248.000
Klasifikasi Rincian Output 9 :	3165.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha			2,00	Perkara, Berkas Perkara	400.110.000
Rincian Output :	01	QCD.U48	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	(PN)	2.00	Perkara	400.110.000
Klasifikasi Rincian Output 10 :	3165.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			14,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	1.233.457.000
Rincian Output :	01	QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	(PN)	10.00	Lembaga	537.064.000
	02	QDB.002	Desa Pangan Aman	(PN)	3.00	Lembaga	544.308.000
	03	QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	(PN)	1.00	Lembaga	152.085.000
Klasifikasi Rincian Output 11 :	3165.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			45,00	Orang	41.000.000
Rincian Output :	01	QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans		45.00	Orang	41.000.000
Klasifikasi Rincian Output 12 :	3165.QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM			13,00	UMKM	50.925.000
Rincian Output :	01	QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	(PN)	13.00	UMKM	50.925.000
Klasifikasi Rincian Output 13 :	3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk			1.275,00	Produk, Laporan, Keputusan	1.053.366.000
Rincian Output :	01	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	(PN)	342.00	Produk	424.746.000
	02	QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	(PN)	933.00	Produk	628.620.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.2.432948/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:9185-1803-3242-5540

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (21) MALUKU
Kode/Nama Satker : (432948) BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON

Klasifikasi Rincian Output	14	:	3165.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		738,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	1.157.379.000
Rincian Output		:	01 QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	(PN)	49.00	Lembaga	38.474.000
			02 QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	(PN)	689.00	Lembaga	1.118.905.000
Klasifikasi Rincian Output	15	:	3165.RAB	Sarana Bidang Kesehatan		25,00	Paket, Unit	11.677.478.000
Rincian Output		:	01 RAB.001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	(PN)	25.00	Paket	11.677.478.000
Program		:	063.01.WA	Program Dukungan Manajemen				9.016.660.000
Kegiatan		:	6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM				9.016.660.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum				
			2. 01	Nilai Pengawasan Kearsipan				
			3. 02	indeks Pengelolaan Aset BPOM				
			4. 03	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	6384.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	9.016.660.000
Rincian Output		:	01 EBA.956	Layanan BMN		1.00	Layanan	8.000.000
			02 EBA.994	Layanan Perkantoran		1.00	Layanan	9.008.660.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.2.432948/2025

DS:9185-1803-3242-5540

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (21) MALUKU
Kode/Nama Satker : (432948) BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON

			Ket :			Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	26.935.263.000		a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	25.712.335.000			(2) RPLN	US$ 0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	1.222.928.000		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$ 0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR 0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR 0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR 0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR 0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.2.432948/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:9185-1803-3242-5540

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (21) MALUKU
Kode/Nama Satker : (432948) BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
432948	**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON**	**5.629.660**	**9.348.125**	**11.957.478**	**-**	**-**	**26.935.263**		
063.01.DR	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**	**-**	**5.961.125**	**11.957.478**	**-**	**-**	**17.918.603**		
3165	**Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia**	**-**	**5.961.125**	**11.957.478**	**-**	**-**	**17.918.603**		
3165.AEA	Koordinasi	-	94.383	-	-	-	94.383	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								
01	RM	-	94.383	-	-	-	94.383	061@	
3165.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	-	118.507	-	-	-	118.507	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								
01	RM	-	118.507	-	-	-	118.507	061@	
3165.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	-	150.181	-	-	-	150.181	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								
01	RM	-	150.181	-	-	-	150.181	061@	
3165.BKB	Pemantauan produk	-	226.000	-	-	-	226.000	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.2.432948/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:9185-1803-3242-5540

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (21) MALUKU
Kode/Nama Satker : (432948) BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	226.000	-	-	-	226.000	061@	
3165.BMB	Komunikasi Publik	-	57.569	-	-	-	57.569	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								
01	RM	-	57.569	-	-	-	57.569	061@	
3165.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	-	-	200.000	-	-	200.000	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								
01	RM	-	-	200.000	-	-	200.000	061	
3165.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	80.000	-	-	80.000	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								
01	RM	-	-	80.000	-	-	80.000	061	
3165.PDD	Standarisasi Lembaga	-	1.378.248	-	-	-	1.378.248	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								
01	RM	-	546.340	-	-	-	546.340	061@	
04	PNBP	-	831.908	-	-	-	831.908	061	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.2.432948/2025

DS:9185-1803-3242-5540

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (21) MALUKU
Kode/Nama Satker : (432948) BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3165.QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	-	400.110	-	-	-	400.110	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								
01	RM	-	400.110	-	-	-	400.110	061@	
3165.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	-	1.233.457	-	-	-	1.233.457	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								
01	RM	-	1.233.457	-	-	-	1.233.457	061@	
3165.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	-	41.000	-	-	-	41.000	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								
01	RM	-	41.000	-	-	-	41.000	061@	
3165.QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	-	50.925	-	-	-	50.925	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								
01	RM	-	50.925	-	-	-	50.925	061@	
3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	-	1.053.366	-	-	-	1.053.366	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.2.432948/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:9185-1803-3242-5540

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (21) MALUKU
Kode/Nama Satker : (432948) BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	662.346	-	-	-	662.346	061@	
04	PNBP	-	391.020	-	-	-	391.020	061	
3165.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	-	1.157.379	-	-	-	1.157.379	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								
01	RM	-	1.157.379	-	-	-	1.157.379	061@	
3165.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	-	-	11.677.478	-	-	11.677.478	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								
01	RM	-	-	11.677.478	-	-	11.677.478	061	
063.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**5.629.660**	**3.387.000**	**-**	**-**	**-**	**9.016.660**		
6384	**Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM**	**5.629.660**	**3.387.000**	**-**	**-**	**-**	**9.016.660**		
6384.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.629.660	3.387.000	-	-	-	9.016.660	21 . 51	
	(21.51 MALUKU / KOTA AMBON)								
01	RM	5.629.660	3.387.000	-	-	-	9.016.660	061	
	JUMLAH	**5.629.660**	**9.348.125**	**11.957.478**	**-**	**-**	**26.935.263**		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.2.432948/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:9185-1803-3242-5540

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (21) MALUKU
Kode/Nama Satker : (432948) BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**432948**	**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.211.731	1.201.711	2.995.332	1.270.550	1.270.550	4.260.069	1.270.550	1.270.550	4.857.793	1.270.550	4.857.793	1.198.085	26.935.263
		BELANJA PEGAWAI	469.138	469.138	469.138	469.138	469.138	469.138	469.138	469.138	469.138	469.138	469.138	469.142	5.629.660
		BELANJA BARANG	742.593	732.573	732.573	801.412	801.412	801.562	801.412	801.412	801.412	801.412	801.412	728.943	9.348.125
		BELANJA MODAL	0	0	1.793.622	0	0	2.989.370	0	0	3.587.243	0	3.587.243	0	11.957.478
	063.01.DR.3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	460.344	450.324	2.243.945	519.163	519.163	3.508.682	519.163	519.163	4.106.406	519.163	4.106.406	446.682	17.918.603
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	460.344	450.324	450.324	519.163	519.163	519.313	519.163	519.163	519.163	519.163	519.163	446.682	5.961.125
		53 BELANJA MODAL	0	0	1.793.622	0	0	2.989.370	0	0	3.587.243	0	3.587.243	0	11.957.478
	063.01.WA.6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	751.387	751.387	751.387	751.387	751.387	751.387	751.387	751.387	751.387	751.387	751.387	751.403	9.016.660
		51 BELANJA PEGAWAI	469.138	469.138	469.138	469.138	469.138	469.138	469.138	469.138	469.138	469.138	469.138	469.142	5.629.660
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	282.249	282.249	282.249	282.249	282.249	282.249	282.249	282.249	282.249	282.249	282.249	282.261	3.387.000
		PERKIRAAN PENERIMAAN	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	198.720
		- PNBP (425321)	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	198.720

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.2.432948/2025
IV A. B L O K I R

DS:9185-1803-3242-5540

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [21] MALUKU
Kode dan Nama Satker : [432948] BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		
432948	**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON**		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	1.473.418
	52 Belanja Barang	Rp.	1.473.418
063.01.DR	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**		
3165	**Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia**		
3165.AEA	**Koordinasi**		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	10.700
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	30.875
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
3165.BAH	**Pelayanan Publik Lainnya**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	42.440
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
3165.BDC	**Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	20.936
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	10.296
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
3165.BKB	**Pemantauan produk**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	10.830
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	900
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	73.495
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
3165.BMB	**Komunikasi Publik**		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	3.450
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
3165.PDD	**Standarisasi Lembaga**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	90.705
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
3165.QCD	**Perkara Hukum Badan Usaha**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	128.860
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.2.432948/2025
IV A. B L O K I R

DS:9185-1803-3242-5540

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [21] MALUKU
Kode dan Nama Satker : [432948] BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	21.620	**3165.QDG**	**Fasilitasi dan Pembinaan UMKM**		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024				524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	11.905
3165.QDB	**Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga**				Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)				Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	228.332		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024				Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	9.708
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)				Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	36.825	**3165.QIA**	**Pengawasan dan Pengendalian Produk**		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024				524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	21.680
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)				Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	87.176		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024				524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	3.000
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)				Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	57.225		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			**3165.QIC**	**Pengawasan dan Pengendalian Lembaga**		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
3165.QDC	**Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat**				Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	359.545
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)				Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	3.375		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024				524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	27.000
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)				Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	11.910		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024				524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	170.630

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.2.432948/2025
IV A. B L O K I R

DS:9185-1803-3242-5540

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [21] MALUKU
Kode dan Nama Satker : [432948] BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.2.432948/2025
IV B. C A T A T A N

DS:9185-1803-3242-5540

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [21] MALUKU
Kode dan Nama Satker : [432948] BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503